

BUNGA RAMPAI  
**PENGEMBANGAN AKUNTABILITAS  
PROGRAM LAYANAN**

*Bimbingan &  
Konseling  
di Indonesia*

*Tribute to*

Prof. Dr. Sugiyo, M.Si.

Editor:

Prof. Dr. DYP Sugiharto, M.Pd., Kons.  
Sunawan, S.Pd., M.Si., Ph.D  
Sigit Hariyadi, S.Pd., M.Pd.

*Bunga Rampai*

Pengembangan Akuntabilitas  
Program Layanan Bimbingan dan  
Konseling  
di Indonesia

*“Tribute to Prof. Dr. Sugiyo, M. Si.”*

*Bunga Rampai*

**Pengembangan Akuntabilitas  
Program Layanan Bimbingan dan Konseling  
di Indonesia**

*“Tribute to Prof. Dr. Sugiyo, M. Si.”*

**Tim Penulis**

Prof. Dr. Drs. Agus Taufiq, M. Pd.

Dr. Awalya, M.Pd., Kons.

Drs. Eko Nusantoro, M. Pd., Kons.

Firdian Setiya Arinata, S.Pd., M.Pd.

Indah Lestari, S.Pd., M.Pd, Kons.

Prof. Dr. Neviyarni S., M.S., Kons.

Soeci Izzati Adlya, S.Pd., M.Pd.

Layyinatus Syifa, M.Pd.

Ujang Khiyarusoleh, M.Pd.

**Editor**

Prof. Dr. Dwi Yuwono Puji Sugiharto, M. Pd., Kons

Sunawan, S. Pd., M. Si., Ph. D.

Sigit Hariyadi, S. Pd., M. Pd.

**Layout**

Vira Mulyawati, S.Pd.

**Desain Sampul**

Nawang Purbo Aji

*Bunga Rampai*

Pengembangan Akuntabilitas  
Program Layanan Bimbingan dan  
Konseling  
di Indonesia  
*“Tribute to Prof. Dr. Sugiyo, M. Si.”*

Diterbitkan oleh



IKAPI No.026/Anggota Luar Biasa/JTE/2021

APPTI No. 003.045.1.05.2018



Hak Cipta © pada penulis dan dilindungi Undang-Undang Penerbitan. Hak Penerbitan pada UNNES PRESS.

Dicetak oleh UNNES Press.

Jl. Kelud Raya No. 2 Semarang 50237

Telp. (024) 86008700 ext. 062

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit.

## **Pengembangan Akuntabilitas Program Layanan Bimbingan dan Konseling di Indonesia**

### **Penulis:**

Agus Taufiq, dkk.

### **Editor:**

DYP Sugiharto | Sunawan | Sigit Hariyadi

### **Layout**

Vira Mulyawati

### **Desain Sampul**

Nawang Purbo Aji

15,5 x 23 cm (vi+134 Halaman)

Cetakan Pertama, 2023

**ISBN 978-602-285-360-2**

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima Milyar).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual, kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).

## Sambutan

### Dekan FIP UNNES

Setiap ayunan langkah kaki yang kita buat senantiasa meninggalkan jejak di bumi. Semakin jauh perjalanan yang ditempuh, semakin banyak jejak kaki yang ditinggalkan. Menekuni karir sebagai dosen dapat dianalogikan sebagai menempuh sebuah perjalanan. Semakin panjang masa kerja yang dijalani seorang dosen, semakin banyak pengalaman diperoleh sekaligus semakin, semakin banyak karya tri dharma yang ditorehkan. Salah satu karya melalui tri darma yang dihasilkan seorang dosen menghasilkan buku. Melalui penulisan buku, pemikiran-pemikiran berharga dari para dosen dapat diabadikan dalam bentuk e-book ataupun hard copy. Melalui buku-buku yang dihasilkan para dosen tersebut, mahasiswa dapat mengkases pemikiran-pemikiran dosen secara leluasa, bahkan oleh mahasiswa yang baru lahir pada puluhan dekade sesudahnya.

Secara khusus, penulisan buku Bunga Rampai Pengembangan Akuntabilitas Program Layanan Bimbingan dan Konseling di Indonesia ini, sejatinya adalah kumpulan tulisan ilmiah dari para dosen, mahasiswa dan alumni Prodi Bimbingan dan Konseling, sebagai penghormatan bagi Prof. Dr. Sugiyo, M.Si., yang memasuki purna tugas pada penghujung tahun 2022 ini. Bunga rampai ini terdiri dari 7 bab yang mendiskusikan tentang konsep-konsep, kritik, pendapat, dan berbagai pandangan terkait manajemen dan program bimbingan dan konseling, supervisi dalam bimbingan dan konseling, program evaluasi bimbingan dan konseling, akuntabilitas bimbingan dan konseling, dan kolaborasi dalam bimbingan dan konseling.

Melalui penerbitan buku Bunga Rampai ini saya berharap agar para dosen, mahasiswa semakin termotivasi untuk lebih banyak lagi menghasilkan banyak buku, yang ditulis sesuai dengan bidang ditekuni dan dengan dilandasi passion masing-masing. Penulisan buku yang didasarkan pada

pengalaman dosen dalam mengembangkan pengajaran dan penelitian, akan memperkaya sumber referensi perkuliahan yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi akademisi Bimbingan dan Konseling yang handal, semoga.

Semarang, 30 November 2022

Dr. Edy Purwanto, M.Si.  
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Semarang

## **Kata Pengantar**

### **Ketua Jurusan BK FIP UNNES**

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semua.

Segala puji bagi Allah SWT yang memberikan keberkahan dan kekuatan sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain utamanya untuk profesi kita yaitu Bimbingan dan Konseling. Aamiin.

Pensiun menjadi puncak pencapaian karier pegawai negeri sipil. Dedikasi, loyalitas dan totalitas telah dicurahkan dengan segenap jiwa raga selama menjadi abdi negara terutama sebagai dosen BK FIP UNNES. Prof. Dr. Sugiyo, M.Si., merupakan pakar Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, bidang keahlian Manajemen dan Supervisi BK. Menempuh pendidikan S1 Bimbingan Penyuluhan di IKIP Yogyakarta, S2 Psikologi di Universitas Padjajaran, dan S3 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Selama mengabdikan beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris jurusan & Ketua Jurusan BK, Pembantu Dekan 3 FIP, Ketua LP3 UNNES, dan Ketua Program Studi S2 & S3 Pascasarjana UNNES. Selain itu, beliau juga menerima beberapa penghargaan antara lain dosen teladan FIP IKIP Semarang yang merupakan bukti nyata dan tidak terbantahkan betapa hebat dan harus menjadi panutan dan contoh bagi dosen-dosen BK FIP UNNES.

Mengamalkan ajaran jawa “mikul dhuwur mendehm jero” maka kita harus selalu mengenang perjuangan, semangat, dan jasa Beliau yang sudah ditorehkan selama menjadi Dosen/PNS aktif BK FIP UNNES. Setelah pensiun



pun keteladanan Beliau selalu dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan melepas purna tugas Beliau, Jurusan mempersembahkan Bunga Rampai dengan judul “Pengembangan Akuntabilitas Program Layanan Bimbingan dan Konseling di Indonesia “*Tribute to Prof. Dr. Sugiyo, M. Si.*”

Dalam kesempatan ini saya selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling UNNES menyampaikan banyak terima kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya buku bunga rampai ini kepada Bapak Dekan FIP UNNES beserta jajarannya yang telah memfasilitasi, Tim Editor, dan para kontributor/penulis sehingga bisa tersusun buku bunga rampai. Saya beserta tim penyusun menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik, dan saran dari semua pihak sangat membantu, agar dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam pembuatan buku ini. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dalam mengemban amanah, dan mengembangkan konsep serta praksis keilmuan bimbingan dan konseling bagi kemaslahatan masyarakat. Aamiin.

Barokallah, wabilahittaufiq wal hidayah.  
Wassalamu’alaikum warohamatullahi wabarokatuh.

Semarang, 30 November 2022

Kusnarto Kurniawan, S.Pd., M.Pd., Kons.  
Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling  
FIP Universitas Negeri Semarang

## Pengantar Editor

Kumpulan naskah dalam bunga rampai ini secara khusus mengkaji tentang isu akuntabilitas dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling. Di samping itu, bunga rampai ini secara khusus merupakan persembahan dan penghargaan atas karya Prof. Dr. Sugiyo, M.Pd. yang selama mengajar di Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri Semarang beliau mengkhususkan keahliannya pada bidang manajemen Bimbingan dan Konseling.

Terdapat enam naskah terpilih yang mengkaji isu seputaran akuntabilitas. Artikel pertama ditulis Taufiq menegaskan peran strategis supervisi klinis sebagai bentuk dari pedagogi khas (*signature pedagogy*) untuk mempersiapkan konselor profesional. Artikel kedua ditulis Awalya dan Layyinatuz mengulas tentang kompetensi kolaborasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan Bimbingan dan Konseling. Artikel ketiga ditulis Nusantoro dan Arinata tentang akuntabilitas yang harus ditegakkan konselor guna mempertanggungjawabkan pelayanan Bimbingan dan Konseling. Artikel keempat ditulis Lestari tentang implementasi model evaluasi *goal oriented* dalam evaluasi program Bimbingan dan Konseling. Artikel kelima ditulis Neviyarni dan Adlya kembali menegaskan tentang pentingnya kolaborasi dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling dan tahapan implementasinya. Artikel terakhir ditulis Khiyarusoleh tentang penegasan pentingnya supervise sebagai penentu pengembangan profesionalisme konselor. Bagian akhir dari bunga rampai ini disajikan riwayat kerja, kiprah dan karya Prof. Dr. Sugiyo, M.Si. sebagai bentuk apresiasi kepada beliau selama mengabdikan di Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri Semarang.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penerbitan buku ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memfasilitasi publikasi buku rampai ini, penulis, editor, pejabat fakultas, Dr. Edy Purwanto, M.Si. (sebagai Dekan fakultas kami), Farid Ahmadi Ph.D. (sebagai Wakil Dekan yang membidangi Akademik), Dr. Sinta Saraswati, M.Pd., Kons. (sebagai Wakil Dekan yang membidangi Keuangan dan Umum), Dr. Sungkowo Edy Mulyono, M.Si. (sebagai Wakil Dekan yang membidangi Kemahasiswaan), Kusnarto Kurniawan, M.Pd., Kons. (sebagai Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling), tim penyusun bunga rampai, keluarga besar Jurusan Bimbingan dan Konseling, serta pihak lain yang tidak dapat kami sebut satu per satu.

Semarang, 30 November 2022

Editor

Prof. Dr. DYP Sugiharto, M.Pd., Kons

Sunawan, S. Pd., M. Si., Ph. D.

Sigit Hariyadi, S. Pd., M. Pd

## Daftar Isi

Sambutan Dekan FIP UNNES — iii

Kata Pengantar Ketua Jurusan BK FIP UNNES — v

Pengantar Editor — vii

Daftar Isi — ix

### **Supervisi Klinis Sebagai Pedagogi Khas Bimbingan Dan Konseling**

Agus Taufiq — 3

### **Kompetensi Kolaborasi Konselor Sekolah**

Awalya & Layyinatus Syifa — 33

### **Akuntabilitas Guru Bimbingan dan Konseling**

Eko Nusantoro & Firdian Setiya Arinata — 53

### **Model Evaluasi *Goal Oriented* Bimbingan Dan Konseling Dalam Meningkatkan Profesionalisme Konselor**

Indah Lestari — 73

### **Kolaborasi Dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling**

Neviyarni S & Soeci Izzati Adlya — 91

### **Supervisi Sebagai Penentu Profesionalisme Guru Bimbingan dan Konseling**

Ujang Khiyarusoleh — 119

### **Mengenal Sekilas Sosok “Prof. Dr. Sugiyo, M.Si.” — 139**



*Bunga Rampai*  
Pengembangan Akuntabilitas  
Program Layanan Bimbingan dan  
Konseling  
di Indonesia  
*“Tribute to Prof. Dr. Sugiyo, M. Si.”*





The image shows a blue textured folder on the left, a pair of glasses, a pen, and a financial statement document. The document is titled 'Consolidated financial statements' and contains a table with columns for '31 March 2013 (Unaudited)', '31 December 2012', '31 March 2013 (Audited)', and '31 December 2012'. The table lists various financial figures in thousands, with some values in parentheses indicating negative amounts. The text 'SUPERVISI KLINIS SEBAGAI PEDAGOGI KHAS BIMBINGAN DAN KONSELING' is overlaid on the image.

## SUPERVISI KLINIS SEBAGAI PEDAGOGI KHAS BIMBINGAN DAN KONSELING





# SUPERVISI KLINIS SEBAGAI PEDAGOGI KHAS BIMBINGAN DAN KONSELING

**Agus Taufiq**

Prodi Bimbingan dan Konseling, FIP, Universitas Pendidikan  
Indonesia

## **Abstrak**

Tulisan ini dimaksudkan untuk menguatkan kembali peran sentral supervisi klinis sebagai pedagogi khas dalam penyiapan atau pendidikan konselor abad 21. Pedagogi khas mengacu pada jenis pembelajaran yang khas dalam suatu profesi yang berbeda dengan profesi lainnya. Ia berfungsi sebagai suatu kerangka pedagogis yang di dalamnya terdapat fitur yang luas dan spesifik yang mendefinisikan bagaimana penanaman kebiasaan berpikir, bertindak, dan bertanggungjawab seorang praktisi profesional yang efektif dalam bimbingan dan konseling. Beberapa implikasi dan pertanyaan refleksi dikemukakan untuk mendorong pembaca terutama pendidik konselor dalam mengembangkan supervisi klinis bahkan untuk memunculkan pandangan sendiri yang lebih luas tentang landasan pedagogis profesi bimbingan dan konseling.

**Kata Kunci:** pedagogi khas, pendidikan konselor, supervisi klinis

## **PENDAHULUAN**

Jika seseorang ingin mengerti suatu budaya tertentu, pelajarilah bagaimana pembibitannya dilakukan. Demikianlah pernyataan psikoanalisis Erik Erikson yang dikemukakan kembali oleh Shulman (2005). Pernyataan serupa itu selanjutnya oleh Shulman dijadikan sebagai prinsip untuk memahami suatu profesi; “Jika Anda ingin memahami mengapa suatu profesi berkembang seperti kedokteran,

pengacara dan sebagainya, maka pelajarilah bagaimana pembibitannya” dalam arti bagaimana bentuk-bentuk pembelajaran, dan pembelajaran khas yang biasanya dilakukan dalam proses pendidikan profesi mereka. Ketika Anda mempelajarinya, maka Anda akan mendeteksi bentuk karakteristik instruksional dan pembelajaran yang dilakukan, itulah yang selanjutnya oleh Shulman disebut sebagai *signature pedagogy* pedagogi khas (selanjutnya disingkat PK).

Sebuah pedagogi khas pada dasarnya mendefinisikan suatu profesi, dimana pendekatan atau strategi pedagogis dan tujuan pengajarannya diarahkan untuk pengembangan kebiasaan 3H secara terintegrasi, yaitu kebiasaan tangan (*habit of hand*) seperti yang dapat diidentifikasi dalam tindakan profesional, kebiasaan pikiran (*habit of mind*) seperti pemikiran profesional saat bertindak, dan kebiasaan hati melalui nilai-nilai dan etika yang menjiwai para profesional dalam bekerja (*habit of heart*). Jadi, pedagogi khas adalah mode mengajar yang khas pada suatu profesi yang menjembatani teori (yang diajarkan di kelas) dan praktik profesional (apa yang sebenarnya dilakukan oleh lulusan di lapangan; Shulman, 2005b). Mode ini menyebar masuk ke dalam seluruh struktur kurikulum suatu disiplin (Shulman, 2005a, 2005c), bersifat rutin dan membiasa dan tampak menjadi seperti ritual (Shulman, 2005a), Biasanya diketahui oleh dosen dan mahasiswa setelah mengikuti masa induksi (induction). Namun demikian, sekalipun ada rutinitas, isi dan proses pedagogi khas tidak pernah sama, dimana “kebaruan (*novelty*) datang dari materi kuliah yang diajarkan, bukan datang karena terus-menerus mengubah “aturan pedagogis” (Shulman, 2005c, hal. 10). Hal ini didasarkan pada kinerja profesional di ruang publik sangat terlihat namun tidak mudah diprediksi, sehingga untuk berbuat seperti itu menuntut para

mahasiswa untuk melibatkan diri dalam praktik secara inten dan sensitif. (Shulman, 2005a, 2005c). Dalam praktiknya, pedagogi khas juga bersifat kolaboratif; mahasiswa bertanggung jawab tidak hanya kepada pendidik konselor tetapi juga kepada rekan-rekan mereka (Shulman, 2005a) mereka juga diminta untuk saling memberi tanggapan, masukan, tantangan dan dukungan (Shulman, 2005c). Singkatnya, pedagogi khas merupakan suatu pengalaman keterlibatan (*engagement*), keraguan (*uncertainty*), dan formasi (*formation*) untuk membangun identitas dan karakter profesional (Shulman, 2005a, 2005c). Dengan konsep pedagogi khas seperti itu, pertanyaannya adalah: apakah pendidik bidang profesi bidang bimbingan dan konseling telah menjadikan supervisi klinis sebagai pedagogi khas?

Dengan kata lain, PK adalah jenis pembelajaran yang mengorganisasikan atau mengatur cara-cara fundamental dalam mendidik calon praktisi yang akan memasuki masa depan profesi mereka. Dengan PK ini, para calon praktisi diajari aspek-aspek penting yang meliputi tiga dimensi fundamental pekerjaan profesional, yaitu berpikir (*to think*), melakukan (*to perform*), dan bertindak dengan integritas (*to act with integrity*). Namun demikian, bobot penekanan terhadap ketiga dimensi ini tidak sama pada setiap profesi. Sebagai contoh, dalam profesi kedokteran, mula-mula penekanan diberikan pada belajar berpenampilan sebagai ahli fisik; sementara dalam pendidikan profesi dokter, biasanya lebih ditekankan pada belajar bagaimana memedulikan dan bertindak dengan integritas sebagai profesional. Berbeda dengan pendidikan hukum yang lebih menekankan pada belajar berpikir sebagai pengacara.

PK merupakan serangkaian bentuk pembelajaran tertentu yang dimaksudkan untuk menamakan cara berpikir,

bertindak dan bertanggung jawab seseorang praktisi profesional dalam bidang tertentu. Misalnya, dalam bidang hukum, metode dialog kasus ala Socrates digunakan untuk membahas kasus hukum secara tertulis melalui suatu kertas kerja. Tahun pertama sekolah hukum didominasi dengan metode pembelajaran dialog kasus, dimana seseorang ahli hukum yang bereputasi baik bertindak sebagai instruktur meminta mahasiswa berdialog tentang suatu kasus yang memiliki beberapa kompleksitas di pengadilan. Dalam profesi kedokteran, di samping mengajar, seorang dokter senior memimpin sekelompok mahasiswa untuk mendiskusikan proses dan hasil diagnosis dan manajemen penyakit yang dialami oleh seorang pasien. Menurut (Shulman, 2005a) PK seperti itu dapat menanamkan berbagai karakteristik kepribadian, disposisi dan budaya dalam suatu profesi (identitas profesional). Perlu diingat, walaupun SP berfungsi dalam setiap level pendidikan akademik, namun di dalam proses pendidikan profesi, PK lebih jauh berfungsi untuk pengembangan interest seseorang terhadap profesi, karena pendidikan profesi menghadapi suatu tantangan tunggal, yaitu tidak hanya mengukur dengan baik penguasaan kompetensi akademik, tetapi juga standar kinerja profesional tertentu. Hasil penelitian (Agus Taufiq, 2009) mengafirmasi alasan ini, dimana setelah PPL yang tersupervisi secara efektif, para calon konselor mengalami perkembangan profesional yang sangat signifikan. Alasan lebih jauh, bahwa pendidikan profesi tidak hanya menyiapkan untuk memiliki pemahaman sendiri, pendidikan profesi dimaksudkan untuk mempersiapkan seseorang untuk memberikan pelayanan terbaik dan bertanggung jawab atas pelayanan yang dilakukan. Singkatnya pendidikan profesi berkenaan dengan penyiapan praktisi profesional yang efektif.

PK pendidikan konselor sebaiknya dikembangkan melalui riset yang baik untuk “memberikan suatu infrastruktur pedagogis yang kuat kepada profesi” (Korcuska, 2016, hlm. 157). Meskipun penelitian pedagogi dalam pendidikan konselor cenderung tumbuh pesat dalam profesi lain, namun upaya untuk menyatukan berbagai *theoretical framework* dan dapat memfasilitasi dialog profesional dan penelitian pedagogi di masa depan dalam pendidikan konselor masih sangat kurang. Karena itulah tujuan tulisan ini dimaksudkan untuk menawarkan suatu PK (*signature pedagogy*) dengan mengonseptualisasikan fondasi-fondasi pedagogis dalam pendidikan konselor. Secara khusus, konten artikel ini menegaskan suatu kerangka kerja pedagogi khas konselor, serta memberi sara-saran untuk penelitian di masa depan.

## **PEDAGOGI KHAS BIMBINGAN DAN KONSELING: SUPERVISI KLINIS**

### **1. Kerangka Pedagogi Khas dalam Pendidikan Konselor**

Sebagaimana disinggung di atas, PK merupakan jenis pembelajaran tertentu yang digunakan oleh berbagai disiplin untuk mempersiapkan para mahasiswanya sebagai praktisi profesional yang efektif. (Shulman, 2005a, hlm. 52) menambahkan bahwa PK merupakan jenis pembelajaran yang berbeda dengan profesi lain dan berfungsi untuk mengatur cara-cara "di mana praktisi masa depan dididik untuk menjadi praktisi profesional yang efektif. Oleh sebab itu pedagogi khas bersifat menyebar (*pervasive*) dan tidak *idiosyncratic* pada instruktur, program, atau institusi; melainkan tampil pada semua institusi yang mempersiapkan praktisi dalam suatu disiplin tertentu.

PK memiliki fitur yang luas dan fitur spesifik. Fitur yang luas di tingkat profesional dan program adalah: (1)

berbeda dengan profesi lain, (2) menyebar dalam kurikulum program pendidikan profesional, dan (3) menyebar pada seluruh institusi yang menyelenggarakan program serupa. Fitur spesifik pedagogi khas, yang sering (tetapi tidak selalu) dapat diidentifikasi pada level perkuliahan mengandung 3 struktur, yaitu struktur permukaan (*surface structure*), struktur dalam (*deep structure*), dan struktur implisit (*implicit structure*) (Shulman, 2005a). Struktur permukaan mengacu pada "apa" yang dilakukan dosen pada penggunaan metode-metode pembelajaran konkret seperti metode ceramah, diskusi yang dipimpin oleh mahasiswa, kelompok kecil atau aktivitas-aktivitas *eksperiensial*, studi kasus, simulasi, bermain peran dan sebagainya. Struktur dalam mengacu pada asumsi yang mendasari "bagaimana" dosen menyampaikan suatu batang tubuh atau konten pengetahuan dengan baik (Shulman, 2005a). Struktur dalam terkait dengan suatu paradigma atau pedagogi (seperti paradigma konstruktivisme) yang memandu tindakan dosen di ruang kelas. Akhirnya, struktur implisit mengacu pada "mengapa" dosen melakukan apa yang mereka lakukan, termasuk keyakinan, sikap, nilai, dan disposisi, yang terkait dengan identitas profesional. Struktur implisit mencerminkan moral-moral profesional yang mendasari bagaimana mahasiswa (yang merepresentasikan suatu profesi) harus berpikir, bertindak, dan bekerja secara etis dan bertanggung jawab (*integrity*). Contoh dari struktur implisit dapat ditemukan dalam kompetensi profesional, kode etik, atau dokumen-dokumen standar praktik terbaik. Untuk sesuatu yang dianggap pedagogi khas itu Baltrinic dan Morris (2014) menambahkan dua unsur sekaligus yang disebutnya sebagai fitur luas (*broad features*) dan fitur spesifik (*specific features*). Secara keseluruhan, pedagogi khas membantu para profesional dalam suatu disiplin untuk mendefinisikan (a) apa

yang dianggap sebagai pengetahuan esensial, (b) bagaimana pengetahuan itu di-*share* melalui tindakan mengajar dan belajar, (c) bagaimana pengetahuan diurutkan, dan (d) bagaimana pengetahuan itu dievaluasi dan diterima (Shulman, 2005).

Pendapat lain menyatakan bahwa dalam pendidikan konselor, istilah pedagogi mengacu pada seni dan ilmu pembelajaran, yang secara fisik berakar dalam model-model pelatihan keterampilan profesional (Nelson & Neufeldt, 1998). Pedagogi berbasis pelatihan keterampilan ini dipandang sebagai *Eurosentris* dan kurang memperhatikan reflektivitas konselor dan relasi konseling. Dalam konteks ini (Baltrinic dan Morris, 2014) menghimbau profesi konseling untuk menjauhi ketergantungan pada suatu pedagogi pelatihan keterampilan tunggal itu dan mendukung penggunaan pedagogi multikultural (Fong, 1998), pedagogi perkembangan (Haag Granello & Hazler, 1998), dan pedagogi konstruktivis (Nelson & Neufeldt, 1998) guna memandu penyiapan konselor dan pendidik konselor abad 21. Pendekatan lain yang relevan adalah pendekatan *learner-centered* (Moate & Cox, 2015), *transparent pedagogies* (Dollarhide dkk. 2007), *critical pedagogy* (Brubaker et al., 2010; Haskins & Singh, 2015).

PK, dengan fitur yang luas dan spesifik menyediakan kerangka yang mempersatukan dan mengatur fondasi-fondasi pedagogis pada level perkuliahan serta program latihan profesional. Ini penting karena pendidik harus mampu mengidentifikasi elemen bersama yang penting untuk memandu apa, bagaimana, dan mengapa mereka memberikan pembelajaran tertentu; jadi dengan mengidentifikasi pedagogi khas, bisa membantu pendidik konselor menghargai aspek-aspek landasan pedagogis yang berbeda (*distinct*) dan menyebar (*vervative*) dalam pendidikan



konselor. Dengan demikian, pedagogi khas dalam pendidikan konselor harus mengandung kedua elemen yang dapat dikenali (*recognizable*) untuk melatih para praktisi dan sekaligus *distinct* dari disiplin lain.

Meskipun kajian kritis tentang pedagogi dalam pendidikan konselor secara keseluruhan sangat kurang dalam upaya menghadapi tantangan abad 21 ini namun ada bukti yang mendukung bahwa kajian tentang pendekatan pembelajaran terkait konten spesifik pada level perkuliahan semakin meningkat terutama di tingkat master, namun sangat sedikit *literature* yang membahas pendidikan tingkat doktoral. Demikian pula kajian tentang pendidikan konselor yang terkait dengan penelitian, asesmen, pengembangan karier, dan pertumbuhan dan perkembangan manusia (Barrio Minton et al., 2014; Barrio Minton et al., 2018). Mereka menghimbau adanya kajian lebih lanjut yang inten tentang metodologi pembelajaran dalam pendidikan konselor. Mereka juga merekomendasikan perlunya kajian lain tentang fondasi-fondasi pedagogis dalam pendidikan konselor serta kajian tentang hubungan antara strategi pembelajaran dan pengembangan keterampilan profesional. Terlepas dari kemajuan yang telah dicapai hingga kini, masih diperlukan kajian yang inten dan sistematis, khususnya tentang struktur dan fondasi-fondasi pedagogis dalam pendidikan konselor abad ini. Jika disadari dengan baik, kondisi seperti ini cukup mengkhawatirkan mengingat konsep PK mengandung pengertian dan ciri umum yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk menyatukan kajian-kajian bersama, dialog-dialog profesional dan penelitian tentang fondasi pedagogis dalam pendidikan konselor abad ini.

## 2. Konseptualisasi Supervisi Klinis

Dengan mengadaptasi definisi supervisi klinis yang paling banyak diterima dan digunakan selama 2 dekade terakhir ini, dirumuskan suatu definisi kerja supervisi bimbingan dan konseling sebagai berikut: “Suatu proses intervensi yang diberikan oleh anggota yang lebih senior kepada anggota junior dari profesi yang sama, berbasis relasi yang baik, bersifat evaluatif, berlangsung dalam rentang waktu yang meluas, dan secara simultan bertujuan untuk meningkatkan fungsi profesional junior ke arah yang lebih baik, memantau kualitas layanan profesional yang diberikan kepada klien, serta bertanggung jawab sebagai penjaga gerbang bagi mereka yang akan memasuki profesi bimbingan dan konseling.” (Agus Taufiq, 2021).

Di dalam definisi tersebut ada beberapa elemen yang perlu dijelaskan lebih lanjut untuk menegaskan karakteristik khusus supervisi klinis yang berbeda dengan supervisi lainnya serta berbeda dengan aktivitas-aktivitas lainnya yang serupa atau diserupakan. Beberapa elemen spesifik dalam definisi di atas dijelaskan seperti berikut.

*Supervisi dilakukan oleh anggota senior terhadap junior dari suatu profesi yang sama.* Telah dipahami secara luas, bahwa tujuan esensial supervisi adalah untuk memfasilitasi perkembangan terapeutik, manajemen bimbingan dan konseling. Namun kualitas profesional seorang konselor tidak hanya meliputi kompetensi teknis profesional semata melainkan juga, bahkan yang lebih penting adalah perkembangan identitas profesional konselor yang disupervisi. Oleh sebab itu hubungan antara kedua pihak dari anggota akan lebih *powerful* jika melalui hubungan dengan senior dari profesi yang sama dengan konselor. Supervisi juga harus dipandang sebagai wahana bagi *supervisee* bahwa

*supervisee* sedang disosialisasikan ke dalam suatu profesi dan hal ini bisa dicapai ketika supervisor berperan sebagai model. Supervisor harus membantu supervisee untuk aktif sebagai anggota suatu profesi, mengambil dan memanfaatkan berbagai kesempatan belajar dan latihan yang disediakan oleh organisasi profesi dalam upaya meningkatkan mutu profesionalisme. Seorang supervisor harus lebih maju kualifikasi akademik dan kompetensinya, terutama dalam berbagai pendekatan, metode, dan strategi bimbingan dan konseling, manajemen dan kolaborasi, daripada konselor yang disupervisi.

*Relasi supervisi merupakan elemen yang krusial*, dimana nuansa relasional antara anggota senior dan lebih junior dari profesi yang sama harus dikembangkan sehingga menjadi suatu aliansi kerja supervisi; ditandai dengan kesepakatan terhadap tujuan, kesepakatan tugas dan hubungan emosional yang baik. Semua model atau pendekatan supervisi yang ada sepakat mengakui pentingnya relasi supervisi. Tanpa relasi yang baik, semua tugas, keterampilan, dan alat supervisi lainnya akan menjadi kurang efektif bahkan tidak efektif sama sekali. Dinamika relasi supervisor-konselor adalah ruh dari supervisi. Demikian pentingnya relasi supervisi, sehingga sejumlah aspek kunci relasi supervisi perlu diperhatikan dan dikuasai dengan baik oleh supervisor. Dalam hal ini, supervisor dituntut untuk berpenampilan empati, hangat, jujur, dan toleran, di samping mampu menangani konflik yang biasa terjadi.

*Proses intervensi yang nyata*. Supervisi bukan merupakan satu peristiwa sekali dan berlangsung pada saat terbatas, melainkan merupakan suatu proses intervensi pendidikan, konseling dan konstatatif yang sistematis dan berkelanjutan. Di dalam praktiknya cara-cara itu bersifat

tumpang tindih namun supervisor yang kompeten dapat meracik intervensi yang secara substansial dan unik yang memungkinkan konselor berfungsi sepenuhnya sebagai profesional. Dalam konteks ini ada sejumlah model supervisi yang bisa digunakan sebagai kerangka kerja untuk proses-proses tersebut. Oleh sebab itu pengetahuan dan kesadaran akan model atau strategi intervensi ini akan membantu membelajarkan supervisor sendiri bahwa proses supervisi menjadi lebih aktif dan kreatif. Intervensi dalam supervisi merupakan suatu *continuum* yang merentang dari intervensi yang sangat terstruktur sampai tidak terstruktur. Pertumbuhan dan perkembangan personal dan profesional konselor secara komprehensif dan holistik sebagai tujuan supervisi direalisasikan dengan memberi ruang fasilitasi bagi konselor untuk mendapatkan dukungan, tantangan, refleksi, pelatihan, umpan balik objektif, dan aktivitas pengembangan personal dan profesional secara holistik dan berkelanjutan.

*Waktu supervisi.* Waktu adalah salah satu perbedaan utama antara supervisi dan konsultasi dan pelatihan. Perkembangan dan pertumbuhan kompetensi dan profesionalisme konselor sebagai tujuan supervisi tidak bisa ditempuh dengan waktu yang singkat seperti di dalam pelatihan dan konsultasi. Konsultasi biasanya merupakan acara dengan waktu yang lebih singkat, dan sering kali tidak bersifat evaluatif. Dalam pelatihan, waktu yang diperlukan biasanya lebih singkat karena berkenaan dengan peningkatan suatu keterampilan spesifik. Sementara supervisi lebih merupakan proses yang simultan dimana supervisor harus mempertimbangkan dan mengelola waktu yang diperkirakan cukup untuk mencapai pertumbuhan tertentu dan melakukan aktivitas belajar profesional. Waktu ini dapat berlangsung dari minggu ke bulan bahkan ke tahun, tergantung pada sejumlah

faktor, terutama tingkat dan karakteristik perkembangan profesional dan pribadi konselor yang disupervisi, regulasi, konteks sosio-budaya dimana konselor bekerja. Demikian juga di dalam konsultasi, waktunya yang dipergunakannya lebih sedikit.

*Evaluasi.* Evaluasi terhadap konselor adalah fungsi inti dari supervisi dan sekaligus merupakan tugas yang berpotensi menimbulkan resistensi dan konflik dilematik kepada kedua belah pihak. Evaluasi harus dilakukan secara komprehensif dan cermat, meliputi penilaian terhadap: (a) kinerja tugas atau fungsi klinis *supervisee* dilakukan melalui wawancara, pengamatan, meninjau catatan kasus, penggunaan alat evaluasi berkala, dan pemberian umpan balik secara efektif, (b) gaya belajar yang disukai *supervisee*, motivasi dan kesesuaian dengan aturan kerja, (c) sikap proaktif terhadap pelatihan yang relevan dengan tugas-tugas profesional dan organisasi profesi (d) tingkat perkembangan kompetensi profesional, termasuk kepemimpinan, kompetensi ragam budaya dan advokasi, (e) mengkomunikasikan harapan tentang tugas, indikator kinerja yang efektif, dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pekerjaan. Evaluasi harus sampai menyadarkan konselor akan kekuatan dan kelemahannya, dalam bidang apa saja yang perlu dikembangkan, ditingkatkan atau dipertajam. Evaluasi dilakukan dengan memantau tindakan terhadap klien yang sedang ditangani, menelaah program BK, *mereview* jurnal kegiatan harian, atau melalui asesmen berkala.

*Peningkatan fungsi profesional konselor secara berkelanjutan.* Fungsi utama supervisi adalah untuk membantu subyek yang disupervisi (*supervisee*) menjadi lebih mahir sebagai profesional dan melaksanakan pekerjaan berbasis bukti, dan lebih cakap dalam mengonseptualisasikan apa yang

krusial dilakukan untuk menjadi konselor yang berfungsi secara holistik sebagai agen perubahan. Namun dalam konteks ini supervisi bukan hanya berupaya pada peningkatan keterampilan konseling para konselor, karena sebagai pendidik, keterampilan konseling itu meskipun krusial, namun akan menjadi tidak memadai selama keterampilan itu tidak disertai dengan niat atau kesadaran mendidik, bahwa dia betul-betul berniat sedang membawa peserta didik berkembang ke arah bagaimana seharusnya melalui konseling. Oleh sebab itu, supervisi klinis juga diarahkan untuk meningkatkan fungsi profesional konselor sebagai pendidik. Dalam konteks ini fungsi dan kompetensi konseling tidak dapat dipisahkan dengan fungsi bimbingan (*guidance*) yang dipandang sebagai upaya inti pendidikan.

*Pemantauan kualitas layanan profesional.* Supervisor bertanggung jawab atas *treatment* yang diterima oleh klien terutama dari konselor yang sedang dalam proses diklat atau penyiapan. Tanggung jawab supervisor adalah: pertama kesejahteraan klien yang dilayani terutama keamanan pribadi klien atau siswa, kemudian konselor, dan organisasi tempat konselor bekerja. Pada titik apa seorang supervisor menerima kinerja seorang konselor, dihargai atau diterima oleh klien dan komunitas tempat bekerja. Supervisor harus segera melakukan intervensi dan mengambil tindakan seperlunya ketika kinerja konselor tampak menimbulkan masalah dan/atau berdampak buruk terhadap klien. Tanpa pemantauan kinerja konselor yang tepat dan waspada, bisa-bisa *treatment* yang diberikan kepada para siswa dapat membahayakan siswa, citra profesi, dan organisasi tempat bekerja. Fungsi pemantauan kualitas layanan profesional juga terkait dengan hasil kerja, penggunaan standar layanan dan kode etik bimbingan dan konseling, termasuk kesesuaian

perekrutan dan persyaratan standar, pengakuan atasan dan rekan sejawat terhadap kinerja konselor, ketaatan pada aturan, kebijakan dan prosedur organisasi dan etika layanan. Selain itu, fungsi pemantauan kualitas layanan profesional juga terkait dengan keharusan supervisor untuk memastikan bahwa konselor memiliki kompetensi pengetahuan tentang ragam dan metode intervensi konseling terbaru, termasuk kesadaran terhadap adanya bias dari konselor sendiri terkait dengan intervensi terhadap konselor.

*Supervisi berperan sebagai gatekeeper.* Fungsi ini konsisten dengan fungsi kinerja profesional konselor. Ketika kinerja konselor yang disupervisi mengulang perbuatan yang membahayakan profesi atau klien, supervisor harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk konselor tersebut, seperti melalui pendidikan dan pelatihan, memberikan konseling pribadi, teguran, sanksi, atau bahkan dalam kasus-kasus ekstrem mengusulkan pemutusan hubungan kerja atau penempatan kembali. Apa pun keputusannya, supervisor dia harus bertanggung jawab atas penilaian yang dibuat sebagai penjaga gerbang profesi BK.

Dalam referensi klasik tentang supervisi konseling, Boyd (1978) menjelaskan panjang lebar bahwa intervensi supervisi klinis meliputi: monitoring sebagai pangkalan kegiatan awal, *evaluasi, teaching, coaching, dan supporting*, (Agus Taufiq, 2021) merangkum, fungsi-fungsi supervisi meliputi fungsi: (1) *Klinis*, mengases dan memfasilitasi konselor yang disupervisi (*supervisee*) untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran profesional yang tepat; (2) *Supportif*, mengubah, membentuk, atau mendukung perilaku *supervisee* (subyek yang disupervisi oleh supervisor) dan (3) *Evaluatif*, mengevaluasi kinerja *supervisee* sesuai standar yang ditetapkan. Fungsi-fungsi itu diwujudkan dalam bentuk tujuh

tugas dan aktivitas supervisor sebagai berikut: (a) tugas membangun relasi yang baik (*the relationship task*); (b) tugas mengajar/membelajarkan (*the teaching/learning task*); (c) tugas monitoring isu profesional dan etis (*the monitoring task/monitoring profesional/ethical issues*); (d) tugas evaluasi dan memfilter profesi (*the evaluation & gatekeeper task*); (e) tugas konsultasi (*the consultative task*), dan (f) tugas administratif (*the administrative task*), (g) tugas konseling (*the counselling task*) bilamana perlu.

Sementara peran supervisor klinis meliputi empat peran sebagai berikut: (1) Sebagai Guru: Membantu pengembangan pengetahuan dan keterampilan konseling dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar, menentukan kekuatan yang dimiliki oleh konselor, meningkatkan kesadaran diri, dan mentransmisikan pengetahuan untuk digunakan di dalam tugas praktik dan pertumbuhan profesional; (2) Sebagai Konsultan: meliputi konsultasi kasus, memberi konseptualisasi kasus alternatif, membahas pengembangan kompetensi profesional, organisasi dan disiplin, mengidentifikasi dan mengatasi gangguan yang dihadapi oleh konselor); (3) Sebagai Mentor: memberikan semangat, menilai kekuatan dan kebutuhan, menyarankan berbagai pendekatan klinis, pendukung, dan mencegah kejenuhan. Untuk konselor tingkat pemula, fungsi pendukung sangat penting, dan (4) Sebagai Model bagi konselor yang disupervisi: membimbing dan mengajar supervisi melalui pemodelan peran, memfasilitasi pengembangan profesional konselor secara terintegrasi dan mengembangkan perasaan identitas profesional, serta melatih generasi supervisor berikutnya (Bernard dan Goodyear (2014).



### 3. Karakteristik Supervisi Klinis sebagai Pedagogi Khas Pendidikan Konselor

Supervisi klinis telah diidentifikasi sebagai pedagogi khas (Goodyear, 2007). Supervisi klinis juga telah diidentifikasi sebagai sesuatu yang mendefinisikan praktik kependidikan dalam konseling (Borders et al., 2014). Pada umumnya, supervisi dianggap sebagai pendekatan pembelajaran yang berbeda yang digunakan untuk mengajar mahasiswa selama pelatihan keterampilan profesional secara intensif dalam situasi otentik dengan melibatkan pertemuan dengan klien yang sebenarnya. Supervisi tepat sekali dan memenuhi syarat diposisikan sebagai PK (*signature pedagogy*) karena semua mahasiswa yang bekerja dengan klien dalam program magang atau *internship* melakukannya di bawah supervisi dosen tertentu dan supervisor lapangan (pamong). Supervisi berlangsung secara individual, kelompok kecil, atau dalam situasi *triadic*. Selain itu, fitur luas supervisi menyebar dalam semua program konseling. Dengan kata lain, setiap mahasiswa konseling yang bekerja dengan klien di dalam dan di seluruh program (praktik) konseling belajar, sosial-pribadi dan konseling karier harus menerima supervisi sebagai bagian dari pelatihan klinis mereka. Supervisi juga berisi ciri-ciri khusus pedagogi khas. Secara khusus, supervisi berisi struktur permukaan (*surface structure*) yang meliputi intervensi didaktik, korektif, dan intervensi yang berlangsung dengan struktur dalam supervisi yang meliputi sikap empati, dan dialog mahasiswa-supervisor yang berorientasi pada perkembangan (Goodyear, 2007). Struktur dalam dari supervisi (*deep structure of supervision*) dipandu oleh pedagogi atau paradigma-paradigma yang memberikan penjelasan kepada pendidik tentang pendekatan kerja. Struktur dalam supervisi, dapat digambarkan ketika pemikiran supervisor dipandu oleh

paradigma keadilan sosial (*social justice paradigm in counseling*), maka supervisor itu akan mengharapkan atau menginstruksikan sikap dan perilaku non-diskriminatif kepada praktikan ketika berinteraksi dengan klien secara kontekstual, walaupun ada variasi penerapan paradigma itu, bergantung pada setingnya.

Di dalam hal ini, definisi dan fitur pedagogi khas (*signature pedagogies*) dapat memandu kita untuk menemukan kesamaan (*commonalities*) yang ada di dalam struktur dalam supervisi di samping harus mengakui adanya variasi pada semua seting tanpa kehilangan penyatuan tujuan pedagogi khas. Selain itu, supervisi dilandasi dengan struktur implisit, yaitu pembinaan kompleksitas perbedaan yang bisa mengurangi keberhasilan praktik mahasiswa, yang disebut sebagai aliansi supervisi (Goodyear, 2007). Akhirnya panduan struktur implisit supervisi berkaitan dengan pengalaman belajar-mengajar yang kompleks dan ambigu selama praktik nyata. Dalam konteks ini (Shulman, 2005b) mengingatkan bahwa seorang profesional harus siap untuk "berlatih" dalam disiplin mereka "apakah mereka memiliki informasi pengetahuan yang cukup atau tidak" (hlm. 3). Harus diyakini, bahwa supervisi berisi ciri-ciri fitur luas dan spesifik dari suatu pedagogi khas, namun harus percaya juga bahwa eksplorasi lebih lanjut tentang fitur luas dan fitur spesifik dari supervisi sebagai pedagogi khas masih sangat diperlukan dalam pendidikan profesi konselor.

Pendapat (Bartell dan Vespia, 2009) telah meneliti pedagogi khas dalam bidang *human developmental* dan telah merangkum semua perwujudan pedagogi khas utamanya dalam: (a) menyebarkan perspektif perkembangan mental secara luas, (b) desain kurikulum yang intensional dan sekuensial, (c) pembelajaran aktif dan pemecahan masalah

secara nyata (*active learning and real world problem solving*), (d) penekanan pada konteks perkembangan dan (e) perhatian terhadap lingkungan belajar. Kesimpulan Bartell dan Vespia selaras dengan pandangan profesi bimbingan dan konseling bahwa kajian terhadap pedagogi khas dalam pendidikan konselor membutuhkan kajian yang lebih luas dan inten untuk digunakan pada abad 21 ini.

Sekali lagi, pedagogi khas bukan sekadar suatu kumpulan kompetensi dan praktik-praktik yang berbeda, atau kompilasi keyakinan yang istimewa (*idiosyncratic beliefs*) tentang kerja yang terbaik, pedagogi-pedagogi khas itu mencakup keyakinan dan kelaziman yang lebih luas pada seluruh program pendidikan konselor. Pedagogi khas menawarkan *platform* bagi pendidik konselor untuk menguji pendidikan profesi dengan banyak cara: (a) menyediakan kurikulum yang mendefinisikan keterampilan konselor profesional dan pendidik konselor, kontribusi profesional, dan identitas profesional, (b) menyediakan layanan sosialisasi mahasiswa secara komprehensif tentang nilai-nilai, proses berpikir, dan karakteristik profesional konseling dan pendidikan konselor, dan (c) mempersiapkan konselor dan pendidik konselor menjadi profesional. Dengan demikian, pendidik konselor seyogianya mengidentifikasi dan menentukan apa yang menjadi fitur luas dan fitur spesifik dari pedagogi khas dalam pendidikan konselor. Saat mengidentifikasi pedagogi khas yang potensial, pikirkan apa (*what*), bagaimana (*how*), dan mengapa (*why*) sesuatu itu adalah pedagogi khas dan memikirkan implikasi dari penamaan sesuatu yang "penting (*signature*)" itu pada level profesional, program, dan level kuliah dalam pendidikan konselor. Beberapa contoh disediakan di bawah ini sebagai upaya untuk mendorong eksplorasi lebih lanjut.

Pada tingkat Pendidikan akademik, pedagogi khas terdiri dari tiga struktur umum (yaitu, permukaan, dalam, dan struktur implisit) yang digunakan oleh pendidik untuk mempengaruhi lingkungan belajar. Dalam menerapkan struktur ini, kami akan mengantisipasi dengan melihat kesamaan pendekatan pedagogi yang digunakan di dalam dan di balik perkuliahan (kursus) pendidikan konselor, walaupun ada perbedaan dalam pemberian tugas dan metode penyampaian (misalnya, tatap muka, campuran atau *hybrids, synchronous online, asynchronous online*). Misalnya, pada struktur permukaan — strategi pembelajaran dan intervensi - - untuk perkuliahan (kursus) yang fokusnya pada keterampilan konseling, kami akan mengantisipasi dengan melihat kesamaan, meskipun keseluruhan tugasnya berbeda. Banyak kursus dalam program pendidikan konselor yang mungkin dapat digabungkan ke dalam beberapa bentuk praktik keterampilan konseling baru yang diperoleh melalui bermain peran, sesi peniruan (*mock session*), dan kegiatan pengembangan keterampilan lainnya. Di sisi lain, kursus seperti orientasi tentang konseling kesehatan mental klinis atau konseling sekolah dapat berfokus pada peran konselor dan pengembangan identitas profesi pemberi bantuan (*helping profession*).

Struktur dalam mengacu pada filosofi yang mendasari pembelajaran yang memandu aktivitas pendidik di kelas, mencakup kesamaan nilai yang mendasari profesi konseling secara keseluruhan. Sebagai contoh, struktur dalam dapat mencakup pendekatan yang kita ketahui seperti *learner-centered* (Moate & Cox, 2015), *constructivist* (McAuliffe & Erickson, 2002), atau *transparent pedagogies* (Dollahide et al., 2007) yang menyebar berdasarkan pada bagaimana perkuliahan dirancang, disampaikan, dan dievaluasi secara

konsisten dalam suatu kurikulum. Meskipun seorang pendidik konselor memiliki filosofi pembelajaran yang tersendiri, namun pendekatan mengajar yang digunakan dalam hal mengajar MK yang sama bisa berbeda, dan kita dapat mengantisipasi akan ada kesamaan inti dalam perkuliahan yang sama, terlepas siapa yang mengajarnya. Misalnya, kita dapat mengantisipasi suatu perkuliahan yang berfokus pada pengembangan keterampilan akan menggunakan pendekatan yang serupa untuk pembelajaran dan peragaan ketrampilan tersebut, sekalipun cara penyampaian materi kuliah atau instrukturnya pun berbeda.

Akhirnya, struktur implisit dari pedagogi khas pada level perkuliahan meliputi sikap, nilai, dan disposisi profesional yang terkait dengan identitas profesional terlepas dari setting dan siapa pendidik atau instrukturnya. Struktur implisit dalam kasus perkuliahan keterampilan konseling yang telah jelaskan sebelumnya kemungkinan besar dapat didorong oleh konten kode etik profesi bimbingan dan konseling, praktik terbaik, kompetensi profesional, dan standar akreditasi. Jadi, terlepas dari bagaimana kelas-kelas tersebut dikelola, isi perkuliahan akan dipengaruhi oleh nilai-nilai inti profesi bimbingan dan konseling tersebut. Dengan kata lain, pada struktur implisit pedagogi khas dapat mengidentifikasi sikap, nilai, dan keyakinan yang diwujudkan oleh semua pendidik konselor.

Pada level pendidikan profesi, pedagogi khas sangat penting untuk mempersiapkan semua mahasiswa agar menjadi anggota suatu profesi konseling dan pendidikan konselor yang berbeda dan berkontribusi (Shulman, 2005a, 2005b). Mengidentifikasi pedagogi khas hanya bisa terjadi dalam konteks pemahaman karakteristik fundamental suatu disiplin itu sendiri. Oleh karena itu, kami akan mengantisipasi

semua program konseling dapat mencakup pedagogi khas untuk mencapai tujuan mensosialisasikan mahasiswa konseling ke dalam profesi yang mengimplikasikan perlunya kesepakatan tentang karakteristik profesi. Jadi, pedagogi khas ini mengandung aspek budaya profesional konseling yang umumnya ada pada seluruh program, terlepas dari lokasi fisik, metode penyampaian konten, dan karakteristik lain yang spesifik pada program pelatihan individual.

Pada level pendidik konselor perlu mempertimbangkan sejumlah faktor yang terkait dengan kurikulum (Wood et al., 2016). Pada struktur permukaan, pedagogi khas berkaitan dengan konten yang diberikan (misalnya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai gelar, pertimbangan biaya), sedangkan level dalam (*deeper structure*) berkaitan dengan aspek-aspek *fundasional* kurikulum penyiapan konselor (misalnya, standar akreditasi dan persyaratan lisensi; dokumen dan standar kompetensi; tingkat penguasaan materi oleh mahasiswa, hasil pembelajaran, dan keberhasilan praktik lapangan). Kajian terhadap fokus-fokus yang ada pada struktur permukaan dan struktur dalam serta mengidentifikasi fokus-fokus yang harus ada pada seluruh program pelatihan (*ubiquitous*) tanpa memperhatikan perbedaan wilayah, perbedaan status akreditasi, dan perbedaan metode penyampaian (daring, luring atau gabungan) dapat mengarahkan upaya identifikasi potensi pedagogi khas yang sesuai.

Misalnya, mengingat bahwa beberapa program penyiapan konselor diakreditasi berdasarkan standar LAMDIK, ketika *assessor* memeriksa kemungkinan pedagogi khas dalam pendidikan konselor, tentu saja mereka mengharapkan program itu benar-benar merupakan program yang dilaksanakan secara utuh tanpa memandang status

kredit akreditasi sebelumnya. Dengan demikian, fokus pedagogi khas tidak lagi hanya mengikuti standar yang diartikulasikan oleh *assessor* eksternal tetapi juga yang utama adalah hasil asesmen internal prodi yang di dalamnya meliputi elemen-elemen pedagogi yang menjadi ciri khas. Pedagogi khas yang teridentifikasi itu harus dinyatakan melalui kurikulum pada semua level program. pedagogi khas itu akan melandasi jawaban atas pertanyaan: Apa pelatihan profesional yang perlu dilakukan bagi peserta tingkat sarjana, Pendidikan profesi, magister dan doktor? Bagaimana agar mahasiswa mampu berpikir sebagai praktisi profesional yang efektif abad ini? Bagaimana kita mempersiapkan mahasiswa supaya mereka bertindak dalam peran-peran sebagai konselor, sebagai pendidik konselor dan sebagai peneliti yang diharapkan? Beberapa pertanyaan itu terasa preskriptif dalam beberapa hal, namun sengaja diajukan untuk merangsang kembali pengembangan pedagogi khas melalui berbagai penelitian yang diperlukan.

Singkatnya, pedagogi khas adalah kendaraan pembelajaran khas yang menyebar digunakan oleh pendidik konselor pada seluruh program untuk memengaruhi hasil yang diinginkan bagi para mahasiswa bimbingan dan konseling. Saat melihat secara spesifik pada kurikulum pelatihan profesional konselor, hasil yang diinginkan ini pada dasarnya adalah nilai-nilai yang kita harapkan konsisten di dalam dan di seluruh trek program (S1, pendidikan profesi, S2 dan S3). Meskipun mungkin ada fokus yang pada beberapa aspek lain (misalnya, pelatihan tingkat pemula kemungkinan akan lebih fokus pada pekerjaan praktisi, sementara pelatihan tingkat magister dan doktor lebih menambahkan konsep terkait dengan pembelajaran, supervisi klinis dan penelitian ekologi pendidikan dan kearifan lokal sebagai produksi

pengetahuan baru), nilai-nilai yang menggerakkan kurikulum harus konsisten, meskipun diterapkan pada berbagai aspek persyaratan kerja bagi mereka yang memiliki pelatihan level profesi, master dan level doktoral. Dan sebaliknya, nilai-nilai yang melekat dalam kurikulum harus mencerminkan pandangan profesi tentang bagaimana praktisi konseling harus berpikir, bertindak, dan mempromosikan profesi, yang esensinya melekat dalam definisi pedagogi khas.

## **PENUTUP**

Supervisi klinis sebagai pedagogi khas memiliki peran yang amat sentral dalam keseluruhan pendidikan untuk menyiapkan praktisi profesional yang efektif dalam bimbingan dan konseling abad 21. Pemahaman tentang supervisi klinis dapat menyediakan suatu kerangka kerja dan dorongan ke arah mana dan bagaimana para pendidik konselor menanamkan kebiasaan berpikir, bertindak dan bertanggung jawab sebagai praktisi profesional dalam bidang bimbingan dan konseling. Jika kita sebagai pendidik konselor sadar bahwa kita memiliki pedagogi khas, maka kita dapat membenamkan diri kita di dalamnya, memungkinkan pendidik untuk peka dalam memonitor, mengevaluasi dan mengembangkan profesi dan kinerja diri sendiri. Implikasinya kita sebagai pendidik perlu terus menerus mengembangkan pedagogi khas terbaik untuk menghasilkan praktisi profesional yang efektif dalam bimbingan dan konseling abad 21 ini.

## **REFERENSI**

ACES Teaching Initiative Taskforce best practices in teaching in counselor education report. <https://acesonline.net/wp-content/uploads/2018/11/ACESTeaching-Initiative-Taskforce-Final-Report-2016.pdf>.



- Baltrinic, E. R., Barrio Minton, C., & Wood, S. (2016). Doctoral level teaching preparation for counselor educators. In ACES Teaching Initiative Taskforce best practices in teaching in counselor education report 2016 (pp. 30–37). <http://www.acesonline.net/resources/aces-teaching-initiativetaskforce-report-october-2016>
- Baltrinic, E. R., & Wachter Morris, C. (2020). Signature pedagogies: A framework for pedagogical foundations in counselor education. *Teaching and Supervision in Counseling*, 2(2), 1–11.
- Barrio Minton, C. A., Wachter Morris, C. A., & Bruner, S. L. (2018). Pedagogy in counselor education: 2011–2015 update. *Counselor Education & Supervision*, 57, 227–236. <https://doi.org/10.1002/ceas.12112>.
- Barrio Minton, C. A., Wachter-Morris, C. A., & Yaites, L. D. (2014). Pedagogy in counselor education: A 10-year content analysis of journals. *Counselor Education & Supervision*, 53, 162–177. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6978.2014.00055.x>.
- Bartell, D. S., & Vespia, K. M. (2009). Teaching and learning in the “interdisciplinary discipline” of human development. In R. Dosenng, N. L. Chick, & A. Haynie (Eds.), *Exploring signature pedagogies: Approaches to teaching disciplinary habits of mind* (pp. 139–160). Stylus.
- Borders, L. D., Bernard, J. M., Dye, H. A., Fong, M. L., Henderson, P., & Nance, D. W. (1991). Curriculum guide for training counseling supervisors: Rationale, development, and implementation. *Counselor Education and Supervision*, 31, 58-80. Doi: 10.1002/j.15566978.1991.tb00371.x.
- Borders, L. D., Glossoff, H. L., Welfare, L. E., Hays, D. G., DeKruyf, L., Fernando, D. M., & Page, B. (2014). Best practices in clinical supervision: Evolution of a counseling specialty. *The Clinical Supervisor*, 33, 26-44.

- Boyd, J (Ed). (1978), *Counselor Supervision: Approaches Preparation, Practices*, Boston: University Press.
- Brackette, C. M. (2014). The scholarship of teaching and learning in clinical mental health counseling. *New Directions for Teaching and Learning*, 139, 37–48. <https://doi.org/10.1002/tl.20103>.
- Brubaker, M. D., Puig, A., Reese, R. F., & Young, J. (2010). Integrating social justice into counseling theories pedagogy: A case example. *Counselor Education & Supervision*, 50, 88–102.
- Chick, N. L., Haynie, A., & Dosenng, R. A. (2009). From generic to signature pedagogies: Teaching disciplinary understandings. In Baltrinic & Wachter Morris *Teaching and Supervision in Counseling* (2020) Volume 2 (2) 11 R. Dosenng, N. L. Chick, & A Haynie (Eds.), *Exploring signature pedagogies: Approaches to teaching disciplinary habits of mind* (pp. 1–18). Stylus.
- Ciccone, A. (2009). Forward. In R. Dosenng, N. L. Chick, & A. Haynie (Eds.), *Exploring signature pedagogies: Approaches to teaching disciplinary habits of mind* (pp. xi–xvi). Stylus.
- Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs. (2015). 2016 CACREP standards. <http://www.cacrep.org/wp-content/uploads/2017/08/2016-Standards-with-citations.pdf>
- Council on Social Work Education. (2015). Education policy and accreditation standards. <https://www.cswe.org/getattachment/Accreditation/Standards-and-Policies/2015-EPAS/2015EPASandGlossary.pdf.aspx>.
- Dollarhide, C. T., Smith, A. T., & Lemberger, M. E. (2007). Counseling made transparent: Pedagogy for a counseling theories course. *Counselor Education & Supervision*, 46, 242–253.
- Fong, M. L. (1998). Considerations of a counseling pedagogy. *Counselor Education & Supervision*, 38, 106–112.

- Goodyear, R. K. (2007, June). Toward an effective signature pedagogy for psychology: Comments supporting a case for competent supervisors. *Professional Psychology Research and Practice*, 273–274. <https://doi.org/10.1037/0735-7028.38.3.268>.
- Goodyear, R. K., Bunch, K., & Claiborn, C. D. (2005). Current supervision scholarship in psychology. *The Clinical Supervisor*, 24(1–2), 137–147. [https://doi.org/10.1300/J001v24n01\\_07](https://doi.org/10.1300/J001v24n01_07)
- Haag Granello, D., & Hazler, R. J. (1998). A developmental rationale for curriculum order and teaching styles in counselor education programs. *Counselor Education & Supervision*, 38, 89–105.
- Haskins, N. H., & Singh, A. (2015). Critical race theory and counselor education pedagogy: Creating equitable training. *Counselor Education and Supervision*, 54, 288–301. <https://doi.org/10.1002/ceas.12027>
- Holden, G., Barker, K., Rosenberg, G., Kuppens, S., & Ferrell, L. W. (2011). The signature pedagogy of social work: An investigation of the evidence. *Research on Social Work Practice*, 21(3), 363–372. <https://doi.org/10.1177/1049731510392061>
- Knowles, M. S. (1980). *The modern practice of adult education: From pedagogy to andragogy*. Prentice Hall/Cambridge.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.
- Korcuska, J. S. (2016). In the spirit of what might be lost: Troubling the boundaries of good fit. *Counselor Education & Supervision*, 55(3), 154–158. <https://doi.org/10.1002/ceas.12042>
- McAuliffe, G., & Erikson, K. (2002). *Teaching strategies for constructivist and developmental counselor education*. Bergin & Garvey.
- Moate, R. M., & Cox, J. A. (2015). *Learner-centered pedagogy: Considerations for application in a didactic course*.

- The Professional Counselor, 5(3), 379–389.  
<https://doi.org/10.15241/rmm.5.3.379>
- Nelson, M. L., & Neufeldt, S. A. (1998). The pedagogy of counseling: A critical examination. *Counselor Education & Supervision*, 38, 70–88.  
<https://doi.org/10.1002/j.1556-6978.1998.tb00560.x>
- Sexton, T. L. (1998). Reconstructing counselor education: Issues of our pedagogical foundation. *Counselor Education & Supervision*, 38, 66–69.
- Shulman, L. S. (2005a, Summer). Signature pedagogies in the professions. *Daedalus*, 134(3), 52–59.
- Shulman, L. S. (2005b). Signature pedagogies in the professions. *Daedalus*, 134, 52–59.
- Shulman, L. S. (2005c, February). The signature pedagogies of the professions of law, medicine, engineering, and the clergy: Potential lessons for the education of teachers. Math Science Partnerships Workshop, Irvine, CA.  
[https://taylorprograms.com/wp-content/uploads/2018/11/Shulman\\_Signature\\_Pedagogies.pdf](https://taylorprograms.com/wp-content/uploads/2018/11/Shulman_Signature_Pedagogies.pdf)
- Taufiq, T. (2021). *Supervisi Klinis dalam Bimbingan dan Konseling*. Bandung: UPI Press
- Taufiq, T. (2021). *Model-Model Supervisi Klinis*. Bandung: UPI Press
- Taufiq, A. (2009). *Model supervisi komprehensif untuk meningkatkan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling*, Laporan Penelitian: Bandung: LPPM UPI



A blue folder with a pen and glasses resting on a financial statement document. The document is titled 'Consolidated financial statements' and contains a table with columns for '31 March 2013 (Unaudited)', '31 December 2012', and '31 December 2012'. The table lists various financial figures in thousands of dollars.

# KOMPETENSI KOLABORASI KONSELOR SEKOLAH

Note	31 March 2013 (Unaudited)	31 December 2012	31 March 2013 (Audited)	31 December 2012
	6,165,607	340,966	4,115,631	4,709,777
4.3	74,466	74,466	6,331	7,137,603
4	746	8,461,934	10,009,096	8,457,290
11	1,699,345	4,854,693	1,608,748	906,523
	2,653,164	2,796,035	-	3,069,139
	5,265,928	8,248,843	55,063	-
	14,863,345	-	14,863,345	58,428
4	183,379	-	74,861	-
	55,126,353	48,399,339	48,399,339	29,264,851
			27,956	11,277
			809,941	509,536
			55,578	50,672
			62,882,725	-
	77,665,879	57,426,846	116,172,869	4,992,500



# KOMPETENSI KOLABORASI KONSELOR SEKOLAH

Awalya Awalya<sup>1</sup>, Layyinatus Syifa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Bimbingan dan Konseling, FIP, Universitas Negeri  
Semarang

<sup>2</sup>SMK Negeru 1 Gantar, Indramayu

## Abstrak

Kompetensi kolaborasi merupakan landasan utama yang harus dimiliki oleh guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah untuk mewujudkan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan layanan bimbingan konseling kepada peserta didik. *Era society* 5.0 baik secara teknologi maupun ideologi menjadi langkah awal yang dapat dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah dalam bermitra dengan pihak-pihak yang mendukung kegiatan bimbingan dan konseling. Secara spesifik bab ini membahas kolaborasi, kompetensi kolaborasi, model-model kolaborasi, pihak-pihak yang menjadi mitra, kolaborasi guru bimbingan dan konselor di sekolah. Tulisan ini menawarkan pentingnya kolaborasi guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah yang mengedepankan kompetensi konselor sekolah dalam bermitra dengan para pihak tanpa sekat dengan pihak lain.

**Kata Kunci:** kompetensi kolaborasi konselor di sekolah

## PENDAHULUAN

Kolaborasi antara guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah dengan *stakeholder* sekolah seperti, pihak profesional lain, orang tua dan juga masyarakat merupakan titik berat *era* bimbingan dan konseling perkembangan yang berfungsi untuk mengembangkan kompetensi dan potensi peserta didik. Kompetensi kolaborasi



konselor merupakan landasan utama yang harus dimiliki oleh konselor sekolah untuk mewujudkan serta meningkatkan efektivitas dari layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada peserta didik. Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Atas, menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan layanan bimbingan konseling dapat dicapai oleh guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti guru bidang studi, wali kelas, komite sekolah, orang tua, dan pihak-pihak profesi lain yang relevan (Farozin, 2016).

Permendiknas No. 27 Tahun 2008 termaktub bahwa salah satu standar kualifikasi akademik dan profesional konselor dalam aspek kompetensi sosial yakni menguasai kemampuan komunikasi inter dan antar profesi dan kolaborasi profesional inter dan antar profesi. Maka dari itu secara sistematis para konselor sekolah harus memulai hubungan kolega dengan beragam ahli pendidikan dan medis yang menyediakan layanan tambahan bagi peserta didik di sekolah. Pembentukan kolaborasi yang baik, memerlukan pemahaman yang jelas mengenai layanan yang diperlukan, serta pengetahuan mengenai tipe-tipe layanan yang ditawarkan di masyarakat.

Profesional lain pada waktu yang bersamaan, yang di masyarakat, departemen kesehatan, pusat-pusat keluarga, dan organisasi lain perlu mengetahui peran guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah. Pemahaman timbal balik mengenai peran dan fungsi profesi masing-masing, maka guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah dan para praktisi lain dapat mengembangkan hubungan yang menguntungkan dengan para siswa, guru, dan keluarga seperti halnya hubungan kolaboratif. Menjadi pertanyaan yang menggelitik

bagaimana tingkat kompetensi kolaborasi guru bimbingan dan konseling yang diperlukan saat ini.

## **KOMPETENSI KOLABORASI PADA KONSELOR SEKOLAH**

### **1. Kolaborasi**

Kata kolaborasi sering muncul dalam kegiatan sehari-hari, pada bahasan ini kata kolaborasi bermakna aktivitas yang dilakukan oleh konselor sekolah untuk membangun interaksi, berkomunikasi aktif, dan mengajukan ide-ide yang berguna untuk kelancaran program layanan bimbingan dan konseling. Membangun hubungan kolaborasi dibutuhkan usaha dan keterlibatan aktif. (Lusky & Hayes, 2001) Lebih lanjut mungkin konselor akan mengalami kesulitan karena, konselor harus memberikan pemahaman dan menjelaskan rancangan program pembaruan rancangan bimbingan dan konseling di sekolah.

Kolaborasi dalam bimbingan dan konseling adalah suatu proses intervensi antara konselor dengan kepala sekolah, guru serta orang tua siswa dalam rangka mensosialisasikan program layanan yang akan dilakukan (Sari et al., 2019). Layanan bimbingan dan konseling dapat tercapai jika terjadi kolaborasi antara konselor dan pihak—pihak yang menjadi mitra (Surakhmad, 2009). *American School Counselor Association* (ASCA) menegaskan bahwa kolaborasi antara konselor dan para pemangku kepentingan pendidikan merupakan cara untuk mempromosikan program kesehatan mental (Lambie et al., 2019). Lebih lanjut keterlibatan para pemangku kebijakan sangat dibutuhkan untuk mendukung program kesehatan mental di sekolah. Kolaborasi konselor dan pihak yang berkepentingan juga mengadvokasi semua kebutuhan akademik, karier, dan pribadi dan sosial siswa

(Brown, 2019). Kolaborasi yang optimal dapat menciptakan budaya sekolah yang mendorong keberhasilan siswa, perubahan sistemik, advokasi, dan memperkuat misi program konseling sekolah (Doğan & Julian, 2019). Lebih lanjut hubungan kolaborasi antara konselor dan pihak pemangku kebijakan memberikan efek yang positif terhadap semua pihak terutama sistem di sekolah.

Penyelenggaraan layanan bimbingan konseling (Jonathan, 2014) mendefinisikan kolaborasi sebagai proses interaksi antara konselor dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap program layanan bimbingan dan konseling. Berdasarkan kamus *Heritage* Amerika (2009), kolaborasi didefinisikan sebagai bentuk penggabungan gagasan dari beberapa orang untuk bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut Gray (1989) menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai proses berpikir untuk menemukan solusi atas masalah yang terjadi secara Bersama-sama sebagai cara mengatasi keterbatasan pikiran.

Permendikbud 111 Tahun 2014, dijelaskan kolaborasi adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam layanan bimbingan dan konseling. Tujuan dari terbentuknya hubungan kolaborasi demi mencapai kepentingan Bersama dan demi optimalnya perkembangan dari peserta didik dari aspek pribadi, sosial, belajar dan karir, yang diperlukan pengetahuan dan ketrampilan untuk konselor dapat membangun hubungan kolaborasi. Dettmer, Dyck & Thurston (Hidayat, 2013) menjelaskan bahwa hubungan kolaboratif dapat dibangun dengan konsep konsultan sekolah kolaboratif (*collaborative school consultant*).

Membangun hubungan kolaborasi lebih lanjut dijelaskan bahwa diperlukan kompetensi in terpersonal, kooperatif dengan semua pihak, dan kemampuan untuk

berkoordinasi dengan semua pihak, (Hidayat, 2013) menjelaskan bahwa sekolah terutama konselor perlu berkolaborasi dengan berbagai profesional untuk mengembangkan layanan yang efektif bagi para siswa. Penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang efektif bahwa konselor harus melakukan hal-hal berikut ini; (1) guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah harus menjalin komunikasi yang efektif dengan pihak lain sehingga ketika terjadi suatu problem yang membutuhkan bantuan dari profesi lain konselor secara efektif dapat segera memberikan layanan; (2) guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah membangun hubungan yang intim dengan siswa untuk dapat memberikan layanan terbaik atas masalah dihadapi siswa; (3) guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah dapat memberikan dan berbagai informasi yang dibutuhkan dari berbagai profesi untuk memberikan layanan terbaik.

Karakteristik kolaborasi dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah meliputi 8 karakteristik yaitu: (1) Partisipasi tidak dibatasi dan tidak hirarkis; (2) Partisipan bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan; (3) Adanya tujuan yang masuk akal; (4) Ada pendefinisian masalah; (5) Partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain; (6) Adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan; (7) Implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat, dan; (8) Partisipan selalu mengetahui perkembangan situasi (Carpenter et al., 1990).

## **2. Kompetensi Kolaborasi**

Kompetensi kolaborasi merupakan aktivitas kerja sama antara guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah berbagai pihak dengan tujuan mencapai suatu program, baik

pihak dari dalam maupun dari luar lembaga pendidikan (Nugraha & Rahman, 2017). Kolaborasi dalam bimbingan dan konseling merupakan proses intervensi antara konselor dengan kepala sekolah, guru serta orang tua dalam rangka mensosialisasikan program layanan bimbingan dan konseling (Awalya dkk. 2020).

Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, dan kejujuran. Kolaborasi didefinisikan sebagai proses interaksi di antara beberapa orang yang berkesinambungan (Jonathan, 2014) . Pendapat lain menggambarkan bahwa kolaborasi sebagai suatu proses berpikir dimana pihak yang terlibat memandang aspek-aspek perbedaan dari suatu masalah serta menemukan solusi dari perbedaan dan keterbatasan pandangan mereka terhadap apa yang dapat dilakukan (Gray, 1989).

Definisi kolaborasi dari beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli disimpulkan bahwa kolaborasi adalah suatu proses interaksi yang kompleks dan beragam yang melibatkan beberapa orang untuk bekerja sama dengan menggabungkan pemikiran secara berkesinambungan dalam menyikapi suatu hal dimana setiap pihak yang terlibat saling ketergantungan di dalamnya. Kolaborasi apa pun bentuk dan tempatnya, meliputi suatu pertukaran pandangan atau ide yang memberikan perspektif kepada seluruh kolaborator.

Beberapa ahli telah menyajikan beberapa bentuk kolaborasi untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Diantara model CASTT, *Collaborative Inclusion Model*, *Collaborative Culturally Competent Schools*, model-model koaborasi akan di jelaskan lebih lanjut pada sub berikut.

### 3. Model Kolaborasi

#### a. Model CASTT

Model kolaborasi CASTT akronim dari *Community, Administrators, Students, Teachers, and Technology* yang dikembangkan oleh (Dahir & Stone, 2012). Bentuk kolaborasi kerja sama yang dilakukan oleh konselor dengan, petugas administrasi, siswa, guru dan ahli teknologi untuk membantu mengoptimalkan potensi peserta didik. Bentuk kolaborasi dengan berbagai ahli lain dapat digambarkan sebagai berikut; (1) Administrator; kolaborasi konselor dengan staf administrator dilakukan untuk penyediaan informasi yang berkenaan dengan data siswa, mensosialisasikan program sekolah dan membantu terciptanya iklim sekolah yang kondusif untuk terciptanya kesuksesan; (2) Guru; kolaborasi konselor dengan guru bertujuan untuk membantu menciptakan kondisi yang nyaman bagi siswa, berbagi informasi, guru dapat mengalih tangan kan kasus, mempromosi program sekolah dan memerlukan aktivitas remedial; (3) Siswa; kolaborasi konselor dengan siswa dilakukan untuk membantu layanan bimbingan teman sebaya seperti *peer helper, peer facilitator, peer mediator, peer tutor* dan *peer supporters*, (Dahir & Stone, 2012); (4) Orang Tua; Orang tua merupakan sponsor utama berkenaan dengan dukungan keuangan untuk melaksanakan program sekolah. Orang tua mendukung program bimbingan dan konseling di sekolah dilakukan dengan, menjadi tutor, mentor, konsultan, berpartisipasi kegiatan sekolah, dan membantu ketercapaian tujuan program sekolah. (5) Profesi Lain. Kolaborasi konselor membangun kolaborasi dengan profesi lain dengan bekerja yang bertujuan untuk kesuksesan akademik dan

mempengaruhi orang tua untuk bisa membantu siswa mencapai kesuksesan akademiknya. (6) Kelompok Masyarakat; Konselor sekolah terhadap kelompok masyarakat dimanfaatkan untuk kesuksesan pelaksanaan program yang berkaitan dengan pendidikan, *housing*, rekreasi dan peningkatan/kemajuan masyarakat. Lingkungan masyarakat di sekitar diharapkan memberikan dukungan kelancaran program sekolah dan modal penting dalam usaha pencapaian perkembangan optimal anak. (7) Perusahaan; konselor sekolah bekerja sama dalam usaha pendidikan dan latihan berkenaan dengan pelatihan karier. Kerja sama dilakukan melalui kegiatan magang, praktikum dan berbagi pengalaman. (8) Alumni; kerja sama antara konselor dan alumni dilakukan untuk memberikan dukungan program sekolah, misalnya berbagi pengalaman mereka dalam berkarier dan pengalaman hidup yang dijalaninya untuk dibagi kepada siswa. Satu diantaranya juga kerja sama dengan musyawarah guru bimbingan dan konseling (MGBK); (9) Perguruan Tinggi. Konselor bekerja sama perguruan tinggi, untuk mendapatkan informasi pendidikan faktual dan program studi yang bertujuan untuk penyediaan pendidikan dan latihan baik bagi siswa maupun bagi peningkatan kompetensi konselor.

b. *Collaborative Inclusion Model*

Model kolaborasi *Collaborative Inclusion Model* diciptakan oleh (Clark dan Bremen, 2009). Model ini merekomendasikan enam langkah inklusif kolaborasi antara konselor sekolah dan guru untuk menyusun program perencanaan, pengaplikasian dan program evaluasi. Enam langkah yang direkomendasikan yaitu; (1) Konseli berkolaborasi dengan guru, administrator, orang tua atau atas inisiatif sendiri oleh siswa yang bersangkutan untuk

mendapatkan layanan oleh konselor; (2) Identifikasi masalah dengan program menggali informasi, dengan berbagai pihak seperti guru, orang tua dan administrator; (3) Merencanakan intervensi dalam kelas untuk mencari jawaban atas tujuan yang akan dicapai secara bersama; (4) Melaksanakan intervensi dan memodifikasinya sebagai kebutuhan. Langkah ini juga termasuk di dalamnya infusi melalui tutor/mentor sebaya untuk memberikan dukungan kepada siswa yang berkelanjutan; (5) Mengembangkan sebuah rencana untuk membiarkan guru dan siswa untuk menindaklanjuti kegiatan setelah konselor menyelesaikan intervensi dalam ruang kelas. Pada tahap ini termasuk di dalamnya adalah memberikan penguatan, sistem umpan balik dan diikuti dengan panduan-panduan yang memungkinkan. (6) Evaluasi dan monitor intervensi, adalah konselor dapat melakukan pengawasan kepada guru dan siswa secara periodik atau observasi terhadap pelaksanaan intervensi dalam ruang kelas

c. *Collaborative Culturally Competent Schools*

Model kolaborasi *Collaborative Culturally Competent Schools*, model ini dikembangkan oleh Simcox, Nuijens dan Lee (2006) Model ini mengedepankan hubungan kerja sama antara konselor dan psikolog untuk penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi. Konselor membangun kolaborasi dengan profesi lain dengan bekerja yang bertujuan untuk kesuksesan akademik dan mempengaruhi orang tua untuk bisa membantu siswa mencapai kesuksesan akademiknya. Diantaranya; (1) Kelompok Masyarakat: Kelompok dimanfaatkan untuk kesuksesan pelaksanaan program yang berkaitan dengan pendidikan, *housing*, rekreasi dan peningkatan/kemajuan masyarakat. Lingkungan masyarakat di sekitar diharapkan memberikan dukungan kelancaran program sekolah dan modal penting dalam usaha pencapaian perkembangan



optimal anak. (2) Perusahaan, konselor bekerja sama dalam usaha pendidikan dan latihan berkenaan dengan pelatihan karier. Selain itu perusahaan dapat diminta pertolongan untuk mendukung program—program (sponsor) kegiatan sekolah. Misalnya penyediaan seragam sekolah, penyediaan buku dan peralatan sekolah. (3) Perguruan Tinggi, konselor bekerja sama dalam terjujuan untuk penyediaan pendidikan dan latihan baik bagi siswa maupun bagi peningkatan kompetensi konselor. kerja sama dilakukan melalui kegiatan magang, praktikum dan berbagi pengalaman. (4) Alumni, kolaborasi antara konselor dan alumni dilakukan untuk memberikan dukungan program sekolah, misalnya berbagi pengalaman mereka dalam berkarier dan pengalaman hidup yang dijalaninya untuk dibagi kepada siswa.

#### **4. Pihak-Pihak Yang Menjadi Mitra**

Guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah, bahwa peserta didik memerlukan sarana yang menunjang keberhasilan pencapaian tugas perkembangan yang dimiliki. Guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah merupakan garda terdepan yang mampu memfasilitasi peserta didik. Namun pada kenyataannya konselor sekolah tidak seorang diri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan upaya kolaborasi yang dibentuk oleh konselor sekolah dengan mitra kerja dari berbagai bidang ilmu yang memiliki potensi untuk perkembangan peserta didik. Dahir & Stone, (2012; 394) menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kesuksesan tergantung pada kemampuan kolaborasi yang dilakukan konselor dengan pihak-pihak lain, dengan tujuan membantu peserta didik. Guru bimbingan dan konseling/konselor profesional yang mampu berkolaborasi dan bekerja secara kelompok (*collaboration & teaming*) dapat

mendukung tercapainya kesuksesan peserta didik dalam berhubungan baik dengan guru, teman, orang tua bahkan dengan masyarakat yang lebih luas.

Karakteristik pelaksanaan kolaborasi dalam konseling, yang diungkapkan oleh Young, A.A., dkk. (2013) antara lain, yaitu: (1) partisipan tidak dibatasi dan tidak hierarkis; (2) partisipan memiliki tanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan layanan; (3) adanya tujuan yang realistis; (4) adanya pendefinisian masalah; (5) partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain; (6) adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai alternatif pilihan; (7) pengimplementasian solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat; (8) partisipan mengetahui perkembangan situasi.

Guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah agar dapat secara efektif diperlukan strategi kolaborasi penyelenggaraan layanan bimbingan konseling memiliki elemen penting yaitu; (1) adanya kerja sama dan sikap saling menghargai pendapat dari mitra kolaborasi dan bersedia secara bersama-sama untuk mengidentifikasi berbagai alternatif pendapat; (2) bersikap asertivitas untuk menjamin bahwa pendapat mitra kolaborasi dan konselor benar-benar didengar serta konsensus untuk dicapai; (3) bertanggung jawab dalam melaksanakan serta mendukung suatu keputusan bersama yang telah diperoleh; (4) menjalin komunikasi antar setiap mitra kolaborasi untuk dapat bertanggung jawab dalam membagi informasi penting mengenai isu yang terkait; (5) membangun kepercayaan pada semua elemen yang berkolaborasi.

Kolaborasi ini menjadi sangat penting karena tanpa rasa percaya, kerja sama tidak akan terjalin, asertivitas menjadi ancaman, menghindar dari tanggung jawab,

terganggunya komunikasi (Clark, M. A., & Breman, J. C., 2009). Arah pelayanan konseling pada saat ini mengikuti paradigma komprehensif dan perkembangan yang berorientasi pada upaya membantu kesuksesan siswa dalam menjalani tugas perkembangan, pengembangan potensi dan mengatasi permasalahan yang dimilikinya (Gysbers & Henderson, 2012). Untuk mencapai tujuan perlu adanya kerja sama dari berbagai komponen pendidikan seperti halnya kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, dan yang lainnya, sehingga tidak perlu dibebankan hanya kepada guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah.

## **5. Kolaborasi Guru Bimbingan dan Konselor di Sekolah**

*Stakeholder* adalah semua pihak, baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung pada komunitas (Wahjosumidjo, 2005). Pendapat lain *stakeholder* merupakan kumpulan sejumlah orang yang saling berkolaborasi dan berinteraksi demi mencapai tujuan bersama. *Stakeholder* menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sebuah lembaga Pendidikan atau sekolah (Jatmiko, 2017).

*Stakeholder* merupakan pihak internal maupun eksternal, seperti guru,, kepala sekolah, pemerintah, masyarakat sekitar, lingkungan sekitar, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sejenisnya, lembaga pemerhati lingkungan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komunitas. *Stakeholder* diterjemahkan ke dalam istilah sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerja sama antar peran, kedudukan dari

satu jabatan administrasi, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh.

Guru BK/konselor sekolah harus mengidentifikasi *stakeholders* untuk membantu. *Stakeholders* yang bisa membantu dalam mengimplementasikan program BK adalah konselor sekolah, guru, administrator, psikolog sekolah, pekerja sosial sekolah, staf administrasi, orang tua, atau anggota masyarakat.

Upaya untuk mencapai tujuan pendidikan, berikut beberapa mitra kerja yang memiliki potensi untuk membantu konselor sekolah dalam pencapaian perkembangan peserta didik dengan upaya kolaborasi. Berikut ini;

a. Kolaborasi dengan Orang tua.

Orang tua merupakan mitra kerja pertama yang mampu memberikan perlindungan dan perkembangan peserta didik, mengingat peserta didik memiliki waktu yang cukup banyak untuk di rumah setelah melakukan kegiatan di sekolah. Orang tua memiliki tanggung jawab akan keseharian peserta didik baik dalam lingkup sosial, pribadi, belajar, dan karier peserta didik.

b. Kolaborasi dengan *Human Resource Development*

Salah satu aspek yang wajib dicapai oleh peserta didik sebagai upaya pemenuhan perkembangan yakni pada bidang karier. Guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah yang mampu menjalin mitra dengan perusahaan, memberikan peluang bagi peserta didik untuk memenuhi kebutuhan karier mereka.

c. Kolaborasi dengan Psikiater

Permasalahan yang dialami peserta didik bisa kompleks, maka tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan peserta didik yang dianggap cukup kompleks, terkadang memberikan dampak buruk bagi kesehatan psikologis peserta

didik. Guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah tidak memiliki kewenangan dan latar belakang pendidikan yang mumpuni dalam hal psikologis peserta didik, yang dapat dilakukan konselor sekolah sehingga berkolaborasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan dan ahli dalam kesehatan mental dalam hal ini Psikiater, untuk dapat menunjang kebutuhan peserta didik dalam baik dalam bidang sosial, maupun pribadi.

Kunci penyelenggaraan layanan bimbingan konseling yang efektivitas antara lain, (1) konselor menghargai pendapat konseli dan bersedia untuk memeriksa beberapa alternatif pendapat dan perubahan kepercayaan; (2) Konselor berperilaku asertivitas untuk mendengarkan pendapat dari konseli; (3) Tanggung jawab mendukung suatu keputusan yang diperoleh dari hasil konsensus dan harus terlibat dalam pelaksanaannya; (4) Komunikasi setiap anggota bertanggung-jawab untuk membagi informasi penting mengenai isu yang terkait. (5) Konsep dengan arti yang sama mutualitas dimana individu mengartikannya sebagai suatu hubungan yang memfasilitasi proses dinamis antara orang-orang yang ditandai oleh keinginan maju untuk mencapai tujuan dan kepuasan setiap anggota. (6) Kepercayaan konsep umum untuk, tanpa rasa percaya, kerja sama tidak akan ada, asertif menjadi ancaman, menghindar dari tanggung jawab terganggunya komunikasi.

## **PENUTUP**

Kompetensi kolaborasi konselor sekolah diperlukan kerja sama dengan *stakeholder* untuk dapat membantu perkembangan peserta didik yang berfungsi untuk mengembangkan kompetensi dan potensi peserta didik. Kompetensi kolaborasi konselor merupakan landasan utama

yang harus dimiliki oleh konselor sekolah untuk mewujudkan serta meningkatkan efektivitas dari layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada peserta didik.

Panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling sekolah menengah atas, menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan layanan bimbingan konseling dapat dicapai oleh guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain yakni dengan pihak-pihak profesi lain yang relevan.

Kolaborasi menumbuhkan timbal balik peran dan fungsi profesi masing-masing, sehingga guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah dan para praktisi lain dapat mengembangkan hubungan kolaboratif yang menguntungkan kepentingan para peserta didik. Guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah dalam membangun hubungan kolaborasi dengan profesi lain dibutuhkan usaha dan saling adanya keterlibatan aktif. Hubungan pada kolaborasi digambarkan sebagai proses berpikir untuk menemukan solusi atas masalah yang terjadi secara bersama-sama mencari cara mengatasi permasalahan yang harus dipecahkan bersama. Guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah, memberikan dan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh berbagai profesi untuk memberikan layanan terbaik.

Kolaborasi guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah merupakan suatu proses interaksi yang kompleks dan beragam yang melibatkan beberapa orang untuk bekerja sama dengan menggabungkan pemikiran secara berkesinambungan dalam menyikapi suatu hal dimana setiap pihak yang terlibat saling ketergantungan di dalamnya.

Karakteristik pelaksanaan kolaborasi dalam bimbingan dan konseling, diantaranya: partisipasi tidak dibatasi dan tidak hierarkis yang memiliki tanggung jawab pencapaian

kesuksesan layanan, pencapaian tujuan yang realistis, partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain; adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai alternatif pilihan, pengimplementasian solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat dan partisipasi mengetahui perkembangan situasi.

Guru bimbingan dan konseling/konselor sekolah dalam mengembangkan strategi kolaborasi penyelenggaraan layanan bimbingan konseling diperlukan adanya kerja sama dan sikap saling menghargai pendapat dari mitra, bersedia secara bersama-sama untuk mengidentifikasi berbagai alternatif pendapat, bersikap asertivitas untuk menjamin bahwa pendapat mitra kolaborasi benar-benar mencapai konsensus untuk mencapai tujuan, dicapai; bertanggung jawab dalam melaksanakan, mendukung suatu keputusan bersama, menjalin komunikasi antar semua mitra kolaborasi untuk dapat bertanggung jawab dalam membagi informasi penting mengenai isu yang terkait, dan membangun kepercayaan pada semua elemen yang berkolaborasi.

## REFERENSI

- American Heritage Dictionary of the English Language. (2009). USA: Houghton Mifflin Company.
- Awalya, A., Nugraha, Y.P., Syifa, L. Rifani, E. (2020). *Aplikasi Kompetensi Konselor Sekolah*. Semarang. Penerbit Fastindo.
- Brown, A. D. (2019). Identities in organization studies. *Organization Studies*, 40(1), 7–22. <https://doi.org/10.1177/0170840618765014>
- Carpenter, P. A., Just, M. A., & Shell, P. (1990). What one intelligence test measures: A theoretical account of the processing in the Raven progressive matrices test.

- Psychological Review*, 97(3), 404–431.  
<https://doi.org/10.1037/0033-295X.97.3.404>
- Clark, M., & Bremen, J. (2009). School Counselor inclusion: A collaborative model to provide academic and social emotional support in the classroom setting. *Journal of counselling & development* 87 (1), hal 6-1.  
<https://doi.org/10.1002/j.1556-6678.2009.tb00543.x>
- Dahir, A.C 7 C. B. Stone. (2012). *The Transformed School Counselor* (2<sup>nd</sup> ed). Belmont, CA: Brooks/Cole
- Doğan, S., & Julian, D. (2019). Community psychology practice and school-community partnerships through the lens of school counseling profession in Turkey. *Cukurova University Faculty of Education Journal*, 48(2), 1041–1053.  
<https://doi.org/10.14812/cufej.551028>
- Farozin, M., dkk. (2016). *Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling Sekolah Dasar*. Jakarta. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan.
- Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2012). *Developing and Managing your School Guidance and Counseling Program : Fifth Edition*. Alexandria: American Counseling Association.
- Gray, Barbara. (1989). *Collaborating: Finding Common Ground Formultiparty Problems*. San Francisco. CA:Jossey-Bass.
- Hidayat, S. (2013). Pengaruh kerjasama orang tua dan guru terhadap disiplin peserta didik di sekolah menengah pertama (SMP) negeri kecamatan Jagakarsa-Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1).  
<https://www.academia.edu/download/54635391/129-373-2-PB.pdf>
- Jatmiko, D. (2017). Peran stakeholder sekolah dalam mengatasi berbagai macam kekerasan di kalangan siswa. *Jurnal Hasil-hasil penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri*. <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/efektor>
- Jonathan. (2014). *Peran Koordinasi dan Kolaborasi*. Jakarta: PrenadaMedia Grup.



- Lambie, G. W., Stickl Haugen, J., Borland, J. R., & Campbell, L. O. (2019). Who took “counseling” out of the role of professional school counselors in the united states? *Journal of School-Based Counseling Policy and Evaluation*, 1 (3), 51–61. <https://doi.org/10.25774/7kjb-bt85>
- Lusky, M. B., & Hayes, R. L. (2001). Collaborative consultation and program evaluation. *Journal of Counseling and Development*, 79(1), 26–38. <https://doi.org/10.1002/j.15566676.2001.tb01940.x>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- Sari, Y., Cahyaningtyas, A. P., Maharani, M. M., Yustiana, S., & Kusumadewi, R. F. (2019). Meningkatkan kemampuan menyusun soal ipa berorientasi hots bagi guru sekolah dasar gugus pandanaran dabin IV UPTD Semarang Tengah. *Indonesian Journal of Community Services*, 1(2), 175. <https://doi.org/10.30659/ijocs.1.2.175-183>
- Simcox, A., Nuijens, K., & Lee, C. (2006). School Counselors and school psychologists: collaborative partners in promoting culturally competent schools. *Professional School Counseling*, 9(4), 272–277. <https://doi.org/10.5330/prsc.9.4.u8x6jh4gk6h77858>
- Surakhmad, W. (2009). *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*. Kompas: Jakarta
- Wahjosumidjo. (2005). *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoretik dan Permasalahannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Young, A.A., dkk. (2013). *Enhancing School Counselor Instructional Leadership Through Collaborative Teaming: Implications for Principals*. NASSP Buletin, XX (X).



**AKUNTABILITAS GURU  
BIMBINGAN DAN KONSELING**

Consolidated financial statements		financial statements	
31 March 2013	31 December 2012	31 March 2013	31 December 2012
Note	(Unaudited)	(in thousands)	(audited)
4.1	6,165,607	340,966	4,115,200
4	1,074,466	725,000	6,331,000
11	1,746,000	8,461,900	10,000,000
		4,854,693	1,608,748
		1,699,345	-
		2,796,035	55,063
		524,843	140,345
4	14,863,343	-	74,000
	183,379	-	-
	55,126,353	48,399,333	29,264,851
11	12,648,908	11,887,812	27,956
	1,248,298	1,222,767	11,875,000
	1,010,863	509,536	809,941
			509,536
			55,578
			10,672
		14,883,000	62,883,725



# AKUNTABILITAS GURU BIMBINGAN DAN KONSELING

**Eko Nusantoro, Firdian Setiya Arinata**

Jurusan Bimbingan dan Konseling, FIP-Universitas Negeri  
Semarang

## **Abstrak**

Akuntabilitas Bimbingan dan Konseling merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Bimbingan dan Konseling dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Bimbingan dan Konseling harus dilaporkan kepada pemberi wewenang tugas atau amanah tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, manajemen, kekurangan, dan administratif dalam jangka waktu tertentu. Akuntabilitas dalam Bimbingan dan Konseling adalah kewajiban guru Bimbingan dan Konseling untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Secara spesifik, bab ini membahas konsep akuntabilitas, bentuk akuntabilitas, faktor pendukung akuntabilitas, faktor pendukung akuntabilitas, dan *stakeholder's* guru BK. Tulisan ini menampilkan pentingnya akuntabilitas guru Bimbingan dan Konseling untuk keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan.

**Kata Kunci** : akuntabilitas, bimbingan dan konseling, guru.

## **PENDAHULUAN**

Akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting menjadi perhatian guru Bimbingan dan Konseling (BK). Sebelum melaksanakan berbagai kegiatan layanan, guru BK harus memahami unjuk kerja dan hal-hal yang akan dipertanggungjawabkan, sesuai dengan standar POP BK.

Dengan demikian diharapkan keberadaan Bimbingan dan Konseling mendapat kepercayaan dari stakeholders.

Guru BK sangat perlu menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Program yang efektif dan sistematis memerlukan suatu kondisi tertentu untuk dipertanggungjawabkan, sedangkan kondisi untuk dipertanggungjawabkan memerlukan standar sebagai ukuran keberhasilan atau prestasi yang dicapai oleh Guru BK.

Secara khusus akuntabilitas bimbingan dan konseling merujuk pada pengungkapan informasi program Bimbingan dan Konseling di sekolah dan hasil-hasil evaluasi yang dicapai dengan *stakeholders* (Schellenberg, 2008). Pemahaman ini senada dengan pendapat Cobia & Henderson (2007) yang menjelaskan bahwa tuntutan terhadap akuntabilitas dapat dilihat dalam program-program konseling yang berbasis data maupun berbasis hasil.

## **AKUNTABILITAS GURU BIMBINGAN DAN KONSELING**

### **1. Konsep Akuntabilitas**

Akuntabilitas dimaksudkan sebagai pendokumentasian efektivitas melalui pengukuran hasil dari kegiatan profesional, pada umumnya meliputi beberapa kegiatan, yaitu: (1) identifikasi kebutuhan; (2) merumuskan tujuan berdasarkan kebutuhan; (3) melaksanakan program untuk memenuhi kebutuhan; (d) mengukur hasil program; (e) menggunakan hasil pengukuran untuk memodifikasi dan memperbaiki program dan; (f) menyampaikan hasil pada orang tua atau wali, kepala sekolah, guru, komite sekolah dan sejawat (Isaacs, 2003, Myrick, 2003).

Menurut Astramovich dan Coker (2007), akuntabilitas mempersyaratkan adanya evaluasi program karena melalui evaluasi program konselor dapat melakukan

perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih baik serta memperbaiki praktik Bimbingan dan Konseling. Akuntabilitas adalah cara dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak lain di sekolah serta masyarakat tentang efektivitas pelayanan BK.

Akuntabilitas memerlukan kegiatan sistemik dalam pengumpulan, analisis serta penggunaan data yang merupakan elemen penting dalam memahami perkembangan potensi konseli serta dalam merancang strategi untuk mengetahui efektivitas pelayanan dan mendokumentasikan tentang kontribusi program BK dalam mendukung keberhasilan siswa (Dahir & Stone, 2003).

Kata akuntabilitas lebih tepat diartikan pertanggungjawaban. A. Muri Yusuf dalam Amirah Diniaty (2012) menjelaskan, akuntabilitas tidak sama dengan *responsibilitas*. Akuntabilitas lebih mengacu kepada pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pencapaian misi organisasi, sedangkan *responsibilitas* berhubungan dengan kewajiban melaksanakan wewenang atau amanah yang diterima. Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang atau amanah itu. Kaitan akuntabilitas dengan profesi konselor dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling adalah seorang konselor berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi bimbingan konseling dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas bimbingan konseling harus disampaikan dihadapkan pemberi wewenang tugas atau amanah dan menampilkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program manajemen, keuangan, administratif dalam kurun waktu tertentu. Istilah akuntabilitas

banyak digunakan karena meningkatnya tuntutan agar sekolah dan lembaga lainnya diminta bertanggung jawab penuh atas tindakan-tindakan yang dilakukan. Kaitan akuntabilitas dengan profesi konselor dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling adalah seorang konselor berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi bimbingan konseling dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik (Diniaty: 2012).

## **2. Bentuk Akuntabilitas**

Diniaty (2012) mengemukakan ada beberapa bentuk akuntabilitas dalam bimbingan konseling antara lain adalah akuntabilitas program dan akuntabilitas manajemen.

- a. Akuntabilitas program mengacu pada pertanggungjawaban hasil dari kegiatan-kegiatan bimbingan konseling yang telah dilaksanakan. Hal ini akan bersinggungan kuat dengan rencana program yang disusun sebelumnya dan juga akan menampilkan akuntabilitas proses yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kegiatan.
- b. Akuntabilitas manajemen, akuntabilitas ini menampilkan peranan manajer bukan hanya dalam menerapkan peraturan yang ada, tetapi juga untuk menerapkan proses berkelanjutan, sehingga memungkinkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

Akuntabilitas dapat dilihat dari sisi dalam organisasi dan diluar organisasi yang dikenal dengan akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal.<sup>13</sup>

- a. Akuntabilitas internal, artinya pada setiap tingkatan

atau hierarki, setiap petugas bertanggungjawab kepada mereka yang mengawasi dan mengendalikan pekerjaan. Di sekolah, guru pembimbing atau konselor sekolah mempertanggungjawabkan kerjanya kepada sekolah.

- b. Akuntabilitas eksternal, pertanggungjawaban disampaikan kepada unit yang relevan diluar organisasinya. Misalnya pertanggung- jawaban kerjanya kepada masyarakat pemakai jasa layanan konseling.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami jenis akuntabilitas dan bentuknya dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling.

### **3. Kriteria Akuntabilitas**

Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Agar sistem akuntabilitas bimbingan membawa hasil yang dikehendaki ada tujuh kriteria yang harus dipenuhi (Krumboltz, dalam Gibson & Mitchell 1981) dalam Eryzal Novrialdy. Hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka untuk menentukan domain tanggung jawab konselor, tujuan umum konseling harus disetujui oleh semua pihak.
- b. Prestasi konselor harus dinyatakan dalam hal penting yaitu perubahan perilaku yang diamati dan dirasakan oleh klien.
- c. Kegiatan konselor harus dinyatakan sebagai biaya, bukan prestasi.
- d. Sistem akuntabilitas harus dibangun untuk mempromosikan pelayanan yang efektif profesional dan pengembangan diri, bukan untuk melemparkan dan menyalahkan atau menghukum kinerja yang buruk.



- e. Dalam rangka mempromosikan pelaporan yang akurat, laporan kegagalan dan hasil yang tidak diketahui harus diizinkan dan tidak pernah dihukum.
- f. Semua pengguna dari sistem akuntabilitas harus terwakili dalam perancangan.
- g. Sistem akuntabilitas itu sendiri harus dilakukan evaluasi dan modifikasi.

#### **4. Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas**

Menurut Diniaty (2021) akuntabilitas atau pertanggungjawaban sering kali gagal atau tidak berjalan, hal ini dipengaruhi oleh:

- a. Rendahnya kesadaran tentang akuntabilitas
- b. Kurangnya kemauan untuk menerapkan akuntabilitas
- c. Penurunan nilai-nilai moral
- d. Faktor-faktor budaya misalnya budaya malas atau tidak disiplin
- e. Rendahnya kualitas petugas atau pejabat
- f. Krisis lingkungan
- g. Kelemahan hukum tentang akuntabilitas
- h. Usangnya teknologi
- i. Rendahnya standar hidup masyarakat

Berdasarkan faktor penghambat di atas, akuntabilitas dalam bimbingan konseling akan dapat diimplementasikan dengan baik jika faktor-faktor penghambat tersebut diminimalkan. Kerja sama sebagai pihak terutama pimpinan perlu digalakkan dalam hal ini.

#### **5. Faktor Pendukung Akuntabilitas**

- a. Kepemimpinan yang memberi teladan
- b. Mendiskusikan program-program yang akan dilaksanakan dengan benar dan tuntas, sehingga dan

dapat ditentukan dengan jelas apa tujuan yang akan dicapai dan apa pula indikator kerjanya

- c. Rumuskan standar kinerja yang jelas.
- d. Komunikasikan kepada semua pihak, tujuan dan makna akuntabilitas (Ibid : 93)

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik pimpinan organisasi pada masa yang akan datang (Kajian Pustaka, 2016).

## **6. Guru Bimbingan dan Konseling**

Guru bimbingan konseling seiring dengan berjalannya waktu disebut dengan konselor sekolah. Menurut Salahudin (2016), Guru bimbingan konseling adalah orang yang secara khusus dididik untuk menjadi konselor. Anas melanjutkan bahwa guru bimbingan konseling juga merupakan tenaga khusus untuk mengerjakan pekerjaan bimbingan, tanpa menjabat pekerjaan lain.

Bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar dan bimbingan karier, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku. Riswani, *Konsep dasar Bimbingan dan Konseling*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008).

## **7. Tugas Pokok Guru Bimbingan dan Konseling**

Sebagai pejabat fungsional guru pembimbing atau konselor dituntut melaksanakan berbagai tugas pokok fungsionalnya secara profesional adapun tugas pokok guru

bimbingan dan konseling menurut SK Menpan No. 84/1993 ada lima yaitu: Suhertina, *Penyusunan Program Bimbingan & Konseling di Sekolah* ( Pekanbaru: CV. Mutiara Persisir Sumatra, 2015)

a. Menyusun Program Bimbingan dan Konseling

Ada beberapa macam program kegiatan yang perlu disusun oleh guru bimbingan dan konseling, menurut Prayitno dalam Suhertina mengemukakan lima program kegiatan bimbingan dan konseling yang perlu disusun, yaitu:

- 1) Program tahunan yaitu program bimbingan konseling meliputi kegiatan selama satu tahun untuk masing-masing kelas sekolah.
- 2) Program semesteran yaitu program bimbingan konseling meliputi kegiatan selama satu semester yang merupakan gambaran program tahunan.
- 3) Program bulanan yaitu program bimbingan konseling meliputi kegiatan selama satu bulan yang merupakan gambaran program semesteran.
- 4) Program mingguan yaitu program bimbingan konseling meliputi kegiatan selama satu minggu yang merupakan gambaran program bulanan.
- 5) Program harian yaitu bimbingan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Program harian merupakan gambaran dari program mingguan dalam bentuk layanan (Satlan) dan atau kegiatan pendukung (Satkung) bimbingan konseling.

Guru pembimbing pertama-tama dan paling utama dituntut untuk mampu menyusun satlan dan satkung serta mampu menyelenggarakan program yang tertuang dalam satlan dan satkung itu.

b. Melaksanakan Program Bimbingan dan Konseling

Pelaksanaan kegiatan layanan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dipersiapkan pada bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, karier, kehidupan keragaman dan kehidupan berkeluarga. Dilaksanakan melalui 9 (Sembilan) jenis layanan yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan/ penyaluran, layanan konten, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan mediasi dan layanan konsultasi. Suhertina (2015).

c. Mengevaluasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling

Evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi (data) untuk mengetahui efektivitas (keterlaksanaan dan ketercapaian) kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan. Anas Salahudin (2016). Evaluasi pelaksanaan bimbingan konseling merupakan kegiatan menilai keberhasilan layanan dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karier, bimbingan kehidupan beragama dan bimbingan kehidupan berkeluarga. Kegiatan mengevaluasi itu meliputi juga kegiatan menilai keberhasilan jenis-jenis layanan yang dilaksanakan. Evaluasi pelaksanaan bimbingan konseling dilakukan pada setiap selesai layanan diberikan baik pada jenis layanan maupun kegiatan pendukung. Suhertina (2015).

- 1) Evaluasi/penilaian hasil layanan BK dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:
  - a) Penilaian segera (laiseg).
  - b) Penilaian jangka pendek (lajipen).
  - c) Penilaian jangka panjang (lajipan).
- 2) Pelaksanaan penilaian

Menurut Prayitno dalam Suhertina penilaian BK dapat dilakukan dalam format individu atau kelompok/klasikal dengan lisan atau tulisan.

d. Menganalisis Hasil Evaluasi Pelayanan Bimbingan dan Konseling

Hasil evaluasi (tahap tiga) perlu dianalisis untuk mengetahui seluk beluk kemajuan dan perkembangan yang diperoleh siswa melalui program satuan layanan. Menurut Prayitno dalam Suhertina analisis difokuskan setidaknya pada dua pokok (Suhertina. 2015)

- 1) Status perolehan siswa/perolehan guru BK sebagai hasil kegiatan khususnya dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Analisis diagnosis dan prognosis terhadap kenyataan yang ada setelah dilakukan kegiatan layanan/pendukung.

e. Tindak Lanjut Pelaksanaan Program

Upaya tindak lanjut didasarkan pada hasil analisis. Menurut Prayitno dalam Suhertina ada tiga kemungkinan kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan guru pembimbing sebagai berikut (Suhertina: 2008)

- 1) Memberikan tindak lanjut “singkat dan segera” misalnya berupa pemberian penguatan atau penegasan kecil, siswa diminta melakukan sesuatu yang berguna bagi dirinya.
- 2) Menempatkan atau mengikutsertakan siswa yang bersangkutan dalam jenis layanan tertentu (misalnya dalam layanan bimbingan kelompok atau konseling kelompok).
- 3) Membentuk program satuan layanan atau pendukung yang baru, sebagai kelanjutan atau pelengkap layanan pendukung tertentu.<sup>29</sup>

Bentuk tugas dan tanggung jawab guru pembimbing atau konselor sebagai suatu profesi yang berbeda dengan bentuk tugas sebagai guru mata pelajaran, maka beban tugas atau penghargaan jam kerja guru pembimbing ditetapkan 36 jam/minggu, beban tugas tersebut meliputi:

- 1) Kegiatan penyusunan program layanan dalam bidang bimbingan serta semua jenis layanan, termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 12 jam.
- 2) Kegiatan melaksanakan pelayanan dalam bidang bimbingan serta semua jenis layanan, termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 18 jam.
- 3) Kegiatan evaluasi pelaksanaan pelayanan dalam bidang bimbingan serta semua jenis layanan, termasuk kegiatan pendukung, yang dihargai sebanyak 6 jam.

Sebagaimana guru mata pelajaran, guru pembimbing atau konselor yang membimbing 150 orang siswa dihargai sebanyak 18 jam. Dewa Ketut Sukardi.

Hasil monitoring terhadap proses kegiatan pembelajaran /pelayanan dan hasil-hasilnya sebagaimana isi LAPELPROG dianalisis dan ditindaklanjuti untuk perbaikan, pemantapan ataupun penyesuaian kegiatan pelayanan selanjutnya. Kegiatan tindak lanjut direncanakan melalui RPL/RKP tersendiri. Kegiatan tindak lanjut ini dapat berupa jenis layanan dan kegiatan pendukung tertentu, baik melalui format klasikal maupun non klasikal, perorangan, kolaboratif ataupun lapangan. Suhertian

Berdasarkan kajian di atas, operasional dari akuntabilitas guru bimbingan konseling dalam mengevaluasi

program bimbingan konseling dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

- 1) Mengevaluasi program bimbingan konseling
  - a) Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan.
  - b) Keterlaksanaan program.
  - c) Hambatan-hambatan yang dijumpai.
  - d) Dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar.
  - e) Respons siswa, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan.
  - f) Guru BK dapat memilih jenis penilaian yang sesuai dengan kebutuhan layanan bimbingan dan konseling.
  - g) Meneliti secara periodik hasil pelaksanaan program yang perlu diperbaiki.
- 2) Menganalisis hasil evaluasi program bimbingan konseling
  - a) Tabulasi data.
  - b) Menelaah persentase masalah.
  - c) Mempertimbangkan tujuan layanan dengan permasalahan siswa
- 3) Tindak lanjut program bimbingan dan konseling
  - a) Memberikan tindak lanjut “singkat dan segera”
  - b) Menempatkan atau mengikutsertakan siswa yang bersangkutan dalam jenis layanan tertentu.
  - c) Membentuk program satuan layanan atau pendukung yang baru, sebagai kelanjutan atau pelengkap layanan/pendukung yang terdahulu.

Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi guru Bimbingan Konseling dalam mengevaluasi program bimbingan konseling di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

- 1) Faktor internal
  - a) Faktor latar belakang pendidikan guru Bimbingan Konseling.
  - b) Faktor pengalaman dan pengetahuan guru Bimbingan Konseling.
  - c) Faktor kepribadian guru Bimbingan Konseling.
- 2) Faktor eksternal
  - a) Personal/petugas pelaksana.
  - b) Pihak yang terkait.
  - c) Fasilitas dan perlengkapan.
  - d) Partisipasi guru

## 8. *Stakeholders* (Pelanggan) BK

Istilah *stakeholders* sudah sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannya dengan berbagai ilmu atau konteks, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumber daya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah *stakeholder* ini ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, *stakeholder* sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana (Abdiprojo, 2010).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam konteks dunia pendidikan dan lebih khusus lagi bimbingan dan konseling *stakeholders* yang dimaksud (Dirjen Dikdasmen: 2004) adalah:

1. Siswa
2. Orang tua
3. Personil Sekolah
4. Masyarakat
5. Organisasi Profesi



## 6. Pemerintah

Keseluruhan komponen *stakeholders* di ataslah yang secara langsung terlibat dan terkait dalam rangka penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Masing-masing komponen tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda yang kesemuanya menjadi satu kesatuan yang utuh. *Stakeholder* akan berkolaborasi untuk membuat perencanaan, dan semua anggota yang bersangkutan dari sekolah internal dan eksternal masyarakat harus dimasukkan.

Konselor yang berkomitmen dan berdedikasi melaksanakan fungsi dan tugas profesionalnya dengan bertanggung jawab kepada lima pihak, yaitu kepada:

1. *Diri sendiri*: bahwa ia telah melaksanakan apa yang perlu/harus dilaksanakannya;
2. *Ilmu dan profesi*: bahwa ia telah menunaikan kaidah-kaidah keilmuan dalam profesinya sesuai dengan tuntutan keilmuan dan keprofesionalannya itu;
3. *Peserta didik/sasaran layanan*: bahwa ia telah berbuat sesuatu yang menguntungkan peserta didik dalam pengembangan potensi dirinya, pengembangan KES dan penanganan KES-T-nya;
4. *Pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya*: bahwa ia telah memenuhi kewajiban sebagaimana diletakkan ke pundaknya, oleh orang tua peserta didik, pimpinan satuan pendidikan (sekolah/madrasah, dan lain-lain), pemerintah atau yayasan, dan masyarakat pada umumnya.
5. *Tuhan Yang Maha Esa*: bahwa ia telah berbuat sesuatu sesuai dengan keimanan dan ketakwaan kepadanya (Prayitno: 2009).

## 9. Implikasi Pelaksanaan Akuntabilitas Guru Bimbingan dan Konseling

Pelaksanaan akuntabilitas dan pengawasan yang baik akan menciptakan implikasi yang positif berkenaan dengan konselor (sebagai orang yang menjadi penyelenggara layanan) dan kelembagaan (tempat konselor bekerja). Hal itu tercermin dalam penatalaksanaan organisasi dan manajemen yang lebih sehat dan kompetitif.

Akuntabilitas Bimbingan dan Konseling akan dapat diimplementasikan dengan baik apabila sejak dini kondisi seperti yang telah dikemukakan diatas (faktor penghambat) dapat diminimalkan dan beberapa faktor yang mendukung yang telah dikemukakan diatas (faktor pendukung) terselenggaranya akuntabilitas dalam BK. Melalui pelayanan hasil layanan dan penilaian proses, serta program pengawasan keseluruhan kegiatan bimbingan dan konseling dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder* pelayanan bimbingan dan konseling dan konseling di sekolah (siswa, orang tua siswa, personil sekolah, masyarakat dan pemerintahan).

Krumboltz (1974) juga mencatat bahwa kemampuan melakukan akuntabilitas menjamin upaya konselor untuk membangun sistem akuntabilitas yang memiliki kontribusi untuk diri mereka sendiri. Sebuah sistem akuntabilitas akan memungkinkan konselor untuk:

1. Mendapatkan umpan balik tentang hasil kerja mereka.
2. Metode konseling dapat dipilih berdasarkan keberhasilan yang telah ditunjukkan.
3. Melakukan identifikasi klien yang selama ini kebutuhannya belum terpenuhi.
4. Merancang metode yang singkat untuk operasional kegiatan rutin.

5. Melakukan tukar pendapat dengan staf untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang (Gibson & Mitchell, 2011).

## **PENUTUP**


Akuntabilitas Guru Bimbingan dan Konseling sangat diperlukan, karena melalui akuntabilitas ini kegiatan bimbingan dan konseling yang terurai di dalam program mingguan sampai tahunan dapat dilihat terlaksana atau tidak terlaksana. Dengan akuntabilitas yang dimiliki Guru BK, dapat dilihat pula faktor-faktor penghambat serta faktor-faktor pendukung yang dapat dievaluasi untuk kegiatan tahun-tahun berikutnya. Guru BK yang profesional diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya harus selalu menyertakan akuntabilitas di setiap kegiatan yang dilakukan.

## **REFERENSI**

- Astramovich, R. L., & Coker, J. K. (2007). Program evaluation: The accountability bridge model for counselors. *Journal of Counseling*.
- Cobia, D. C., & Henderson, D. H. (2007). *Developing an Effective and Accountable School Counseling Program* (2e).
- Dahir C., & Stone C. (2003). *Assessment of school counselor needs for professional development survey (ASCNPD)*. Unpublished survey.
- Diniaty, A. (2012). *Evaluasi Bimbingan Konseling*. Pekanbaru: Zenafa.
- Dirjen Dikdasmen (2004). *Standar Kompetensi Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan.
- Dirjen Diknas. (2004). *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Depdiknas RI.

- Gibson, R.L. & Mitchell, M. H. (1981). *Introduction to Counseling and Guidance*. Second Edition. New York: Mc Millan Publishing.
- Gibson, R. L. & Mitchell, M. H. (2011). *Bimbingan dan Konseling*. Terjemahan Yudi Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kajian Pustaka, *Teori Akuntabilitas*, diakses dari <http://www.kajianpustaka.com> pada tanggal 12 April 2016.
- Krumboltz, J. D. (1974). An accountability model for counselors. *The Personnel and Guidance Journal*, 52(10), 639-646.
- Myrick, R.D. (2003). *Accountability: Counselor Count*. *Professional School Counseling*, 6. 174-181.
- Prayitno. (2009). *Arah Kinerja Profesional Konseling Sekolah*. Padang: FIP-UNP.
- Salahudin, A. (2016). *Bimbingan & Konseling*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Schellenberg, R. (2008). *The New School Counselor: Strategies for Universal Academic Achievement*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Education.
- Suhertina. (2008). *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Pekanbaru: Suska Press.
- Suhertina. (2008). *Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Pekanbaru : Suska Press.





**MODEL EVALUASI *GOAL ORIENTED*  
BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM  
MENINGKATKAN PROFESIONALISME  
KONSELOR**

Consolidated financial statements		financial statements	
31 March 2013		31 December 2012	
Note	(Unaudited)	(in thousands)	(audited)
		4,115	4,709,777
		6,331	7,137,603
4	6,165,607	340,966	8,457,290
4	74,466	72,000	906,523
11	746	8,461,935	791
		4,854,693	1,608,748
		1,699,345	55,063
		2,796,035	3,069,330
		14,363,240	58,428,45
		248,390	29,264,851
		112,763	11,810,956
		312,300	809,941
		216,959	509,536
		23,439,526	31,438,420
		205,804	14,483,300
		77,865,879	87,436,846
			62,882,725

# MODEL EVALUASI *GOAL ORIENTED* BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME KONSELOR

Indah Lestari

Bimbingan Konseling, Universitas Muria Kudus

## Abstrak

Evaluasi sebagai suatu proses untuk memastikan sejauh mana terealisasi atau tidaknya suatu tujuan. Para ahli telah menjelaskan teori dan konsep berkenaan dengan evaluasi dari berbagai perspektif serta cara pandang para ahli itu sendiri. Perbedaan sudut pandang, konsep, kekhasan, dan metodologi yang dimiliki tentunya menjadi latar belakangnya dalam melaksanakan evaluasi, terdapat berbagai model riset evaluasi yang dikemukakan oleh pakar penelitian evaluasi. Beberapa model-model evaluasi yang dipakai sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi suatu program secara sistematis dan setiap model memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi perbedaan model pendekatan evaluasi diantaranya adalah perbedaan filosofi dan ideologi, serta metodologi penelitian yang digunakan. Salah satu model evaluasi tersebut adalah model Evaluasi *Goal Oriented*. salah satu model evaluasi pendidikan yang di terapkan dalam konteks bidang Bimbingan dan Konseling yaitu Model Evaluasi *Goal Oriented* atau Model Evaluasi Orientasi Tujuan dan banyak dikenal sebagai Evaluasi Tyler. Model evaluasi dikembangkan berdasarkan deskripsi dan analisis visibilitas implementasi evaluasi program bimbingan dan konseling komprehensif yang dibutuhkan. Diharapkan dengan model evaluasi, peningkatan kompetensi profesional menjadi harapan nyata bagi profesi konselor.

**Kata Kunci:** evaluasi, *goal oriented*, profesional konselor

## PENDAHULUAN

Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral proses Pendidikan memiliki kontribusi dalam penyiapan sumber daya manusia yang bermutu. Dalam perspektif bimbingan dan konseling, peserta didik merupakan individu sedang berada dalam proses berkembang atau menjadi (*becoming*), yaitu berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan, individu memerlukan bimbingan. Sebagaimana pendapat Boharudin (2011) bersamaan dengan perkembangan global di era MEA, maka bimbingan dan konseling mengalami kecenderungan untuk bergeser dari situasi isolasi atau soliter ke arah keterkaitan dengan berbagai aspek dan dimensi dalam prosesnya. Dengan demikian maka bimbingan dan konseling tidak hanya saja menyentuh pada aspek permukaan saja tetapi lebih komprehensif. Akuntabilitas layanan bimbingan dan konseling komprehensif dapat terukur dengan melaksanakan evaluasi program dan hasil.

Evaluasi merupakan suatu unit kegiatan yang memiliki tujuan menghimpun keterangan/data tentang realisasi dari implementasi kebijakan, yang berkelanjutan pada suatu organisasi yang melibatkan beberapa kelompok individu dalam pembuatan keputusan (Ananda dan Rafida, 2017).

Fitzpatrick, et al (2015) Evaluasi Program mengajarkan individu/ kelompok / organisasi bagaimana secara efektif menentukan tujuan utama evaluasi mereka, sehingga membuat evaluasi mereka lebih valid, lebih berguna, dan lebih efisien

Dalam Bimbingan dan konseling prinsip-prinsip evaluasi program BK seperti yang dipaparkan oleh Badrujaman (2014: 20) diantaranya: (1) Evaluasi yang efektif



memerlukan pengenalan atas tujuan- tujuan tertentu. (2) Evaluasi yang efektif memerlukan kriteria penilaian yang valid. (3) Evaluasi yang efektif tergantung pada pelaksanaan pengukuran yang valid terhadap kriteria. (4) Evaluasi program harus melibatkan seluruh pihak yang berpengaruh. (5) Evaluasi program BK memerlukan umpan balik. Maksudnya bahwa hasil evaluasi diharapkan dapat digunakan sebagai umpan balik penyempurnaan pada kebijakan berikutnya. (6) Evaluasi program BK harus memiliki perencanaan yang baik dan dilaksanakan secara terus menerus. (7) Evaluasi program BK menekankan pada kepositifan yang berarti bahwa seorang evaluator diharapkan dapat bersikap positif dan objektif. Untuk mencapai hasil evaluasi yang optimal diperlukan berbagai prinsip dalam melakukan evaluasi agar kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan baik dan tentunya sesuai dengan kriteria serta tidak lupa untuk menginformasikan hasil program maupun evaluasi bimbingan dan konseling, hal ini merupakan langkah penting dalam proses akuntabilitas dan kunci untuk mengumpulkan dukungan bagi program tersebut, melalui proses ini pihak sekolah akan lebih memahami secara mendalam tentang kontribusi program bimbingan dan konseling yang berfokus pada pengembangan siswa secara optimal

Konselor memiliki peran penting dalam perkembangan dan pendampingan siswa, menjadi seorang konselor harus memiliki bekal dalam ilmu ataupun tingkah lakunya, tidak hanya terbatas pada bimbingan yang bersifat akademik melainkan sosial, pribadi, intelektual dan pemberian nilai, konselor berperan secara maksimal dan memfasilitasi konseli dalam mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya secara optimal.

## MENINGKATKAN PROFESIONALISME KONSELOR MELALUI MODEL EVALUASI *GOAL ORIENTED*

### 1. Model Evaluasi *Goal Oriented*

Beberapa model evaluasi dalam Sugiyono (2011:110) diantaranya: *goal free evaluation, decision oriented evaluation, transactional evaluation, evaluation research, goal free evaluation, adversary evaluation*. Model-model tersebut dapat diterapkan dalam semua disiplin ini tanpa terkecuali dapat digunakan untuk mengevaluasi program bimbingan dan konseling

Sukardi dalam Albar (2020:54) mengklasifikasikan 6 model evaluasi diantaranya 1) *Goal orientated* model atau model Tyler, 2) Model Evaluasi berorientasi pada keputusan, 3) Model penilaian Transaksional, 4) *Goal free* Evaluasi model, 5) *Advisory Evaluation* model dan 6) Model Evaluasi sumatif dan formatif.

Adapun *Goal Orientated Evaluation* model, yang menjadi objek pengamatan adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan. Evaluator terus menerus mengecek seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program. Model ini dikembangkan oleh Tyler.

Penilaian pendekatan yang *goals oriented* telah menstimulasi proses berkembangnya perancangan tujuan secara spesifik serta pengembangan atau penemuan instrumen-instrumen ataupun prosedur pengukuran yang beraneka ragam secara teknologi (Tayibnapis, 2008). Berdasarkan kajian dan literatur tersebut, Tayibnapis mengemukakan pendekatan penilaian yang *goals-oriented* telah banyak mengarah pada persoalan bagaimanakah pendekatan tersebut diterapkan pada penilaian di dalam

ruang/kelas, penilaian program sekolah baik pada satu daerah ataupun daerah lainnya

Model evaluasi *goal oriented* ini menekankan pada penilaian terkait seberapa jauh ketercapaian dari tujuan program. Pada umumnya, dalam merancang program BK tentu telah ditentukan tujuan-tujuannya, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Model evaluasi ini akan membantu evaluator dalam menilai apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sudah terlaksana dan tercapai dengan baik atau belum. Dengan demikian, evaluator akan membandingkan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan tujuan yang dapat dicapai..

Konsep model evaluasi berorientasi tujuan (*Goal Oriented*) pertama kali dikenalkan oleh Ralph Tyler tahun 40-50 an sebagai standar baru bagi evaluasi pendidikan. Sebelumnya untuk mengevaluasi bidang pendidikan dilakukan dengan tes yang menggunakan acuan kriteria. Tyler menggunakan metodologi yang lebih kompleks untuk menghubungkan hasil pencapaian siswa dengan hasil belajar yang diinginkan. Tyler merumuskan evaluasi hasil belajar dari tujuan pembelajaran berdasarkan taksonomi tujuan pembelajaran yang dikembangkan oleh Bloom dan Krathwohl. Pendekatan ini kemudian diberi nama Pendekatan/ model Tyler, sesuai nama pengembangnya. Model Tyler ini kemudian banyak dipakai untuk mengevaluasi hasil atau program pendidikan. Cara pendekatan berorientasi tujuan ini bisa juga digunakan untuk mengevaluasi program lain selain program pendidikan.

Tujuan evaluasi Tyler yaitu, untuk memberikan pemeriksaan berkala atas efektivitas lembaga pendidikan dan untuk menunjukkan poin-poin di mana perbaikan dalam program itu diperlukan; untuk memvalidasi hipotesis yang

menjadi dasar operasi lembaga pendidikan; untuk mengakses informasi dasar hingga panduan yang efektif siswa individu; untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis komunitas sekolah; dan untuk memberikan dasar yang kuat bagi hubungan dengan masyarakat.

Asumsi Tyler tentang evaluasi:

- a) Pendidikan berusaha mengubah perilaku.
- b) Perilaku ini adalah tujuan sekolah.
- c) Program dinilai dengan mencari tahu jika dan bagaimana tujuan dicapai.
- d) Perilaku terlalu rumit untuk diukur
- e) Dalam bentuk apa pun perilaku muncul, itu harus dinilai.
- f) Perangkat apa pun yang memberikan bukti kemajuan siswa sesuai.
- g) Jenis evaluasi yang dilakukan secara langsung mempengaruhi belajar dan mengajar.
- h) Evaluasi adalah tanggung jawab staf sekolah dan pelanggannya.

Dalam perkembangan lebih lanjut, model/pendekatan berorientasi tujuan ini kemudian dikembangkan lagi oleh Metfessel dan Michael tahun 1967, oleh Provus 1973 dan juga oleh Hammond. Dari berapa-berapa model pendekatan baru ini ciri utamanya tetap sama yaitu jika suatu kegiatan atau program sudah mempunyai tujuan yang hendak dicapai, maka evaluasinya berfokus pada apakah tujuan itu telah dicapai.

Tyler menyebutkan bahwa penilaian pendidikan sebagai sebuah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan-tujuan pendidikan dari program sekolah atau kurikulum tercapai. Evaluasi berorientasi program dari Tyler

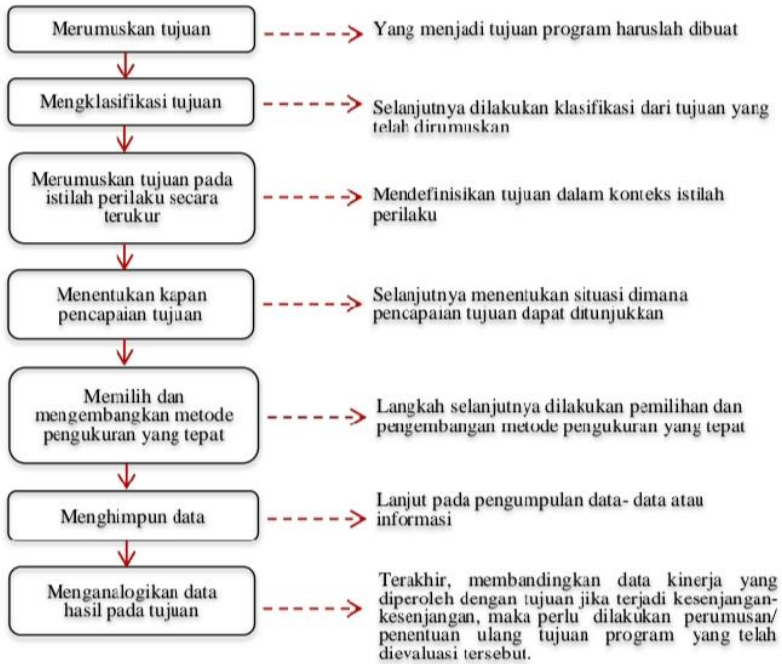
ini didesain untuk menggambarkan sejauh mana tujuan program telah dicapai. Tyler menggunakan kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang berhasil diamati untuk memberikan masukan terhadap kekurangan dari suatu program. Pendekatan ini memfokuskan pada tujuan spesifik dari program dan sejauh mana program ini telah berhasil mencapai tujuan tersebut. Dalam bidang pendidikan, kegiatan yang bisa dievaluasi oleh pendekatan ini bisa saja sesederhana kegiatan-kegiatan harian di kelas atau bahkan kegiatan kompleks yang melibatkan lembaga sekolah. Hasil yang diperoleh dari evaluasi ini nantinya dapat dipakai untuk merumuskan kembali tujuan dari kegiatan, mendefinisikan kembali kegiatan/program, prosedur penilaian dan perangkat yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan.

Adapun langkah-langkah evaluasi *goal oriented* seperti yang disebutkan oleh Fitzpatrick, et, al, (2004: 72) antara lain: 1) *Establish broad goals or objectives.* 2) *Classify the goals or objectives.* 3) *Define objectives in behavioral terms.* 4) *Find situations in which achievement of objectives can be shown.* 5) *Develop or select measurement techniques.* 6) *Collect performance data.* 7) *Compare performance data with behaviorally stated objectives.*

Tyler menetapkan 7 (tujuh) langkah *Goal Oriented* untuk menentukan sejauh mana tujuan program/kegiatan pendidikan telah dicapai sebagai berikut: Langkah-langkah evaluasi Tyler terdiri dari:

- (1) Merumuskan tujuan secara jelas;
- (2) Melakukan klasifikasi tujuan;
- (3) Merumuskan tujuan pada istilah perilaku secara terukur;
- (4) Menentukan kapan pencapaian tujuan dapat ditunjukkan;
- (5) Memilih dan mengembangkan metode pengukuran yang tepat;

- (6) Menghimpun informasi atau data; dan
- (7) Menganalogikan data atau informasi prestasi pada tujuan yang dituangkan pada karakter yang dinilai



**Gambar 1 Langkah-Langkah Model Evaluasi Tyler**

Setelah langkah terakhir ini selesai, kesenjangan antara kinerja dan tujuan yang diinginkan dapat diketahui. Kemudian hasil ini digunakan untuk mengoreksi kekurangan program. Saat program koreksi berjalan, berikutnya siklus evaluasi ini bisa diulang kembali. Pemikiran Tyler ini secara logis bisa diterima dan juga mudah dipakai oleh para praktisi evaluasi pendidikan. Dalam kegiatan belajar mengajar seorang guru/praktisi pendidikan pasti kenal dengan tujuan umum dan tujuan khusus setiap kegiatan pendidikan. Tyler juga menggunakan pre-test dan post-test untuk digunakan sebagai salah satu teknik pengukuran. Teknik pre-post tes dimaksudkan untuk menentukan perubahan-perubahan yang

terjadi pada individu, kegiatan atau program serta besarnya perubahan-perubahan tersebut.

Setelah mendeskripsikan langkah-langkah evaluasi berorientasi tujuan di atas, Tyler juga mendeskripsikan 6 (enam) tujuan dari sekolah (khususnya sekolah di Amerika): 1. Menguasai informasi 2. Mengembangkan kebiasaan kerja dan keterampilan belajar 3. Mengembangkan cara berpikir yang efektif 4. Menginternalisasikan sikap, minat, apresiasi dan kepekaan sosial 5. Menjaga kesehatan fisik 6. Mengembangkan filsafat hidup (semakin lama kita belajar, semakin kita bisa meningkatkan filosofis hidup, dari tidak tau menjadi mengetahui. Tyler menjelaskan perlunya memperhatikan aspek afektif dalam pengembangan tujuan pembelajaran disekolah.

Tyler menekankan perlu penyaringan tujuan umum sebelum menerimanya sebagai basis untuk mengevaluasi kegiatan. Dalam bidang pendidikan, cara menyaringnya dengan mengajukan pertanyaan yang bermakna mengenai filsafat, sosial dan pedagogis. Metode empiris untuk mengevaluasi tujuan (*goal*) adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data untuk mendeskripsikan nilai tujuan.
- 2) Dengar pendapat, panel untuk *review* dan mengevaluasi tujuan
- 3) Melaksanakan studi pada dokumentasi :catatan-catatan, editorial, arsip-arsip
- 4) Melaksanakan pilot study untuk melihat apakah tujuan tercapai. Selanjutnya, pilihan dan strategi pengumpulan data evaluasi ini, tergantung pada jawaban atas beberapa pertanyaan sebagai berikut:
  - a) untuk siapa informasi itu dan siapa yang akan menggunakan evaluasi.
  - b) Jenis informasi apa yang

dibutuhkan. c) bagaimana informasi itu digunakan. d) kapan informasi diperlukan. d) sumber apa yang memungkinkan untuk melakukan evaluasi. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan pokok untuk melakukan evaluasi terhadap program/ kegiatan .

Berdasarkan penjelasan di atas penulis melihat beberapa Analisis model Tyler sebagai berikut yaitu: 1) Model ini hanya mengukur aspek tujuan, dengan kata lain apakah tujuan obyek evaluasi yang ditetapkan secara formal dalam *blue print* tercapai atau tidak. 2) Model ini tidak akan mengukur apa yang terjadi di luar tujuan formal program tersebut. 3). Evaluasi hanya mengukur pada akhir program apakah tujuan tersebut tercapai. Evaluasi tidak mengukur efek sampingan positif atau negatif dari program tersebut. Contoh penerapan model ini: Evaluasi ujian nasional bertujuan untuk mengukur apakah rata-rata nilai hasil belajar siswa secara kumulatif siswa mencapai 75. Evaluasi itu tidak akan mengukur apakah siswa yang tidak lulus mengalami stres dan lain-lain.

## **2. Kelebihan dan Kelemahan Pendekatan Evaluasi berorientasi Tujuan**

- a) Kekuatan utama dari pendekatan evaluasi berorientasi tujuan adalah kelugasannya. Pendekatan ini mudah dimengerti dan dipahami mudah diikuti, mudah diterapkan dan juga mudah disetujui untuk diteliti. Pendekatan ini telah menstimulasi pengembangan teknik, prosedur pengukuran dan instrumen untuk berkembang. Literatur mengenai pendekatan ini pun banyak, ide kreatif dan model model baru yang lahir dari pendekatan ini pun banyak bermunculan. Dengan pendekatan ini pemilik



program bisa melihat lebih jelas hasil pencapaian dari suatu program sehingga bisa menilai dan menimbang suatu program.

b) Kelemahan:

- 1) Kurangnya komponen evaluasi yang riil, lebih menekankan mengukur tujuan pencapaian daripada keberhargaan tujuan itu sendiri
- 2) Kekurangan standar untuk mempertimbangkan kesenjangan yang penting antara hasil observasi dengan level kinerja
- 3) Mengabaikan nilai dari tujuan itu sendiri
- 4) Mengabaikan alternatif penting dalam mempertimbangkan perencanaan program
- 5) Melupakan konteks mengenai objek evaluasi dilaksanakan
- 6) Mengabaikan hasil penting yang diperoleh yang tidak diungkapkan dalam tujuan
- 7) Meninggalkan bukti informasi program yang tidak menggambarkan tujuan program

Tabel 1 Kelebihan dan kelemahan beberapa model Evaluasi  
(Albar, 2020: 54)

No	Model Evaluasi	Pakar	Titik Tekan	Kelebihan	Kekurangan
1	Model Evaluasi Berorientasi Tujuan	Tyler	Seberapa jauh tujuan program sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program	Demokratis Sederhana	1. Tujuan sulit dipahami 2. Tujuan tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan

					3. Efek samping tidak terindikasi
2	Model evaluasi bebas Tujuan	Michael Scriven	Bertolak dari tampilan-tampilan dan pengaruh-pengaruh sampingan yang muncul dari pelaksanaan program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi dapat melakukan evaluasi tanpa mengetahui tujuan</li> <li>2. Mempertimbangkan pengaruh sampingan dari suatu produk</li> </ol>	Evaluator dapat melakukan evaluasi secara melebar tanpa mengetahui tujuan sebelumnya
3	Model Evaluasi Formatif-sumatif	Michael Scriven	Adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi hambatan dan lingkup objek</li> </ol>	Tidak memandang sebuah program sebagai sebuah sistem terpadu

				yg di evalu asi 2. Mam pu meng ukur keter capai an progr am ketika sudah berak hir	
--	--	--	--	---	--

Pendukung tercapainya sasaran pembangunan manusia yang bermutu adalah melalui penyelenggara Pendidikan yang bermutu, proses Pendidikan yang bermutu tidak cukup hanya dilakukan melalui transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga harus didukung oleh peningkatan profesionalisme dan sistem manajemen tenaga pendidik serta pengembangan kemampuan peserta didik untuk menolong diri dalam memilih dan mengambil keputusan demi mencapai cita-citanya. Menjadi konselor yang berkompetensi, konselor diharapkan selalu mengikuti pelatihan ataupun Pendidikan yang lebih tinggi agar mampu memahami dirinya sendiri dan juga memiliki pengetahuan luas sehingga dapat dengan tepat memilih evaluasi program dengan harapan adanya keberadaan tautan antara evaluasi program dan jenis program yang dievaluasi.

## **PENUTUP**

Model evaluasi bimbingan dan konseling telah menjadi kebutuhan dalam pengembangan layanan bimbingan dan konseling di dunia, kebutuhan panduan evaluasi yang efektif semakin dibutuhkan bagi pengembangan profesionalitas konselor. Salah satunya yaitu Evaluasi berorientasi program dari Tyler ini didesain untuk menggambarkan sejauh mana tujuan program telah dicapai. Evaluasi sebagai proses penelusuran informasi secara sistematis tentang sesuatu untuk memberikan nilai atau keputusan apakah tujuan telah terpenuhi atau belum. Evaluasi juga berguna bagi pengambilan alternatif keputusan yang meliputi tiga hal pokok: a. Evaluasi sebagai proses sistematis yang komprehensif b. Proses tersebut mencakup tiga langkah: pertama, menyusun pertanyaan, kedua, mengumpulkan data, ketiga, menyajikan informasi. 2. Evaluasi mendukung proses pengambilan keputusan. 3. Kelebihan pendekatan evaluasi berorientasi tujuan adalah kelugasannya. Pendekatan ini mudah dimengerti dan dipahami mudah diikuti, mudah diterapkan dan juga mudah disetujui untuk diteliti. Pendekatan ini telah menstimulasi pengembangan teknik, prosedur pengukuran dan instrumen untuk berkembang.

## REFERENSI

- Albar, M. R. (2020). *Desain Pembelajaran Untuk Menjadi Pendidik Yang Profesional*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Ananda, R. & Rafida, T. (2017). *Pengantar Evaluasi Program Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing
- Badrujaman, A. (2014). *Teori dan Aplikasi Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Indeks.
- Fitzpatrick, J. L. et al. (2015) *Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical*.
- Novalinda, R, et al. (2020). Pendekatan Evaluasi Program Tyler Goal Oriented. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 18 (1) [https://www.researchgate.net/publication/342239854\\_PENDEKATAN\\_EVALUASI\\_PROGRAM\\_TYLER\\_GOAL-ORIENTED](https://www.researchgate.net/publication/342239854_PENDEKATAN_EVALUASI_PROGRAM_TYLER_GOAL-ORIENTED) diunduh pada Tanggal 12 Desember 2020
- Putra, A. T. A. *Evaluasi Program Pendidikan: "Pedekatan Evaluasi Program Berorientasi Tujuan (Goal-Oriented Evaluation Approach: Ralph W. Tyler)"* <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/498825> diunduh Pada tanggal 13 Desember 2020
- Stone, J. C. (1989). *Educational Evaluation: Classic Works of Ralph W. Tyler*. <https://www.jstor.org/stable/1163590> diunduh Pada Tanggal 12 Desember 2020
- Sugiyono. (2011). *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Semarang: Widya Karya.
- Tyler, R. (1950). *Models of Teaching*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs





**KOLABORASI DALAM PELAYANAN  
BIMBINGAN DAN KONSELING**

Consolidated financial statements		financial statements	
31 March 2013 (Unaudited)	31 December 2012	31 March 2013 (Audited)	31 December 2012
Note	(in thousands)		
4.1	6,165,607	340,961	4,115,200
4	1,074,466	7,231	7,137,603
11	2,746	8,461,993	8,457,290
	1,699,345	1,608,748	906,523
	2,796,035	55,063	3,069,739
	5,265,345	524,843	14,831,345
4	14,863,345	77,111	58,428,111
	183,379	48,399,333	29,264,851
	55,126,353		
	12,648,908	11,887,811	37,956
	2,312,500	7,512,808	11,871,941
		14,403,119	809,941
			509,536
			55,578
			68,672
	77,565,879	37,416,346	62,882,725





# KOLABORASI DALAM PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

**Neviyarni S, Soeci Izzati Adlya**

Departemen Bimbingan dan Konseling, FIP, Universitas  
Negeri Padang

## **Abstrak**

Kolaborasi adalah kegiatan kerja sama yang sebaiknya dilakukan oleh guru Bimbingan dan Konseling (BK) agar pelayanan (BK) tepat sasaran dan tepat cara untuk membantu siswa di sekolah. Kemampuan dalam melakukan kolaborasi merupakan implikasi dari penerapan kompetensi sosial guru oleh guru BK di sekolah. Pada pelayanan BK, personil sekolah seperti wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah serta orang tua akan membantu guru BK dalam mengumpulkan dan memberi informasi terkait siswa dan memungkinkan guru BK untuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu, penting adanya keterlibatan semua pihak untuk kelancaran pelayanan BK di sekolah. Secara khusus, bab ini membahas kolaborasi guru BK dengan pihak-pihak terkait pada setiap tahapan kegiatan pelayanan (BK) mulai dari pelaksanaan observasi, *need assessment*, perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi dan tindak lanjut. Tulisan ini mengemukakan pentingnya kolaborasi dilakukan oleh guru BK dengan semua pihak terkait untuk kelancaran dan kesuksesan pelayanan BK.

**Kata Kunci:** Kolaborasi, Guru BK, Pelayanan BK

## **PENDAHULUAN**

Pada bagian ini disajikan tentang kolaborasi guru BK di sekolah yang terdiri dari 5 bagian utama. Pada bagian pertama membahas tentang kolaborasi guru BK pada kegiatan observasi; bagian kedua membahas tentang kolaborasi guru BK pada kegiatan *need assessment*; bagian

ketiga membahas tentang kolaborasi dalam perencanaan program BK; bagian keempat membahas tentang kolaborasi dalam pelaksanaan program BK; bagian kelima membahas tentang kolaborasi dalam evaluasi dan tindak lanjut pelayanan BK. Kolaborasi merupakan suatu proses interaksi melalui upaya kerja sama yang melibatkan beberapa orang dengan saling menggabungkan pemikiran serta saling ketergantungan antara satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kolaborasi juga dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu kolaborator dengan pihak lainnya baik yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi ataupun tidak serta terdapat hubungan yang saling menguntungkan dalam rangka mencapai tujuan dengan menerapkan prinsip-prinsip kolaborasi. Kemudian, kolaborasi adalah suatu interaksi yang terjadi antara beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama atau menangani permasalahan bersama melalui penyampaian ide-ide dan gagasan-gagasan dalam mencari solusi dari permasalahan. Hadari Nawawi (Agustinawati, 2020) menyebutkan kolaborasi merupakan kegiatan yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan yang disepakati melalui pembagian tugas yang terarah pada tujuan yang ingin dicapai. Dalam membantu siswa menangani permasalahannya terutama berkaitan dengan permasalahan tingkah laku, guru BK perlu menjalin hubungan kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh personil di lingkungan sekolah. Kemampuan dalam membangun hubungan kolaborasi merupakan penerapan dari salah satu kompetensi guru yaitu kompetensi sosial. Dalam berkolaborasi terdapat tujuan bersama yang akan dicapai oleh pihak yang bekerja sama melalui pembagian tugas. Pada kegiatan kolaborasi juga diperlukan adanya hubungan yang harmonis, kesatuan dalam bekerja

serta kemampuan untuk berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Pada kegiatan kolaborasi terdapat pertukaran pendapat atau ide dari berbagai sudut pandang terhadap seluruh kolaborator. Kolaborasi di sekolah dilaksanakan berdasarkan pandangan bahwa pendidikan di sekolah dan pelayanan BK oleh konselor tidak dapat berfungsi dan berjalan sendiri dalam memenuhi kebutuhan siswa. Dahir & Stone (Ramdani et al., 2020) menyebutkan kebutuhan siswa dapat terpenuhi apabila terdapat kolaborasi yang dilakukan oleh guru BK/konselor dengan seluruh personil sekolah yang terkait juga memungkinkan untuk membantu keluarga siswa bukan hanya siswa itu sendiri. Selanjutnya, Fields dan Hines yang dikutip dalam Ramdani et al. (2020) menyebutkan guru BK dikatakan dapat bekerja secara profesional apabila dapat berkolaborasi serta bekerja dalam kelompok (*collaboration & teaming*) bersama pihak terkait untuk tujuan kesuksesan pelayanan bimbingan dan konseling seperti dengan guru mata pelajaran, wali kelas, siswa, orang tua bahkan masyarakat luas. Sejalan dengan itu, Sukardi (2008) menyebutkan bahwa layanan bimbingan dan konseling yang efektif dapat terjadi apabila terdapat kolaborasi atau kerja sama antara guru BK dengan pihak-pihak terkait seperti tenaga pengajar dan tenaga kependidikan di sekolah, staf administrasi, OSIS dan organisasi kesiswaan lainnya.

Kolaborasi yang terjalin antara guru BK dan personil sekolah diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan baik dan hal ini tidak terlepas dari adanya kesepakatan bersama. Pada kolaborasi ini, pihak-pihak yang terlibat yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, guru bimbingan dan konseling, guru pendidikan agama Islam, guru

pembina atau pelatih ekstrakurikuler serta semua pegawai yang ada. Sebaiknya seluruh personil sekolah ikut serta terlibat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan BK, sehingga dengan terjalannya kerja sama tersebut maka pelayanan BK akan berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan pelayanan BK, guru BK tidak mungkin bekerja sendiri, oleh karena itu guru BK memerlukan bantuan semua pihak untuk kelancaran pelayanan. Jadi, dalam melaksanakan pelayanan BK banyak pihak yang akan terlibat. Untuk itu, perlu dilakukan pengorganisasian yang terdiri dari para personil sekolah yang terkait dalam pelayanan BK agar layanan yang dilakukan dapat efektif serta tepat tujuan dan sasaran (Permana, 2018).

Untuk dapat mencapai perkembangan yang optimal, Pendidikan yang diberikan kepada siswa tidak hanya berfokus pada satu bidang seperti hanya pembelajaran materi mata pelajaran atau bidang bimbingan dan konseling akan tetapi kolaborasi dari berbagai kompetensi pendidikan untuk bersama mencapai tujuan pendidikan. kerja sama dalam bentuk kolaboratif ini merupakan cara yang digunakan oleh orang yang profesional untuk mencapai tujuan bersama. Adanya tujuan bersama, setiap pihak akan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, yang dimulai dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut kegiatan tersebut. Sejalan dengan pendapat Afdal (2015), untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif, perlu adanya usaha bersama dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

Berikut beberapa tahapan kegiatan pelayanan BK mulai dari observasi sampai tindak lanjut yang

memperlihatkan adanya kolaborasi antara guru BK dengan berbagai pihak.

## **PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING MELALUI KOLABORASI**

### **1. Observasi**

Langkah awal yang dapat dilakukan guru BK terkait pelayanan BK di sekolah yaitu melakukan observasi terhadap siswa sebagai sasaran utama pelayanan serta seluruh personil sekolah. Istilah observasi secara bahasa dapat diartikan sebagai melihat dan memperhatikan. Observasi merujuk kepada kegiatan memperhatikan dengan akurat, melihat fenomena yang muncul secara sistematis serta mempertimbangkan hubungan antara aspek yang terdapat pada fenomena tersebut. Observasi merupakan bagian penting dalam pengumpulan data pada berbagai disiplin ilmu, baik eksakta maupun ilmu-ilmu sosial.

Observasi dilakukan secara runtut dan berlangsung pada periode waktu tertentu sehingga memungkinkan keakuratan data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan. Walaupun tidak ditentukan waktu khusus dalam pelaksanaan pengamatan, namun apabila jangka waktu pengamatan semakin lama dan intensitas pengamatan dilakukan semakin sering maka keterpercayaan data yang diperoleh semakin tinggi. Teknik observasi ini perlu dilakukan pada berbagai situasi dan situasi yang natural terjadi karena pengamatan dilakukan untuk menilai fenomena yang terjadi pada situasi yang alami dan kondisi apa adanya.

Pelaksanaan observasi sebaiknya juga dilengkapi dengan data- lain yang mendukung seperti keterangan-keterangan yang diperoleh dari guru mata pelajaran, guru wali kelas serta orang tua siswa. Dalam melakukan observasi

terhadap sasaran pelayanan yaitu siswa, guru BK dapat melakukan kerja sama dengan wali kelas dan guru mata pelajaran untuk dapat mengumpulkan data serta mengidentifikasi siswa dengan baik. Adriani et al. (2013) yang menyebutkan perlu adanya kerja sama yang dilakukan oleh guru BK di sekolah dengan guru mata pelajaran karena guru mata pelajaran merupakan orang-orang yang sering bertatap muka dengan siswa di kelas.

Selain dengan guru mata pelajaran, kerja sama dengan wali kelas penting dilakukan oleh guru BK dikarenakan wali kelas ada pihak yang paling dekat dengan anak ketika di kelas yang melihat, memperhatikan dan mengetahui siswa dengan lebih baik terutama yang menjadi kelas asuhnya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa wali kelas dan guru mata pelajaran memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk mengetahui sikap, kemampuan, bakat, minat, dan cara belajar siswa. Selain itu, Sari et al. (2021) juga menyebutkan kerja sama dengan personil sekolah sangat perlu untuk dilakukan untuk membantu siswa mencapai tugas perkembangan karena guru adalah pihak yang terdekat dengan siswa serta mengetahui perkembangan siswa dalam keseharian di sekolah. Oleh karena itu, perlu bagi personil sekolah untuk memahami peran-perannya dalam membantu siswa terkait pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah sehingga siswa akan mampu mengaktualisasikan diri, mengatasi permasalahannya serta mengembangkan diri dan potensinya dengan optimal.

Kolaborasi perlu juga dilakukan oleh guru BK dengan orang tua siswa dalam mengumpulkan data tentang siswa karena orang tua adalah pihak terdekat siswa. Orang tua sejatinya merupakan pendidik utama bagi siswa ketika berada di luar lingkungan sekolah dan orang tua juga seharusnya

terlibat dalam proses komunikasi timbal balik tentang program BK dan perkembangan siswa karena menyangkut perkembangan dan masa depan anaknya. Oleh karena itu perlu dilakukan kolaborasi antara guru BK dengan orang tua untuk membantu dalam pengumpulan data dan informasi, serta membantu kesuksesan layanan BK dengan monitoring di luar sekolah (Nugraha & Rahman, 2017).

## **2. *Need Assesment***

Assesmen merupakan kegiatan pokok dalam pelaksanaan pelayanan BK di sekolah. Hal ini karena hasil *need assesment* yang dijadikan landasan dan patokan dalam pemberian pelayanan. Dalam pelaksanaan pelayanan BK, selain fasilitas fisik terdapat berbagai sarana yang harus dimiliki seperti AUM (Alat Ungkap Masalah), ITP (Instrumen Tahap Perkembangan), alat ungkap kreavitas, *locus of control*, *self-esteem*, motivasi, bakat, minat dan cita-cita, serta angket untuk berbagai pengungkapan (Prayitno, 2009). Sarana tersebut akan digunakan untuk menghimpun data terkait *need assesment* sebagai patokan dalam penyusunan rancangan program pelayanan Bimbingan dan Konseling. Dalam menyediakan sarana, prasarana tenaga dan kemudahan lainnya, guru BK dapat melakukan kolaborasi dengan Kepala Sekolah yang memiliki kewenangan terkait penyediaan saran dan prasarana untuk kemudahan pelayanan BK (Neviyarni S., 2009; Syukur et al., 2019).

*Need assesment* mulai dilakukan ketika guru BK bertatap muka dengan siswa kemudian diikuti dengan pengadministrasian instrumen-instrumen yang valid dan reliabel untuk menggambarkan kebutuhan siswa. Instrumen-instrumen yang digunakan seperti AUM Umum, AUM PTSDL, ITP, IKMS, DCM, AKPD dan sosiometri. Dalam pengadministrasian instrumen perlu mensosialisasikan

instrumen pada personil sekolah seperti kepada guru mata pelajaran, wali kelas serta kepala sekolah sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait pentingnya pengadministrasian instrumen terhadap siswa. Pengadministrasian instrumen untuk tujuan *need assesment* perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh personil sekolah, yaitu kepada wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah diberikan sosialisasi tentang pentingnya melaksanakan *need assesmen* dilakukan, prosedur pelaksanaan *need assesment* dan penggunaan hasil *need assesment* dalam membantu siswa dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Apabila tidak dilakukan sosialisasi terkait *need assesment* ini kepada personil sekolah, dimungkinkan terjadinya kesalahpahaman terhadap penyelenggaraan kegiatan ini oleh guru BK. Wali kelas dan guru mata pelajaran pada kegiatan *need assesment* ini sangat berperan penting dalam berkolaborasi bersama guru BK untuk dapat membantu guru BK mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. Dalam pelaksanaan *need assesment*, guru BK memerlukan data yang lengkap berkaitan dengan sasaran pelayanan yaitu siswa, karena hasil dari *need assesment* ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan program BK, yang seharusnya mencerminkan keseluruhan layanan yang dibutuhkan oleh siswa. Apabila data terkumpul dengan lengkap atas hasil kolaborasi dengan berbagai pihak maka guru BK akan dapat memantau berbagai kebutuhan siswa.

Setelah dilaksanakan *need asesment*, kemudian diolah dan selanjutnya dilakukan penyampaian hasil *need assesment*. Penyampaian hasil *need assesment* dilakukan tatap muka antara guru BK dengan siswa yang bersangkutan secara



kelompok dengan memperhatikan asas kerahasiaan dan secara pribadi. Program BK dibuat sesuai dengan kebutuhan siswa. Oleh karena itu suatu program BK hendaknya didasarkan atas analisis kebutuhan siswa (Tohirin, 2013). Perencanaan program BK disusun oleh guru BK berdasarkan kebutuhan siswa yang kemudian akan dibicarakan dengan melibatkan berbagai pihak. Koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak tersebut sangat diperlukan dalam penyusunan rencana program BK di sekolah sehingga program BK yang disusun dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dalam berbagai hal. Oleh karena itu, program yang telah disusun dapat memenuhi kebutuhan siswa dengan bantuan berbagai pihak di sekolah yang bersangkutan.

### **3. Perencanaan Program**

Program bimbingan dan konseling merupakan suatu perencanaan kegiatan layanan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Secara umum program bimbingan dan konseling disusun secara sistematis, terencana, terorganisasi dan terkoordinasi dalam jangka waktu tertentu (Tohirin, 2013). Menurut Hamdani & Afifuddin (2012), program BK merupakan perencanaan kegiatan layanan dan kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan pada jenis program tertentu. Perencanaan program perlu memperhatikan visi, misi dan tujuan sekolah, hasil *need assessment*, personil yang terlibat serta sarana dan prasarana yang tersedia. Berdasarkan hasil *need assessment* dapat ditentukan skala prioritas pelayanan, sehingga dapat direncanakan program pelayanan BK. Pelaksanaan layanan BK di sekolah dijalankan dengan terprogram, teratur dan berkelanjutan. Pelayanan BK di sekolah terlaksana melalui sejumlah kegiatan bimbingan yang terangkum dalam suatu program bimbingan (*guidance program*).

Program BK terdiri dari program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian.

- a. Program tahunan untuk periode satu tahun yang lebih besar dijabarkan menjadi program-program yang lebih kecil. Misalnya, program tahunan di perinci menjadi program semesteran.
- b. Program semesteran diperinci menjadi program bulanan.
- c. Program bulanan diperinci menjadi program mingguan.
- d. Program mingguan diperinci menjadi program harian.
- e. Program harian dirumuskan dalam bentuk rencana pelaksanaan layanan (RPL)

Menurut Kasmir ( 2016), perencanaan merupakan proses penyusunan kegiatan yang akan dilakukan pada periode waktu tertentu dengan tujuan yang jelas. Dalam penyusunan perencanaan, biasanya disertai dengan asumsi-asumsi sesuai dengan kondisi tertentu. Perencanaan program dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari *need assesment*. Kemudian hasil tersebut dianalisis dan diseleksi untuk menentukan dan membuat keputusan terkait pelayanan BK yang akan dilakukan. Dalam penyusunan rencana program BK di sekolah, harus melibatkan berbagai pihak yang terkait (*stakeholder*) seperti kepala sekolah, guru BK, guru mata pelajaran, wali kelas, tenaga administrasi, orang tua siswa, komite sekolah dan tokoh masyarakat. Rencana kegiatan pelayanan BK disusun atas dasar jenis-jenis dan prioritas kebutuhan, baik kebutuhan masing-masing individu (siswa) maupun kebutuhan sekolah secara umum (Tohirin, 2013).

Setelah perencanaan disusun, maka langkah selanjutnya adalah menyusun pekerjaan (job) masing-masing

personil sekolah yang sesuai tugas wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya. Dalam pelaksanaan pelayanan BK, personil sekolah yang terlibat dalam aktivitas pelayanan BK akan ditetapkan dan disusun serta terdapat pembagian tugas (*job description*) pada masing-masingnya (Tohirin, 2013). Guru BK atau konselor sekolah tidak mungkin bekerja sendiri dalam memberikan pelayanan BK kepada siswa di sekolah, ia memerlukan bantuan orang lain. Jadi, pelayanan BK di sekolah melibatkan banyak orang. Untuk itu, penentuan dan penyusunan personil sekolah beserta pembagian tugasnya harus dilakukan dengan baik sehingga kegiatan pelayanan BK dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Fungsi ini dilaksanakan oleh kepala sekolah bersama koordinator BK, terutama apabila di sekolah yang bersangkutan memiliki beberapa orang guru BK.

Langkah selanjutnya yaitu mempersiapkan seluruh sarana dan prasarana untuk mendukung rencana yang disusun. Penyediaan sumber daya manusia juga harus disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan atau diprasyarkan. Penyusunan program dilakukan berdasarkan urutan prioritas yang dilihat pada hasil *need assessment* yang telah dilakukan. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah terlaksana melalui sejumlah kegiatan bimbingan yang terangkum dalam suatu program bimbingan (*guidance program*). Dalam penyusunan rencana program Bimbingan dan Konseling di sekolah, harus melibatkan berbagai pihak yang terkait (*stakeholder*) seperti kepala sekolah, guru BK, para guru, tenaga administrasi, orang tua siswa, komite sekolah dan tokoh masyarakat. Guru BK perlu melakukan pengenalan dan sosialisasi program BK kepada seluruh personil sekolah agar seluruh personil sekolah memahami manajemen kerja guru BK di sekolah. Kolaborasi

dapat dilakukan guru BK dengan guru Pendidikan Agama Islam seperti dalam pencatatan bersama mengenai siswa yang bermasalah, melakukan langkah-langkah penanganan, melakukan koordinasi dan merencanakan kegiatan bersama untuk siswa (Agustinawati, 2020). Kemudian, koordinasi guru BK dengan kepala sekolah juga sangat diperlukan dalam penyusunan perencanaan program ini karena peran kepala sekolah dalam perencanaan program ini yaitu sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan pelayanan BK di sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi atasannya serta membantu dalam menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga dan berbagai kemudahan bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien.

Lebih jelasnya, adapun komponen pokok dalam pelayanan BK dan personalianya di sekolah berkaitan dengan penyusunan program (Sukardi, 2003) yaitu sebagai berikut.

- a. Guru BK yang merupakan pelaksana utama kegiatan BK di sekolah
- b. Koordinator BK sebagai penanggung jawab utama pengelolaan BK di sekolah
- c. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan sekolah termasuk kegiatan pelayanan BK
- d. Wali kelas sebagai pengelola khusus sekelompok siswa dalam satu kelas sebagai kelompok sasaran pokok BK
- e. Guru mata pelajaran dan guru praktikan sebagai mitra kerja guru BK dan saling menunjang demi suksesnya program pengajaran dan program BK
- f. Pengawas sekolah bidang BK dalam rangka meningkatkan kinerja BK di sekolah.

- g. Siswa di sekolah yang bersangkutan sebagai kelompok sasaran langsung kegiatan BK.

Schmidt dikutip oleh Ramdani et al., (2020) berpendapat bahwa konselor sekolah diharapkan adalah orang yang bisa mengembangkan dan menyusun program pelayanan BK yang melibatkan orang tua dalam pendidikan anaknya melalui kegiatan kolaboratif antara konselor dengan orang tua. Pelibatan orang tua ini dapat berupa mengadakan kegiatan dengan mengundang orang tua sebagai anggota komite sekolah, memberikan kesempatan orang tua untuk terlibat pada kegiatan pembelajaran anak seperti menjadi tutor, keterlibatan orang tua untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan orang tua terkait perkembangan anak. Dengan adanya kegiatan kolaborasi di sekolah dapat membantu guru BK/Konselor dalam pelaksanaan pelayanan BK sehingga konselor tidak bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan siswa baik dalam pengembangan akademik, karier, sosial maupun personal. Kolaborasi dapat dilakukan guru BK dengan berbagai pihak seperti personil sekolah, orang tua serta dengan masyarakat yang lebih luas. Kolaborasi dapat membantu guru BK untuk mengarahkan siswa agar dapat mencapai kemandirian serta perkembangan yang optimal.

Kolaborasi dilaksanakan oleh guru BK di sekolah agar guru BK tidak melaksanakan fungsi sendiri atau berdiri sendiri dalam membantu siswa memenuhi kebutuhannya. Terpenuhinya kebutuhan siswa dengan bantuan guru BK tergantung pada kemampuan guru BK untuk dapat melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan siswa, dan hal ini nantinya juga akan membantu keluarga siswa dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya terhadap diri siswa. Guru BK/konselor dapat dikatakan profesional apabila mampu melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan

berbagai pihak untuk membantu terpenuhinya kebutuhan siswa, baik dengan guru mata pelajaran, wali kelas, siswa, orang tua maupun masyarakat sekitar. Schmidt dikutip oleh Afdal (2015) menyebutkan bahwa melalui kolaborasi guru BK hendaknya mampu membantu sekolah untuk dapat memahami kebutuhan orang tua terkait tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, meningkatkan keikutsertaan orang tua dan membangun hubungan yang lebih akrab melalui pelaksanaan aktivitas tertentu berkaitan dengan siswa.

#### **4. Pelaksanaan Program**

Pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi rencana program BK yang telah disusun. Dengan kata lain, pelaksanaan program dalam bentuk kegiatan pelayanan BK (Tohirin, 2013). Pelayanan BK yang efektif dapat dicapai apabila terdapat kerja sama antara semua pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan BK sehingga program pelayanan BK dapat berjalan sesuai dengan perencanaan serta pelayanan berhasil. kerja sama ini dapat dilakukan dengan adanya pembagian tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing yang memperlihatkan peran serta kontribusi terhadap kesuksesan pelayanan BK. Diperlukan sosialisasi program BK yang telah disusun kepada seluruh personil sekolah, komite sekolah dan juga orang tua siswa agar setiap pihak dapat melakukan kerja sama dalam melaksanakan program bimbingan dan konseling yang telah dirancang tersebut.

Pada pelaksanaan sosialisasi, guru BK menjelaskan kepada seluruh personil sekolah, komite sekolah dan juga orang tua siswa tentang pentingnya pengumpulan data dan informasi terkait siswa serta *need assessment* dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa serta menentukan arah pengembangan potensi-potensi siswa (Neviyarni S.,

2009; Syukur et al., 2019). Kemudian hasil pengumpulan data, informasi dan *need assessment* ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan program untuk menentukan layanan yang dibutuhkan oleh siswa serta menentukan layanan yang menjadi prioritas untuk diberikan kepada siswa. Selain itu, juga disosialisasikan bahwa apabila permasalahan siswa tidak segera di atasi dan potensi siswa tidak dikembangkan dengan tepat akan berdampak tidak baik bagi siswa tersebut baik dari segi pribadi, belajar, sosial dan kariernya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan, memberikan kesempatan siswa untuk memperoleh pelayanan serta berperan aktif dalam berkolaborasi dengan guru BK dalam pelaksanaan pelayanan BK sehingga memungkinkan siswa untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam pelaksanaan program BK diperlukan waktu khusus oleh guru BK dalam pemberian layanan sehingga terdapat interaksi langsung antara guru BK dengan siswa. Kolaborasi guru BK dengan seluruh personil sekolah serta orang tua siswa sangat diperlukan dalam pelaksanaan program BK, namun perlu diberikan pemahaman terlebih dahulu kepada berbagai pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam berkomunikasi terkait pelaksanaan program BK. Kolaborasi guru BK dengan wali kelas dan guru mata pelajaran diperlukan agar guru BK dapat memberikan pelayanan sesuai dengan yang direncanakan oleh sebab itu peran wali kelas dan guru mata pelajaran pada kegiatan ini yaitu memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan kegiatan BK untuk mengikuti/menjalani layanan/kegiatan yang dimaksudkan itu.

Pada pelaksanaan program diperlukan pembinaan dan pemantauan secara menyeluruh oleh kepala sekolah sehingga Kepala Sekolah dapat memahami serta memberi pemahaman terhadap personil sekolah lainnya terkait kebutuhan siswa serta pelayanan BK sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan siswa. Menurut Kasmir (2016), pengawasan yaitu kegiatan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah disusun. Tujuannya yaitu agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh jabatan atau orang tertentu, baik dengan mata telanjang, menggunakan teknologi, dan hasil (laporan) yang dilakukan secara terus menerus dalam waktu tertentu. Pengawasan dilakukan karena dalam kolaborasi guru BK dengan kepala sekolah pada pelaksanaan program ini, Kepala Sekolah berperan dalam mengkoordinir segenap kegiatan yang diprogramkan dan berlangsung di sekolah, sehingga kegiatan pembelajaran, latihan serta BK merupakan satu kesatuan yang terpadu, harmonis dan dinamis serta Kepala Sekolah bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program, penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan BK (Neviyarni S., 2009; Syukur et al., 2019). Pengawasan dalam pelaksanaan program BK merupakan upaya untuk melihat ketercapaian target berdasarkan perencanaan yang telah disusun sehingga dapat dilakukan perbandingan antara kinerja aktual BK dengan standar yang ditentukan, selain itu untuk melihat kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan program serta menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi kendala sehingga tujuan penyenggaraan pelayanan dapat dicapai. Selain itu, Kepala Sekolah dalam pelaksanaan program juga berperan sebagai



penanggung jawab pelaksanaan kegiatan BK di sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi atasannya. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang dilakukan oleh guru BK perlu dikomunikasikan, diketahui dan disetujui oleh kepala sekolah.

Kolaborasi dengan guru mata pelajaran serta wali kelas perlu juga menjadi perhatian bagi guru BK karena peran guru mata pelajaran dan wali kelas sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan BK di sekolah. Peran guru mata pelajaran dan wali kelas dalam pelaksanaan pelayanan BK di sekolah yaitu membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru-siswa dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling serta berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa, seperti konferensi kasus. Pengembangan suasana kelas sangat diperlukan oleh guru BK agar pelaksanaan pelayanan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah di susun dengan berbagai pertimbangan yang matang. Selain itu, apabila ditemukan permasalahan yang memerlukan adanya kegiatan konferensi kasus diperlukan kerja sama dari guru mata pelajaran dan wali kelas yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan siswa asuhnya sehingga sangat memahami siswa asuhnya tersebut.

Keluarga merupakan pihak terdekat siswa yang dapat membantu dalam perkembangan siswa serta menyelesaikan permasalahannya. Weiser dan Riggio yang dikutip oleh Nugraha & Rahman (2017) menyebutkan bahwa beberapa sumber menunjukkan bahwa faktor keluarga seperti status sosial ekonomi, keterlibatan orang tua dan harapan orang tua mempengaruhi perkembangan belajar dan perkembangan karier siswa. Oleh karena itu, guru

BK/konselor di sekolah perlu meningkatkan interaksi dan komunikasi serta melakukan kolaborasi dengan orang tua siswa untuk mengembangkan pandangan positif siswa berkaitan dengan akademiknya. Kolaborasi dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama-sama diinginkan oleh kedua pihak baik pihak yang berada di lingkungan sekolah maupun dari luar sekolah. Kolaborasi dalam bimbingan dan konseling adalah kegiatan kerja sama antara guru BK/konselor dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan program layanan bimbingan dan konseling, sehingga perlu adanya strategi kolaborasi yang baik antara konselor dengan orang tua khususnya dalam hal pengembangan kemampuan siswa (Nugraha & Rahman, 2017).

Orang tua merupakan pendidik utama bagi siswa, sehingga orang tua diharapkan dapat terlibat aktif dalam proses komunikasi dan interaksi dengan guru BK/konselor terkait program BK yang ditujukan kepada siswa serta berkaitan dengan perkembangan siswa. Orang tua juga berperan dalam pengumpulan data dan informasi, serta membantu kesuksesan layanan BK dengan monitoring di luar sekolah. Konselor dan pihak yang terlibat dalam kolaborasi hendaknya memahami secara jelas karakteristik kolaborasi, sehingga memungkinkan pihak-pihak yang berkolaborasi berpartisipasi secara optimal sesuai dengan tugas, peran dan tanggung jawab masing-masing. Kolaborasi yang dilakukan antara konselor atau guru bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, atau pihak lain yang relevan untuk membangun pemahaman dan atau upaya bersama dalam membantu memecahkan masalah dan mengembangkan potensi siswa. Dalam melakukan kolaborasi konselor memerlukan pengetahuan dan keterampilan untuk dalam melakukan kolaborasi seperti kemampuan

berkomunikasi, menjalin hubungan yang kooperatif serta melakukan koordinasi terkait layanan yang dibutuhkan siswa (Nugraha & Rahman, 2017).

Upaya kolaborasi dapat digunakan untuk mengarahkan perkembangan siswa ke arah yang optimal. Adanya keterlibatan orang tua sebagai pihak terdekat siswa adalah unsur penting untuk ketercapaian tujuan pelayanan BK di sekolah. Oleh karena itu, penting bagi guru BK untuk selalu menjalin komunikasi dengan orang tua serta berkolaborasi terkait perkembangan siswa. Kolaborasi dengan berbagai pihak terutama personil sekolah perlu dilakukan dalam rangka melakukan kerja sama untuk menyelesaikan permasalahan siswa serta mengembangkan potensinya secara optimal melalui kemampuan guru BK/konselor dalam berkomunikasi dan bekerja sama secara kooperatif dengan personil sekolah agar layanan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan (Putranti et al., 2021).

Berdasarkan Permendikbud 111 tahun 2014 dijelaskan bahwa kerja sama merupakan kegiatan mendasar dari pelayanan BK dimana konselor atau guru BK bekerja sama dengan berbagai pihak atas dasar prinsip kesetaraan, saling pengertian, saling menghormati dan saling mendukung. Semua upaya kolaboratif dilakukan untuk kepentingan bersama yaitu untuk memastikan setiap siswa dapat mencapai perkembangan yang optimal baik dari segi pengembangan pribadi, belajar, sosial dan karier. kerja sama dilakukan antara konselor atau guru BK dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, atau pihak lain yang terkait untuk membangun pemahaman dan/atau upaya bersama untuk membantu memecahkan masalah dan mengembangkan potensi siswa.

Dalam rangka melakukan kolaborasi dengan orang tua dapat dilakukan dengan pelibatan orang tua di sekolah berupa mengadakan kegiatan dengan mengundang orang tua sebagai anggota komite sekolah, memberikan kesempatan orang tua untuk terlibat pada kegiatan pembelajaran anak seperti menjadi tutor, keterlibatan orang tua untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan orang tua terkait perkembangan anak. Keberhasilan pelayanan BK, salah satunya ditentukan oleh ketepatan pelayanan yang digunakan dalam membantu permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan pengembangan diri siswa. Bimbingan dan konseling kolaboratif merupakan proses intervensi yang dilakukan melalui kerja sama yang dilakukan guru BK dengan kepala sekolah, guru dan orang tua siswa dalam merencanakan dan memberikan pelayanan kepada siswa dengan mengubah pandangan, tindakan dan suasananya, memahami, menyadari, memaksimalkan dan mengoptimalkan dirinya dan potensinya. Dengan demikian, melalui kolaborasi dengan orang tua yang selalu terjaga akan tercipta pola hubungan yang kondusif untuk dapat menjangkau dan memperluas layanan konseling kepada siswa. Diharapkan dengan adanya kerja sama dengan orang tua dan wali memberikan dampak yang signifikan terhadap layanan BK langsung dengan siswa (Sandra et al., 2022).

Pada pelaksanaan program BK ini, agar berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak di sekolah serta orang tua. Kemudian, kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan program ini yaitu pemberian layanan-layanan kepada siswa sesuai dengan *need assessment* dan perencanaan yang telah disusun yang terdiri dari layanan orientasi, layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan penempatan dan

penyaluran, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konseling perorangan, layanan konsultasi, layanan advokasi dan layanan mediasi. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan pendukung BK yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, kunjungan rumah, konferensi kasus, tampilan kepustakaan dan alih tangan kasus.

## **5. Evaluasi dan Tindak Lanjut**

Pelaksanaan program akan diikuti oleh kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. Setelah pemberian layanan oleh guru BK, akan dilakukan beberapa penilaian yaitu penilaian segera, penilaian jangka pendek dan penilaian jangka panjang. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, apabila tujuan pelayanan tercapai dan masalah terentaskan maka pelayanan dinyatakan berhasil, namun apabila permasalahan belum terentaskan dengan maka akan dibutuhkan pelayanan lanjutan sebagai tindak lanjutnya. Penilaian dilakukan mencakup semua kegiatan BK yang telah dilaksanakan (semua program yang telah dilaksanakan). Penilaian direncanakan dan dilakukan pada setiap tahap kegiatan dalam keseluruhan program (Tohirin, 2013).

Permendiknas No. 20 tahun 2007 menyebutkan bahwa penilaian dalam pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian terhadap pelayanan BK di sekolah merupakan upaya yang dilakukan untuk menentukan kualitas kemajuan pelaksanaan program BK di sekolah sesuai dengan kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program yang telah di susun. Penilaian adalah kegiatan penting dalam manajemen pelayanan BK karena dengan penilaian dapat diketahui dan diidentifikasi keberhasilan pelayanan BK yang telah direncanakan. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan program BK dapat dilihat dari

hasil penilaian yang dilakukan. Kemudian, evaluasi digunakan untuk melihat keterlaksanaan program BK dan penilaian digunakan untuk mengetahui keberhasilan pelayanan yang dilakukan.

Menurut Prayitno (2000) penilaian hasil pelaksanaan pelayanan BK dapat dilakukan melalui kegiatan berikut ini.

- a. Penilaian Segera (LAISEG), merupakan penilaian yang dilakukan segera ketika layanan akan berakhir. Bentuk penilaian ini untuk melihat pengetahuan baru, perasaan positif serta perencanaan kegiatan yang akan di lakukan klien setelah pemberian layanan.
- b. Penilaian Jangka Pendek (LAIJAPEN), merupakan penilaian yang dilakukan beberapa hari setelah kegiatan layanan. Bentuk penilaian ini dilaksanakan pada waktu tertentu yaitu satu minggu sampai satu bulan setelah pemberian layanan dan atau kegiatan pendukung untuk melihat dampak pelayanan atau kegiatan yang telah dilakukan.
- c. Penilaian Jangka Panjang (LAIJAPANG), merupakan penilaian yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yaitu satu bulan sampai dengan satu semester setelah satu atau beberapa layanan dan kegiatan pendukung layanan BK dilakukan untuk melihat dampak lebih jauh layanan dan atau kegiatan pendukung layanan BK yang telah dilakukan.

Ada beberapa upaya tindak lanjut pelayanan BK dapat dilakukan oleh guru BK seperti dengan memperbaiki hal-hal yang dipandang kurang tepat dan kurang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kemudian mengembangkan program dengan menambahkan hal-hal yang dianggap penting dan dapat mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan BK. Untuk lebih konkretnya, upaya tindak lanjut pelaksanaan

pelayanan BK yang dapat dilakukan oleh guru BK dapat dilakukan melalui adanya pemberian penguatan atau pemberian tugas kepada siswa, dapat juga dengan mengikutsertakan siswa pada kegiatan pelayanan BK serta dapat juga dengan membentuk program layanan atau kegiatan pendukung yang dipandang sesuai untuk menindaklanjuti permasalahan siswa.

Dalam penilaian dan tindak lanjut pelaksanaan program BK, guru BK bekerja sama dengan personil sekolah untuk dapat melihat ketercapaian layanan berdasarkan program yang telah dirancang. Guru mata pelajaran dan wali kelas pada kegiatan penilaian ini berperan dalam membantu pengumpulan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan BK upaya tindak lanjutnya (Neviyarni S., 2009; Syukur et al., 2019). Guru mata pelajaran dan wali kelas dapat mengumpulkan informasi terutama terkait dengan sasaran pelayanan yaitu siswa, untuk dapat melihat keberhasilan pelaksanaan pelayanan BK yang telah dilakukan, serta untuk menentukan upaya tindak lanjut yang dapat diberikan.

Selain itu, kolaborasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sebagai pengawas dan penanggungjawab pelaksanaan pelayanan BK juga sangat diperlukan. Dalam hal ini, guru BK dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk melaporkan progres dan keterlaksanaan program BK serta hasil pelaksanaan pelayanan yang dilakukan. Kemudian tindak lanjut atau langkah yang akan dilakukan guru BK untuk dapat lebih mengoptimalkan lagi pelaksanaan pelayanan BK yang dilakukan di sekolah juga perlu menjadi bahan oleh guru BK dalam bekerja sama dengan kepala sekolah serta wakil kepala sekolah karena guru BK akan menilai proses dan hasil

pelaksanaan layanan setelah pelayanan dilaksanakan. Ketika guru BK telah melaksanakan program yang telah dirancangnya, maka selanjutnya guru BK menganalisis hasil penilaian pelayanan yang dilakukan, melakukan upaya tindaklanjut serta mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan pelayanan yang telah dilakukan secara menyeluruh kepada koordinator BK serta Kepala Sekolah (Neviyarni S., 2009; Syukur et al., 2019). Hal ini dilakukan guru BK karena pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling oleh guru BK diharapkan akun tabel atau dapat dipertanggungjawabkan oleh guru BK.

## **PENUTUP**

Bab ini telah menunjukkan pentingnya kolaborasi yang dilakukan guru BK dengan personil sekolah seperti wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, orang tua dan komite sekolah pada setiap tahapan kegiatan pelayanan BK. Setiap kegiatan BK dapat berjalan sesuai dengan perencanaan apabila guru BK mampu berkolaborasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan peran pihak tersebut dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Maka penting bagi guru BK untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan semua personil sekolah sehingga dapat dilakukan kolaborasi pada setiap kegiatan dalam pelayanan BK dengan baik.

## **REFERENSI**

- Adriani, M., Khairani, K., & Sukmawati, I. (2013). Kerjasama Guru Bimbingan dan Konseling dengan Guru Mata Pelajaran dalam Mengembangkan Cara Belajar Siswa. *Konselor*, 2(1), 16–20.  
<https://doi.org/10.24036/0201321732-0-00>
- Afdal, A. (2015). Kolaboratif: Kerangka Kerja Konselor Masa



- Depan. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 3(2), 1–7.  
<https://doi.org/10.29210/12400>
- Agustinawati, E. (2020). Kolaborasi Guru Bimbingan Konseling dan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menangani Siswa Bermasalah di MTs Hidayatul Ummah Malahayu Kabupaten Brebes. *TASAMUH: Media Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 99–117.
- Hamdani, & Afifuddin. (2012). *Bimbingan dan Penyuluhan*. Pustaka Setia.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Raja Grafindo Persada.
- Neviyarni S. (2009). *Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berorientasi Khalifah fil Ardh*. Alfabeta.
- Nugraha, A., & Rahman, F. A. (2017). Strategi Kolaborasi Orangtua dengan Konselor dalam Mengembangkan Sukses Studi Siswa. *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, 3(1), 128–136.
- Permana, S. A. (2018). Kerjasama Guru BK dengan Personel Sekolah dalam Melaksanakan Layanan Bk di Sekolah Menengah Atas (SMAN) 4 Kerinci. *MENARA Ilmu*, XII(79), 73–78.
- Prayitno. (2000). *Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling di sekolah*. UNP.
- Prayitno. (2009). *Arah Kinerja Profesional Sekolah*. UNP.
- Putranti, D., Supriyanto, A., & Jepri, S. (2021). Strategi Kolaborasi Guru Bimbingan dan Konseling dengan Orangtua dalam Pengembangan Karakter Siswa SMP. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 5(February), 37–41.  
<https://doi.org/10.31100/jurkam.v5i1.949>
- Ramdani, R., Nasution, A. P., Ramanda, P., Sagita, D. D., & Yanizon, A. (2020). Strategi Kolaboratif dalam Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, III(1), 1–7.  
<http://journal.stkipmuhammadiyahbarru.ac.id/index.php/jubikops/article/view/14>
- Sandra, R., Neviyarni, S., Herman, N., Syedza, S., & Padang, S.

- (2022). Kolaborasi Guru Bimbingan Konseling dan Orangtua dalam Pembelajaran Jarak Jauh. *Jurnal Edukasi*, 02(1).
- Sari, A. K., S, N., & Syukur, Y. (2021). Urgensi kerjasama personil bimbingan konseling di sekolah. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 5(1), 30–39. <https://doi.org/10.26539/teraputik.51603>
- Sukardi, D. K. (2003). *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Alfabeta.
- Sukardi, D. K. (2008). *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Rineka Cipta.
- Syukur, Y., Neviyarni S., & Zahri, T. N. (2019). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. IRDH.
- Tohirin. (2013). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Rajawali Pers.

A blue folder with white stitching is on the left. A silver pen lies diagonally across the center. A pair of glasses is on the right. In the background, a financial statement document is visible with columns for 'Consolidated financial statements' and 'Separate financial statements' for the years 2012 and 2013. The document includes various numerical values and notes.

**SUPERVISI SEBAGAI PENENTU  
PROFESIONALISME GURU BIMBING DAN  
KONSELING**



# SUPERVISI SEBAGAI PENENTU PROFESIONALISME GURU BIMBINGAN DAN KONSELING

Ujang Khiyarusoleh

PGSD, FKIP, Universitas Peradaban

## Abstrak

Profesional konselor dihadapkan pada berbagai tuntutan profesional, termasuk tuntutan untuk menunjukkan efektivitas. Guru Bimbingan dan Konseling yang profesional bukan hanya sekedar dapat menguasai materi dan sebagai alat untuk transmisi kebudayaan tetapi dapat mentransformasikan pengetahuan, nilai dan kebudayaan ke arah yang dinamis yang menuntut produktivitas yang tinggi dan kualitas karya yang dapat bersaing. Supervisi merupakan salah satu fungsi kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas dan Kompetensi Profesional guru dalam melaksanakan pengajaran. Peningkatan mutu dan Kompetensi Profesional guru dalam kinerjanya sangat berkaitan erat dengan efektivitas pelayanan supervisi. Maka diharapkan kegiatan supervisi hendaknya mampu mendorong guru untuk meningkatkan kualitasnya dalam berbagai kompetensi baik kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional maupun sosial. Jadi guru bimbingan dan konseling merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tataran institusional dan eksperiensial, sehingga upaya meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari aspek guru menyangkut kualitas keprofesionalannya maupun kesejahteraan dalam satu manajemen pendidikan yang profesional. Peningkatan sumber daya guru bisa dilaksanakan dengan bantuan supervisor yaitu orang ataupun instansi yang melaksanakan kegiatan supervisi terhadap guru bimbingan dan konseling. Peningkatan keprofesionalan bertujuan agar seorang guru cepat mendapatkan sertifikasi guru sesuai dengan tujuan, undang-undang guru dan dosen.

**Kata Kunci:** supervisi, profesionalisme, guru bimbingan dan konseling

## PENDAHULUAN

Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya (Suyanto dan Asep Jihad, 2013). Untuk mengetahui apakah peran guru pembimbing sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, perlu dilakukan pengawasan terhadap kinerja guru pembimbing itu sendiri. Dalam hal ini pengawasan tentunya bisa dilakukan oleh semua komponen sekolah, tapi yang paling penting melakukan ini adalah kepala sekolah (Wirata *et al.*, 2015). Untuk mengetahui Kompetensi Profesional Guru Bimbingan dan Konseling salah satunya adalah dilihat dari kegiatan evaluasi dan supervisi (Sugiyono, 2011, ACA, 2010), supervisi dalam praktik konseling sangat penting dan bisa dijadikan investasi masa depan.

Supervisi merupakan suatu usaha *preventif* kepada orang yang membutuhkan. Pengembangan kemampuan profesional guru secara maksimum sesuai dengan tingkat kemampuannya sehingga tercapai tingkat efisiensi kerja yang lebih tinggi. Karena supervisi adalah segala bantuan dari pemimpin sekolah yang bertujuan kepada pengembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya dalam pencapaian tujuan pendidikan (Siraj, 2013). Supervisi adalah bantuan berbentuk pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik (Mashudi, 2013, Syafaruddin, dkk. 2017) menjelaskan bahwa supervisi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah sebagai pejabat

yang berkedudukan di atas atau lebih tinggi dari guru untuk melihat atau mengawasi pekerjaan guru.

Pelaksanaan supervisi akan membantu guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dapat mengendalikan kualitas layanan yang diberikan, meningkatkan profesionalitas, serta sebagai alat untuk memotivasi dalam mengembangkan kinerja sesuai dengan standar keilmuan khususnya bidang bimbingan dan konseling. Menurut (Mashudi, 2013: 171) fungsi dari supervisi bimbingan dan konseling adalah memonitor, mencatat, memberi dukungan, mengukur dan menilai kinerja dan mendorong untuk merefleksi, karena guru bimbingan dan konseling (konselor) merupakan profesi yang memiliki standar profesional (Awalya, 2021).

## **PROFESIONALISME GURU BIMBINGAN DAN KONSELING MELALUI SUPERVISI**

### **1. Supervisi**

Peranan supervisor di sekolah adalah melakukan perubahan. Supervisor bertanggung jawab menciptakan kelancaran proses pembelajaran dengan merencanakan, mengelola dan meningkatkan kualitas pekerjaan guru. Karena itu, paradigma supervisi adalah membantu guru dalam memperbaiki mutu pembelajaran dan pembelajaran sehingga kinerja para guru mengalami peningkatan. Bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang melibatkan hubungan antara seorang konselor dengan individu atau sekelompok individu (Hariko, 2017), serta kolaborasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Kolaborasi kinerja konselor sekolah dengan berbagai pihak, utamanya dengan guru atau staf kependidikan sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling bagi siswa (Ardi & Yendi, 2013).

Supervisi dapat meningkatkan kinerja guru bimbingan dan konseling, saat ini berada dalam masa akuntabilitas (Erford, 2015; Hays, 2010). Profesional konselor dihadapkan pada berbagai tuntutan profesional, termasuk tuntutan untuk menunjukkan efektivitas. Supervisi dan evaluasi program konseling secara umum memberikan dukungan yang konkret, praktis informasi mengenai efektivitas dan efisiensi intervensi program untuk meningkatkan hasil, sektor tertentu, dan populasi klien tertentu (Flamez, 2015). Ketika konselor mulai menyupervisi dan mengevaluasi lebih banyak, mereka dapat meningkatkan identitas konselor dan profesi konseling secara keseluruhan, mungkin membantu profesi mendapatkan prestise saat ini diberikan untuk profesi psikologi, psikiatri, dan pekerjaan sosial (Erford, 2015). Agar semua pemangku kepentingan mendapatkan manfaat dari evaluasi program konseling (Erford, 2015). supervisi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua akar kata, yaitu super yang artinya “di atas”, dan vision mempunyai arti “melihat”, maka secara keseluruhan supervisi diartikan sebagai “melihat dari atas”. (Syafaruddin, dkk. 2017)

Supervisi merupakan salah satu fungsi kepala sekolah meningkatkan kualitas dan kompetensi profesional guru dalam melaksanakan pengajaran (Gusmar, 2020). Supervisi dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah aktivitas yang sangat penting, karena bertujuan untuk membantu Supervisi – konselor – mengembangkan keterampilan dan sumber daya yang dimiliki (Hariko & Rachmawati, 2018).

Supervisi merupakan suatu usaha dalam memberi pelayanan agar seorang guru menjadi lebih profesional dalam mengemban amanah yang dipegangnya untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Dalam hal ini, tidak terlepas dari peran seorang supervisor yang memberikan arahan dan



panduan dalam pembelajaran. Supervisi disini berkaitan dengan kemampuan kepala sekolah dalam memberikan arahan, bimbingan serta memberikan bantuan kepada seorang pendidik atau guru (Jannah, 2019).

Supervisi merupakan suatu bentuk pengawasan terhadap kegiatan pendidikan dalam dunia pendidikan, bukan hanya sekedar pengawasan terhadap fisik material, tetapi proses belajar mengajar serta terhadap situasi. Supervisi pendidikan merupakan suatu bentuk koordinator atau pengawasan dan bimbingan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individual maupun secara kolektif, dengan tujuan agar terwujudlah seluruh fungsi pengajaran yang telah direncanakan dapat dicapai, sehingga dalam memberikan stimulasi atau pengajaran dan bimbingan terhadap siswa lebih optimal serta mereka mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern oleh Bordman dalam (Maralih, 2014). Peran supervisor sebagai fasilitator, dengan contoh dalam menumbuhkan motivasi guru yang tinggi dalam pengembangan keprofesionalan guru seperti yang dikemukakan oleh Sabandi (Sabandi, 2013).

Dalam konteks *life long* profesional learning, supervisi dipahami sebagai pembelajaran spesifik, dimana melalui refleksi pengalaman profesional yang bersifat suportif dan developmental disertai dengan konseling yang berorientasi dukungan (*supportive counseling*) memungkinkan para pekerja profesional yang disupervisi, seperti konselor sekolah, para guru dan sejenisnya memperoleh wawasan (*insight*) profesional dan personal yang baru dari pengalaman mereka sendiri. Pola ini dimaksudkan membantu yang disupervisi untuk mengintegrasikan pengalaman praktis dengan pengetahuan teoritis, menemukan solusi sendiri atas

permasalahan yang mereka hadapi di tempat kerja, menghadapi tekanan internal dan eksternal agar tetap kuat dan untuk membangun identitas profesional mereka. Dengan pola pemikiran seperti ini, supervisi benar-benar dapat mendukung pembelajaran profesional dan sekaligus pengembangan kualitas pribadi yang disupervisi (Taufiq, 2018).

Pengembangan model supervisi mengacu pada empat elemen dalam praktik manajerial, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pengarahan/penggerakan) dan *controlling* (pengendalian).

*Planning* (Perencanaan); Kauffman (Sugiyono, 2011: 30) mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber yang digunakan untuk mencapai tujuan seefektif dan seefisien mungkin. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan supervisi maka ada dua hal pokok yang dilaksanakan pada tahapan ini, yaitu identifikasi dan penyusunan program.

*Organizing* (Pengorganisasian); Hasibuan (Sugiyono, 2011: 32) menyatakan bahwa pengorganisasian merupakan tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam kaitannya dengan supervisi maka ada dua hal yang dilakukan pada tahap ini, yaitu pembagian tugas dan melakukan diskusi.

*Actuating* (Pengarahan/Penggerakan); Siagian (Sugiyono, 2011: 33) menyatakan bahwa penggerakan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong

para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis. Berkaitan dengan hal ini, model supervisi yang dikembangkan oleh peneliti mengarah kepada pendekatan humanistik yang terdiri dari empat tahapan, yaitu pembicaraan awal, observasi, analisis dan interpretasi, pembicaraan akhir.

*Controlling* (Pengendalian); Hersey dan Blandchard (Sugiyono, 2011: 34) mengatakan bahwa manajemen merupakan proses pemberian balikan hasil dan tindak lanjut perbandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tindakan penyesuaian yang diperlukan apabila terdapat penyimpangan-penyimpangan (Basith *et al.*, 2015).

Faktor penghambat supervisi bimbingan dan konseling adalah pada perencanaan sekolah tidak terlibat sebagai sumber data penyusun program, supervisi masih bersifat insidental evaluasi dan tindak lanjut belum terlaksana, dan masalah internal yaitu motivasi dan komitmen yang rendah. Supervisi diharapkan untuk benar-benar efektif, maka supervisi harus merupakan proses yang berkelanjutan, berlangsung secara teratur dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Siklus supervisi sekitar 7 –10 sesi (kecuali jika ada aturan tertentu yang telah dibuat) sebab tujuannya adalah untuk menyediakan pengalaman belajar profesional dan pengembangan kualitas pribadi secara terintegrasi. Proses supervisi dapat dibagi menjadi tiga *fase*. *Fase* permulaan berlangsung 1- 2 sesi pertemuan, di mana fokusnya terutama sekali diarahkan untuk membentuk relasi dan kontrak supervisi serta membuat suatu rencana kerja supervisi. *Fase* pertama itu diikuti oleh *fase* inti yang berlangsung antara 5 – 6 sesi pertemuan dimana pengalaman kerja spesifik ditangani lebih intensif dengan menggunakan

mekanisme *experiential learning*. Fase final terdiri dari dua atau tiga sesi pertemuan, dimana partisipan menyelesaikan persoalan yang tidak selesai, membuat evaluasi final, mengidentifikasi langkah belajar selanjutnya dan satu sama lain menyatakan selamat jumpa lagi (Taufiq, 2018).

## **2. Profesionalisme**

Profesi guru bimbingan dan konseling perlu tumbuh dan berkembang agar dapat memberikan layanan konseling dengan baik. Setiap guru bimbingan dan konseling perlu menyadari bahwa pertumbuhan dan perkembangan profesi merupakan suatu keharusan untuk kinerja dan layanan yang berkualitas (Dahlan, 2017). Salah satu faktor yang mempengaruhi kompetensi profesional guru yakni supervisi. Dalam bidang supervisi, kepala sekolah mempunyai tugas dan bertanggung jawab memajukan pengajaran melalui peningkatan profesi guru secara terus menerus. Kepala sekolah menduduki posisi yang sangat strategis didalam upaya pencapaian keberhasilan suatu sekolah dan berperan sebagai pemimpin pendidikan, administrator pendidikan dan supervisor pendidikan yang turut menentukan efektivitas an efisiensi penyelenggaraan pendidikan disekolah.

Selanjutnya jika merujuk pada manifestasi dari kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling berdasarkan Permendiknas No.27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik kompetensi konselor yang kemudian dijabarkan dalam komponen dan indikator pelayanan bimbingan dan konseling komprehensif yang terdiri (1) pelayanan dasar bimbingan, (2) pelayanan perencanaan individual, (3) pelayanan responsif, dan (4) dukungan sistem serta komponen persiapan dan manajemen program dan komponen laporan evaluasi dan tindak lanjut

(Ulfa, 2014). Selama ini pengawas melakukan supervisi untuk melakukan penilaian terhadap kinerja guru bimbingan dan konseling menggunakan instrumen supervisi bimbingan dan konseling. Pada instrumen/alat penilaian supervisi layanan bimbingan dan konseling meliputi beberapa komponen diantaranya: 1) guru pembimbing; 2) siswa asuh 3) program kerja; 4) dukungan sistem; 5) aktivitas layanan; 6) evaluasi, rencana, tindak lanjut, dan pelaporan (Ulfa, 2014). Pengembangan model supervisi dengan pendekatan humanistik untuk meningkatkan profesionalitas guru bimbingan dan konseling SMA di Kabupaten Kubu Raya, model supervisi dengan pendekatan humanistik layak untuk diimplementasikan, terdiri dari (a) rasional, (b) visi dan misi, (c) tujuan, (d) isi, (e) prosedur, (f) evaluasi, (g) tindak lanjut (h) penutup (Basith et al., 2015). Profesionalitas guru dapat dikembangkan dengan melakukan supervisi secara tepat, terencana dan sistematis sehingga tercipta suasana yang harmonis. Tentunya hal ini dapat terwujud apabila, lembaga satuan pendidikan memiliki tenaga-tenaga pendidik yang profesional dan memiliki kualitas yang baik karena jikalau tidak maka yang diharapkan tidak akan dapat tercapai (Auliya, Thomas, & Latifah, 2012, p. 9).

Pengawas sekolah juga mempunyai tugas untuk meningkatkan kualitas profesi guru melalui kegiatan pemantauan, penilaian, pembinaan, pelaporan, serta tindak lanjut dari setiap kegiatan supervisi yang dilaksanakan, sehingga dapat terwujudnya kualitas pendidikan melalui kegiatan pembelajaran yang optimal dan terutama dapat berdampak pada hasil belajar siswa yang maksimal (Amani, Dantes,& Lesmawan, 2016, p. 3). Penelitian oleh Riyanto (2015) menjelaskan bahwa pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh supervisor cenderung bersifat inspeksi,

korektif untuk mencari kesalahan guru, sehingga pada akhirnya menjadikan supervisi merupakan hal yang ditakuti guru

Guru yang berkualitas tentunya memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi dalam melaksanakan unjuk kerjanya. Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas- tugasnya (Suyanto dan Asep Jihad, 2013: 21). Dengan demikian, sebutan profesionalitas lebih menggambarkan suatu keadaan derajat keprofesian seseorang dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini, guru diharapkan memiliki profesionalitas keguruan yang memadai sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara efektif. Ada beberapa ciri-ciri profesionalitas di bidang pendidikan yang dirumuskan oleh Westby dan Gibson (dalam Suyanto dan Asep Jihad, 2013: 23), sebagai berikut: 1) Memiliki kualitas layanan yang diakui oleh masyarakat; 2) Memiliki sekumpulan bidang ilmu pengetahuan sebagai landasan dari sejumlah teknik dan prosedur yang unik dalam melakukan layanan profesinya; 3) Memerlukan persiapan yang sengaja dan sistematis, sebelum orang itu dapat melaksanakan pekerjaan profesional dalam bidang pendidikan; 4) Memiliki mekanisme untuk melakukan seleksi sehingga orang yang memiliki kompetensi saja yang bisa masuk ke profesi bidang pendidikan; 6) Memiliki organisasi profesi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Peningkatan profesionalitas merupakan proses peningkatan keterampilan guru dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memproduksi hasil pendidikan yang berkualitas bagi siswa.

Konselor profesional memberikan layanan berupa pendampingan (advokasi) pengoordinasian, mengolaborasi dan memberikan layanan konsultasi yang dapat menciptakan peluang yang setara dalam meraih kesempatan dan kesuksesan bagi konseli berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas:

- 1) Setiap individu memiliki hak untuk dihargai dan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Konselor memberikan pendampingan bagi individu dari berbagai latar belakang kehidupan yang beragam dalam budaya, etnis, agama dan keyakinan, usia, status sosial, dan ekonomi, individu dengan kebutuhan khusus, individu yang mengalami kendala bahasa, dan identitas gender;
- 2) Setiap individu berhak memperoleh informasi yang mendukung kebutuhannya untuk mengembangkan dirinya;
- 3) Setiap individu mempunyai hak untuk memahami arti penting dari pilihan hidup dan bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi masa depannya;
- 4) Setiap individu memiliki hak untuk dijaga kerahasiaan pribadinya sesuai dengan aturan hukum, kebijakan, dan standar etika layanan.
- 5) Untuk menjadi seorang konselor profesional tidak cukup hanya memiliki ilmu, keterampilan, dan kepribadian belaka, akan tetapi harus pula memahami dan mengaplikasikan kode etik konseling (KEK). Pada saat ini konselor sedunia menggunakan KEK dari lembaga yang bernama *American Counselor Association (ACA)* (Anggraini, 2017). Dalam rangka meningkatkan Kopetensi Profesional bimbingan dan konseling dibutuhkan pengawasan dan bimbingan dari kepala

sekolah sebagai supervisor (Yussanti & Dwikumaningsih, 2020).

### **3. Supervisi Guru Bimbingan dan Konseling**

Konselor merupakan subjek utama dalam pengembangan profesi bimbingan konseling. Oleh sebab itu, profesionalisme konselor selain berorientasi pada kinerja yang ditampilkan namun juga kepribadian konselor menjadi nilai penting yang diperhitungkan sebagai penunjang profesionalisme dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah.

Pengertian supervisi menurut (Mashudi, 2015: 17) Supervisi adalah suatu proses sistematis dan berkelanjutan dalam pengumpulan, analisis dan penggunaan informasi untuk mengontrol manajemen dan pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memastikan apakah hal-hal apa pun dari suatu program yang sedang dijalankan dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan langkah atau rencana yang telah disusun sebelumnya. Menurut Glickman (dalam Mashudi, 2015:14) Supervisi merupakan serangkaian kegiatan untuk membantu konselor dalam mengembangkan kemampuannya mengelola proses bimbingan demi pencapaian tujuan bimbingan. Menurut (Prayitno, 2001: 24) supervisi merupakan pengawasan yang diberikan oleh pengawas bimbingan dan konseling dengan mengadakan penilaian dan pembinaan melalui arahan, bimbingan, contoh, dan saran kepada guru bimbingan dan konseling (guru kelas) dan tenaga lain dalam bimbingan dan konseling di sekolah. Supervisi bimbingan dan konseling dalam melakukan tugasnya harus bersifat membimbing dan mengatasi masalah, dan bukan mencari kesalahan. Dengan kata lain supervisi yang dilakukan oleh pengawas bimbingan dan konseling harus memfokuskan perhatian kepada usaha



mengatasi hambatan yang dihadapi oleh guru bimbingan dan konseling dan tidak semata-mata untuk mencari kesalahan.

Kegiatan supervisi seyogyanya dilakukan secara periode artinya supervisi dilakukan tidak menunggu sampai terjadi hambatan. Jika tidak ada hambatan, sebenarnya kehadiran pengawas bimbingan dan konseling akan dapat menumbuhkan dukungan moral bagi guru yang sedang mengerjakan tugas. Upaya peningkatan kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor juga merupakan tanggung jawab sekolah dan pemerintah. Tanggung jawab sekolah antara lain diwujudkan dalam bentuk pembinaan internal yang dilakukan di sekolah. Pembinaan guru bimbingan dan konseling atau konselor yang dimaksud melibatkan unsur pengawas bimbingan dan konseling yang bertindak selaku supervisor. Permendiknas No. 12 Tahun 2007 menegaskan bahwa kualifikasi pengawas yaitu memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi. Selain itu, pengawas hendaknya mampu menguasai berbagai kompetensi seperti: (1) kompetensi kepribadian, (2) kompetensi supervisi manajerial, (3) kompetensi supervisi akademik, (4) kompetensi evaluasi pendidikan, (5) kompetensi penelitian pengembangan, dan (6) kompetensi sosial. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa supervisi bimbingan konseling merupakan proses pembinaan dan bantuan yang diberikan pengawas bimbingan dan konseling kepada guru bimbingan dan konseling, untuk dapat mengembangkan keprofesionalannya sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Tujuan Supervisi bimbingan dan konseling. Menurut (Sahertian, 2008: 19) tujuan supervisi

adalah untuk memberikan layanan dan bantuan dalam rangka mengembangkan situasi belajar-mengajar yang dilakukan guru di kelas. Hal ini sejalan dengan pendapat (Masaong, 2013: 6) bahwa tujuan supervisi antara lain membimbing dan memfasilitasi guru mengembangkan kompetensi profesinya, memberikan motivasi kepada guru agar menjalankan tugasnya secara efektif, membantu guru mengelola kurikulum dan pembelajaran dan membantu guru membina siswa agar potensinya berkembang secara maksimal. Senada dengan pendapat di atas (Depdiknas, 2009). Menguraikan tujuan supervisi yaitu sebagai berikut: a. Kegiatan supervisi bimbingan dan konseling meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas dengan guru binaannya, b. Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembimbingan. c. Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan, sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKBK (Rencana Kegiatan Bimbingan dan Konseling) yang telah disusun.

## **PENUTUP**

Pelaksanaan supervisi akan membantu guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dapat mengendalikan kualitas layanan yang diberikan, meningkatkan profesionalitas, serta sebagai alat untuk memotivasi dalam mengembangkan kinerja sesuai dengan standar keilmuan khususnya bidang bimbingan dan konseling. Fungsi dari supervisi bimbingan dan konseling adalah memonitor, mencatat, memberi dukungan, mengukur dan menilai kinerja dan mendorong untuk merefleksi, karena

guru bimbingan dan konseling (konselor) merupakan profesi yang memiliki standar profesional.

## REFERENSI

- ACA Asosiasi Konseling Amerika. (2010). *Persyaratan lisensi untuk profesional konselor*: Laporan negara bagian. Alexandria, VA: Penulis.
- Ardi, Z., & Yendi, F. M. (2013). Konseling online: Sebuah pendekatan teknologi dalam pelayanan konseling. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*
- Auliya, Partono Thomas, Lyna Latifah. (2012). pengaruh supervisi kepala madrasah dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru. *Economic Education Analysis Journal*. <http://digilib.iainkendari.ac.id/791/>
- Awalya et. All (2021). Students perception about counselors communication skills: The differences based on gender and grades in junior high schools. *Islamic Guidance and Counseling Journal* Vol. 3, No. 2, pp. 83-92 <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/igcj>
- Basit, A., Sebastian, V., & Hassan, Z. (2017a). Impact of leadership style on employee performance (a case study on a private organization in Malaysia). *International Journal of Accounting & Business Management*, 5(2), 2289–4519. <https://doi.org/24924/ijabm/2017.11/v5.iss2/112.130>
- Dahlan, Z. (2017). *Guru Bimbingan dan Konseling Sebagai Konselor Di Sekolah Global*. Dasar, A. K. P. (2003). B. Sosok Utuh Kompetensi KonselorSuyanto dan Asep Jihad. (2013). *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Erlangga.
- Erford, B. T. (2015). *Research and evaluation in counseling* (2nd ed.) Stamford, CT: Cengage.

- Flamez, (2015) Counseling assessment and evaluation: fundamentals of applied practice (counseling and professional identity. st Edition, Kindle Edition. ISBN-13:978-1452226248 ISBN-10: 1452226245  
<https://www.amazon.com/Counseling-Assessment-Evaluation-Fundamentals-Professional-ebook/dp/B00NO45XX8>
- Gusmar, R. A. (2020). *Supervisi Pendidikan*. 1–5.  
<https://doi.org/10.31219/osf.io/g7udc>
- Hariko, R., & Rachmawati, I. (2018). Model supervisi klinis berfokus multikultural: supervisi hubungan interpersonal konselor dan staf kependidikan. *Terapeutik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 1(3), 209. <https://doi.org/10.26539/1362> ,  
<https://jurnal.konselingindonesia.com/index.php/jkp/article/view/1>.
- Hayes, D. G. (2010). Introduction to counseling outcome research and evaluation. *Counseling Outcome Research and Evaluation*,  
<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2150137809360006>
- Jannah, Miftahul. (2019). Peranan supervisi pendidikan sebagai fasilitator upaya pengembangan profesionalitas pendidik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa tujuan mencapai mutu pendidikan nasional.  
 DOI:[10.31227/osf.io/4a7q6](https://doi.org/10.31227/osf.io/4a7q6)  
 .Universitas Riau  
<https://www.researchgate.net/publication/333057888>.
- Masaong, A. K. 2013. *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru*. Bandung: Alfabeta
- Mashudi, Farid. (2013). *Panduan Evaluasi Dan Supervisi Bimbingan dan Konseling*. Jogjakarta: DIVA Press
- Maralih (2014), Peranan supervisi dalam peningkatan kualitas pendidikan. *Qathrunâ*, [S.l.], v. 1, n. 01, p. 179 - 192, june 2014. ISSN 2406-954X. *Jurnal UIN*

- Banten Available at:  
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/qathruna/article/view/251>.
- Riyanto (2015). Manajemen kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik di SMA Negeri 5 Lubuklinggau. *urnal manajemen pendidikan*. E- ISSN 2623-0208 and P-ISSN: 1979-732X. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/manajerpendidikan/article/view/1097/908>
- Sabandi, A. (2013). Supervisi pendidikan untuk pengembangan profesionalitas guru berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. XIII (2), 1-9. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pedagogi/article/view/4275>
- Sahertian, Piet A. (2008.) *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siraj, (2013), Peningkatan kinerja konselor melalui peran supervisi pendidikan pada sma negeri 1 makmur kabupaten bireuen, *Unimed* <http://digilib.unimed.ac.id/4764/1/Fulltext.pdf>
- Sugiyono, 2011. *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Semarang: Widya Karya
- Suyanto dan Asep Jihad, (2013). *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Erlangga Syafaruddin, dkk. 2017. *Administrasi Pendidikan*. Medan: Perdana Publishing Pd, M. (2003). *Pendidikan*.
- Taufiq, A. (2018). Model supervisi yang membelajarkan bagi konselor sekolah dan profesi sejenis. *Jurnal Pedagogia*, <https://doi.org/10.17509/pdgia.v15i3.11018>
- Ulfa, Dinia. (2014). Meningkatkan tanggungjawab belajar dengan layanan konseling individual berbasis self management pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Pemalang tahun pelajaran 2013/2014. SKRIPSI. Universitas Negeri Semarang. Dipetik dari

<http://lib.unnes.ac.id/20089/1/1301409050.pdf>

pada tanggal 29 April 2021, jam 12:02.

- Prayitno. (2001). *Pengawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Panduan Kegiatan. Jakarta: Rineka Cipta
- Wirata, I. M. S., Natajaya, I. N., & Dantes, K. R. (2015). Kontribusi supervisi bimbingan konseling, iklim kerja sekolah dan kepuasan kerja guru terhadap kinerja guru pembimbing sma se kabupaten tabanan. *Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume 6, No 1  
[https://ejournal-pasca.undiksha.ac.id/index.php/jurnal\\_ap/article/download/1607/1257](https://ejournal-pasca.undiksha.ac.id/index.php/jurnal_ap/article/download/1607/1257)
- Yussanti, D. W., & Dwikurnaningsih, Y. (2020). Pengembangan instrumen penilaian supervisi manajerial kepala sekolah PAUD berbasis website. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, <https://doi.org/10.24246/j.js.2020.v10.i3.p217-230>

Mengenal Sekilas Sosok  
“Prof. Dr. Sugiyo, M.Si.”







## **Prof. Dr. Sugiyo, M.Si.**

(Pakar Psikologi Pendidikan dan Bimbingan)

Prof. Dr. Sugiyo, M.Si.  
Lahir di Yogyakarta, 11 April 1952, beliau merupakan dosen Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, nomor NIDN beliau 0011045206, Google scholar ID : WcBQz\_YAAAAAJ, Sinta ID : 5983894. Beliau memiliki pengalaman struktural dan organisasi antara lain sebagai:



(1) Tahun 1984 Sekretaris Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan FIP IKIP Semarang; (2) Tahun 1994 sd 1995 Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP IKIP Semarang, (3) Tahun 1995 sd 2003 Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan FIP UNNES, Tahun 2004 - 2007 Ketua Unit Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa UNNES. Tahun 2007 sd 2009 Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi UNNES, 6. Tahun 2012 sd 2016 Sebagai Ketua Prodi S2 dan S3 Manajemen Pendidikan Pascasarjana UNNES. Prof. Dr. Sugiyo, M.Si memperoleh gelar Sarjana (S1) Bimbingan dan Penyuluhan FIP IKIP Yogyakarta tahun 1977, Strata 2 (S2) Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1993, Strata 3 (S3) Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang tahun 2008.

Beliau terlibat dan aktif dalam penelitian, penelitian yang pernah dilakukan diantaranya (1) Pengembangan Model

Evaluasi Pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMA berbasis CIPP, Penelitian Kompetensi tahun 2015, (2) Pengembangan Instrumen Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling Berbasis Proses di SMA. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2016, (3) Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling Berbasis Komunitas di Kota Semarang, Tahun 2017, (4) Peranan Emosi Akademik Terhadap Kinerja Kognitif: Studi Pada Pembelajaran di Lingkungan Kelas dan Hypermedia tahun 2018, (5) Model Bimbingan Kelompok Berbasis Hope Therapy untuk Meningkatkan Psychological Well Being pada siswa Sekolah Menengah tahun 2019. Selain aktif dalam penelitian beliau juga memiliki segudang karya tulis ilmiah yang dipublikasikan, diantaranya (1) School Counselors Performance In Evaluating Counselig Services disampaikan pada seminar di UPI Bandung, (2) Manajemen Pelatihan Bagi Guru Fisika dalam Menyongsong Olimpiadi Fisika di Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Maret Tahun 2015, (3) Kontribusi Kualitas Pribadi Konselor terhadap Keberhasilan Konseling disampaikan di UKSW Salatiga Tahun 2015, (4) The Program Development of Guidance and Counseling Based on Comunity at Semarang Indonesia tahun 2017, (5) Evaluation Model of Guidance and Counseling Service Based CIPP in Senior Hight School tahun 2018, (6) The Role of Achievement Emotions to Cognitive Load tahun 2018, (7) Model Bimbingan Kelompok Berbasis Hope Therapy untuk meningkatkan Psychological Well Being pada Siswa Sekolah Menengah di UIN Malang tahun 2019. (8) Tahun 2021 cek publikasi scopus. Selain karya tulis ilmiah beliau juga menulis beberapa buku diantaranya (1) Pengantar Pengenalan Studi Kasus th 1980. (2) Bimbingan dan Konseling Sekokah th 1983. (3) Administrasi dan Supervisi th 1987. (4) Psiko logi Sosial th 2004. (5) Komunikasi Antar

Pribadi th 2005. (6) Penyusunan Program BK th 2008,7. Modul Evaluasi dan Pelaporan layanan BK. Beberapa karyanya yang diakui memiliki hak kekayaan interlaktual (HAKI) diantaranya; (1) HAKI Buku Manajemen Bimbingan dan Konseling tahun 2016, (2) HAKI Buku Penilaian dalam Bimbingan dan Konseling tahun 2017, (3) HAKI Model Bimbingan Kelompok Berbasis Hope Therapy untuk Meningkatkan Psychological Well Being pada siswa SMA tahun 2019, (4) HAKI Buku Dinamika Motivasi, Emosi dan Kognitif dalam Pembelajaran. (5) Tahun 2022 HAKI Buku Supervisi Untuk Meningkatkan Profesional guru BK/Konselor.

Selain aktif dalam penelitian beliau juga aktif dalam pengabdian, pengabdian yang telah beliau lakukan diantaranya (1) Pengembangan Profesionalisme Guru Bimbingan dan Konseling melalui Model Evaluasi Layanan BK berbasis CIPP di MGBK Kota Pekalongan tahun 2015, (2) Pelatihan Model Evaluasi Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Proses untuk meningkatkan Kinerja Guru BK di MGBK SMA Kota Semarang tahun 2016, (3) Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas untuk meningkatkan Profesionalisme guru di SMA N Boja dan SMA N Kaliwungu Kendal tahun 2017, (4) Pelatihan Model Evaluasi Pelayanan BK Berbasis Proses untuk meningkatkan kinerja guru BK di MGBK SMA Kota Semarang tahun 2018, (5) IbM bagi Paud di Semarang: Mewujudkan Sekolah Sehat berkarakter tahun 2018, (6) Pelatihan Mitigasi dalam bantuan psikologis untuk Bencana Bagi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Banyumanik tahun 2019. Kontribusi beliau dalam dunia Pendidikan membuahkan hasil dengan mendapatkan beberapa penghargaan. Beberapa penghargaan yang dianugerahkan untuk beliau diantaranya (1) Tahun 1984 Dosen Teladan

tingkat 1 Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Semarang, (2) Tahun  
2008 Penghargaan 30 tahun mengabdikan pada Negara RI.



Hak Cipta © pada Penulis dan dilindungi Undang-undang Penerbitan.  
Hak Penerbitan pada Unnes Press | Dicitak oleh Unnes Press  
Jl. Kelud Raya No. 2 Semarang 50237 | Telp. (024) 86008700 ext. 062



**IKAPI**  
IKATAN PENERBIT INDONESIA

ISBN 978-602-285-360-2



9 786022 853602